

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW. I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW. I Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket													
				4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100 %														
1	2	3	Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13												
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	14.748.248	12	15.088.202	100	19.299.095	17,16	3.312.422	0,1716	0,17163613	29,16	3.312.422	243%	22%														
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	1.940.000	12	-	100	-	0	-	0	0	12	-	100%	0%														
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	1.122.000	12	-	100	-	0	-	0	0	12	-	100%	0%														
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	%	100	16.186.876	48	36.439.500	100	35.867.948	0	4.000.000	0	0,11152018	48	4.000.000	48%	25%														
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Bulan	12	16.186.876	48	36.439.500	100	35.867.948	0	4.000.000	0	0,11152018	48	4.000.000	400%	25%														
2.		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Ketersediaan pangan utama, 2.Penguantan cadangan pangan, 3.Skor Pola Pangan harapan, 4.Percentase pengawasan keamanan pangan segar	%	100	2.788.278.800	7	494.446.000	81,22	342.821.308	0	9.641.595	0	0	7	9.641.595	7%	0%	Dinas Ketahan Pangan Kab. Rejang Lebong													
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Percentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	%	100	-		48.554.100	100	51.815.500	0	690.000		0		690.000																
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tersedianya Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	%	100	-		-	100	28.069.500	0	690.000		0		690.000																
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya.	Tersedianya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	%	100	-		48.554.100	100	23.746.000	0	-		0	-	-																
		Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Percentase Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	%	0	2.091.209.100	0	253.205.400	100	109.120.808	0	3.321.000	0	0,03043416	0	3.321.000	0%	0%														
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	ton	20	2.091.209.100	0	253.205.400	100	109.120.808	0	3.321.000	0	0,03043416	0	3.321.000	0%	0%														
		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Percentase Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	%	100	697.069.700	7	192.686.500	100	181.885.000	0	5.630.595	0	0,0309569	7	5.630.595	7%	1%														
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	KWT	7	697.069.700	7	82.430.400	100	95.198.500	0	3.030.000	0	0,03182823	7	3.030.000	100%	0%														
		Koordinasi dan sinkronasi pemantauan dan evaluasi konsumsi perkapita pertahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	%			0	110.256.100	100	86.686.500	0	2.600.595	0	0,03	0	2.600.595	0	100%														
3.		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	%	100	-	0	-	100	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Ketahan Pangan Kab. Rejang Lebong													
		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah kab/kota	%	0	-	0	-	100	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%														
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya sarana dan prasarana pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan daerah kabupaten/kota	%	0		0	-	100	-	0	-	0	0	0	-	0%	0%														
				Rata-rata Capaian Kinerja (%)		4.347.946.019		3.843.284.130		694.796.558		18%		0		694.796.558		#DIV/0!	#DIV/0!													
<b>Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja : semua sub bidang melaksanakan kegiatannya sesuai waktu dan Anggaran Kas.</b>																																
<b>Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : tidak ada (sesuai waktunya dan Anggaran)</b>																																
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : semua sub bidang dapat konsisten dalam melaksanakan kegiatannya.</b>																																
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Mendorong agar semua sub bidang dapat konsisten dalam melaksanakan kegiatannya.</b>																																

\*) Sesuaikan atau diisi dengan nama Provinsi/kabupaten/Kota

**EVALUASI HASIL PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2025**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. REJANG LEBONG**

**OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. REJANG LEBONG**

**TRIWUI : I**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RENSTRA pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra )		Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun Lalu ( 2024 )		Target Kinerja dan anggaran RKPD Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW.I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/d TW.I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				5	6	7	8	9 = 8/7x100%	10=6+8	11=10/5+100	12	13	12	13	12	13					
1	2	3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	12	13		
		Urusan	Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																		
		Bidang Urusan	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																		
		Nilai SAKIP Daerah	Indeks	B		B		B													
		Nilai SAKIP OPD	Indeks	B		BB		B													
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Persen	100%	21.513.717.030,46	106%	12.704.317.383,00	100%	3.767.559.248,98	12,87%	676.731.155	13%	119%	119%	13.381.048.538	119	62			
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi perangkat daerah yang disusun	Persen	100%	141.161.391,96	244,23%	75.202.150,00	100%	24.402.600,00	26,67%	-	26,67%	-	270,90%	75202150,00	270,90	53,27			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Persen	100%	18.532.168.289,00	163%	10.006.272.683,00	100%	3.292.894.888,98	55,09%	654.654.568	55,09%	0,20	218,09%	10660927251,00	218,09	57,53			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100%	45.000.000,00	-	-	100%	-	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00	-	0,00			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Persen	100%	962.861.550,00	129,00%	639.219.245,00	100%	94.345.000,00	0,00%	-	-	-	129,00%	639219245,00	129,00	66,39			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Baik	Persen	100%	220.000.000,00	0,00%	1.199.300.000,00	100%	50.799.000,00	0,00%	-	-	-	0,00%	1199300000,00	-	545,14			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Keadaan Baik	Persen	100%	534.419.199,50	150,52%	264.807.939,00	100%	104.863.000,00	8,33%	13.971.201	8,33	13,32	158,85%	278779140,00	158,85	52,16			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Keadaan Baik	Persen	100%	1.078.106.600,00	53,00%	519.515.366,00	100%	200.254.760,00	-	8.105.386	-	4,05	53,00%	527620752,00	53,00	48,94			
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	70,76		71,09		70,32		71,09		71,09									
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku usaha yang melaksanakan prosedur pengolahan limbah industri dan domestik	Persen	100%	332.322.625,00	120%	-	100%	-	40%	-	40,00%								
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen RPPLH Kabupaten	Dok	1	100.000.000,00	1	186.298.308,00	-	-	-	-	-	-	1	186298308,00	100,00	186,30			
		Penyelektaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Kabupaten/Kota	Dok	2	614.400.000,00	3	475.675.517,00	-	-	-	-	-	-	3	475675517,00	150,00	77,42			
		Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	56,25		62,59		56,23		62,59		111,31		62,59		62,59					
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	95		92,76		93,00		92,76		99,74		92,76		92,76					
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	52,59		45,62		52,59		45,62		86,75		45,62		45,62					
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Udara	Indeks	0-51	211.370.500,00	0-51	96.955.934,00	0-51	116.215.350,80	0-51	5.000.000	100,00	4,30	0-51	0	100	48			
			Persentase keterisian parameter Indeks Kualitas Air	Persen	41,18		35,26		38,24		38,24		100,00		38,24		93	-			
		Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air kabupaten/kota	Indeks	56,25	211.370.500,00	62,59	96.955.934,00	56,23	58.931.400,00	62,59	2.480.000	111,31%	4,21	62,59	99435934,00	111,27	47,04			
			Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	Indeks	95		92,76		-	93,00		92,76		99,74		92,74	0,00	97,64	0,00		
		Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di Kabupaten/Kota	Persen	-		40,00%		-	100%		57.283.950,80	-	2.520.000		4,40	40,00%	2520000,00	0,40	40,00	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persen	6,18%	1.246.354.000,00	4,18%	541.921.500,00	5,18%	163.155.750,00	0%	12.320.000	0,00%	7,55	4,18%	554.241.500	68	44			
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota	Dok	6	1.246.354.000,00	4	541.921.500,00	1	163.155.750,00	-	12.320.000	-	7,55	4	554241500,00	66,67	44,47			
			Persentase Pelaku usaha yang melaksanakan prosedur pengolahan limbah industri dan domestik	Persen	100%		120%		100%		40%		40%								
		Program Pembinaan & Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH )	Kegiatan Peningkatan Ketaatan Penanggungjawab usaha dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan	Persen	100%	282.322.625,00	140,23%	96.506.371,00	100%	20.705.650,00	40,00%	1.687.000	40,00%	8,15	180,23%	98.193.371,00	180	35			
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang memiliki Izin Lingkungan yang Taat	Persen	100%	282.322.625,00	141,23%	96.506.371,00	100	20.705.650,00	40,00%	1.687.000	40%	8,15	181,23%	98193371,00	181,23	34,78			
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Peningkatan Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH yang terselesaikan	Persen	100%	50.000.000,00	200,00%	26.846.425,00	100%	10.206.200,00	25%	1.687.000	25%	16,53	225,00%	28.533.425	225	57			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RENSTRA pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra )		Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran RKPD Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW.I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/d TW.I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10=6+8		11=10+100					
1	2	3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	12	13		
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Percentase Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH yang terselesaikan	100%	50.000.000,00	200,00%	26.846.425,00	100%	10.206.200,00	25%	1.687.000	25,00%	16,53	225,00%	28533425,00	225,00	57,07				
		Percentase Pengelolaan Persampahan	Percentase Pengelolaan Persampahan	57,23		42,87%		54,73%		9,81%		17,92%		17,92%		17,92%					
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan area pelayanan	100	38.076.583,276,00	80%	23.618.647.805,00	100%	6.941.498.475,00	80%	1.211.106.575	80%	17,45	160%	24.829.754.380,00	2	65				
		Pengelolaan Sampah	Timbunan sampah yang tertangani	Ton	120.058	38.076.583,276,00	45.859,71	23.618.647.805,00	21.275	6.941.498.475,00	4.134,68	1.211.106.575	19,43	17,45	49.994,39	24829754380,00	41,64	65,21			
<b>Total</b>	<b>Total</b>					100	62.094.747.431,46	60.789633	40.245.002.634,00	100,00	11.019.340.674,78	10,65	1.908.531.730,00	10,65%	17,32	71,44	42.153.534,364	71,44	63,86		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>						100	39.896.421.292,96	60.789633	40.245.002.634,00	100,00	11.019.340.674,78	10,65	1.908.531.730,00	10,65%	17,32	71,44	42.153.534,364	71,44	63,86		
		Predikat Kinerja				100	#REF!	60.789633	40.245.002.634,00	100,00	11.019.340.674,78	10,65	1.908.531.730,00	10,65%	17,32	71,44	42.153.534,364	71,44	63,86		

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan**  
**Kabupaten Rejang Lebong**

**OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**TRIWULAN : 1 (Satu)**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )		Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s / d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s / d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s / d TW I Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
			4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100 %	10 = 6+8	11 = 10/5 x 100 %	12	13										
1	2	3	Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	DINAS DUKCAPIL			
		Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	B		B		B											DINAS DUKCAPIL		
		Sasaran : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu	%	100%		100%		100%													
			Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Nilai	B		B		B													
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	%	100%	18.303.275.852	100%	9.739.175.165	100%	3.945.098.477	25%	675.552.291	25%	17,12%	125%	10.414.727.456	125%	56,90%				
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	%	100%	15.664.673.207	100%	8.610.307.100	100%	3.454.299.277	25%	665.056.401	25%	19,25%	125%	9.275.363.501	125%	59,21%				
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	%	100%	746.649.393	100%	433.160.572	100%	86.873.600	0%	-	0%	0,00%	100%	433.160.572	100%	58,01%				
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik	%	100%	761.208.500	100%	295.922.000	100%	239.246.300	0%	-	0%	0,00%	100%	295.922.000	100%	38,88%				
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	%	100%	478.402.072	100%	220.801.500	100%	84.357.900	25%	5.492.520	25%	6,51%	125%	226.294.020	125%	47,30%				
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	%	100%	482.042.680	100%	178.983.993	100%	80.321.400	0%	5.003.370	0%	6,23%	100%	183.987.363	100%	38,17%				
		Tujuan : meningkatnya Kwalitas pelayanan publik	Indeks kepuasan Masyarakat (Daerah)	Nilai	82,71		85,04	83	82,71		85,04		103%		100%		83			DINAS DUKCAPIL		
		Sasaran : Meningkatnya Kwalitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai Indeks kepuasan masyarakat bidang kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai	89		85	85	88		84,78		96%				85					
		Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	%	96%	8.583.493.090	92%	2.663.766.470	96%	873.125.700	85%	-	89%	0,00%	177%	2.663.766.470	184%	31,03%				
		Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1. Persentase ASN dan operator mengikuti bintek 2. persentase KIA yang tercetak	%	1.55% 2.85%	7.641.453.090	1.0% 2.70%	2.158.530.600	1.55% 2.85%	873.125.700	1.0% 2.50%	-	0,00%			2.158.530.600		28,25%				
		Program Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	%	98%	176.500.000	94%	-		25.896.050												
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Anak yang memiliki akta kelahiran	%	99%	176.500.000	97,36%	-		25.896.050												
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi	Persentase Aplikasi Administrasi Kependudukan	%	0	400.000.000	94	85.703.025	0	-	94		-									
		Pengumpulan Data Kependudukan dan pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase OPD yang melakukan pemanfaatan data dan kerjasama pelayanan publik	%	0	400.000.000	21,5	85.703.025	0	-	21,5		-									
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	ketersediaan Data base Kependudukan skala kabupaten	tersedia	tersedia	356.500.000	tersedia	77.796.000	tersedia	38.220.850	tersedia	-	-	0,00%	tersedia	77.796.000	tersedia	21,82%				
		Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Ketersediaan Data base Kependudukan	tersedia	tersedia	356.500.000	tersedia	77.796.000	tersedia	38.220.850	tersedia	-	-	0,00%	tersedia	77.796.000	tersedia	21,82%				
Rata-rata capaian kinerja (%)						100	12.480.737.635	100	4.882.341.077	13,84	675.552.291	13,84	13,84	16,86	3.289.072.482	27,4392	27,4392					
Predikat kinerja						100	12480737635	100	4.882.341.077,44	13,83665	675.552.291	13,836647	13,83665	16,85665	3.289.072.481,50	27,439162	27,439162					
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :						Pelaksanaan kegiatan sesuai waktu yang telah ditetapkan																
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :						Proses pengadaan terkendala penyaluran RUP																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :						Sesegera mungkin mengatasi kendala pelaksanaan kegiatan																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :						Setiap pengelolaan diharapkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan																

\*) Sesuaikan atau diisi dengan nama Provinsi/kabupaten/Kota

**Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025**  
**Dinas Perhubungan**

**OPD : Dinas Perhubungan**

**Triwulan : (1) Satu**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/Kegiatan ( <i>Output</i> )	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW 1 Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW .... Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					5	6	7	8	9 = 8 / 7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10 / 5 x 100%	12	13	K	RP	K	RP	
1	2	3	4		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		6.638.652.435	7.907.747.438		8.205.824.044		1.593.545.417		19%		9.501.292.855		143%	Dishub		
2	15 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		6.638.652.435	7.907.747.438		8.205.824.044		1.593.545.417		19%		9.501.292.855		143%	Dishub		
2	15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	2.859.055.014	001	2.896.921.058		3.378.991.794		619.669.150		18%		3.516.590.208		123%	Dishub	
2	15 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi perangkat daerah yang disusun	33.874.065		11.860.000		11.574.000		000		0%		11.860.000		35%	Dishub	
2	15 01 2.01 0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 dokumen	11.860.000	2 dokumen		2 dokumen	0	0%		11.860.000	2 dokumen	100%	Dishub		
2	15 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 dokumen	0	2 dokumen	11.574.000	2 dokumen	0	0%		000	2 dokumen	0%	Dishub		
2	15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.415.153.054		2.481.163.882		2.716.059.057		560.613.200		21%		3.041.777.082		126%	Dishub	
2	15 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		14 Bulan	2.063.368.882	14 Bulan	2.459.179.057	14 Bulan	487.259.700		20%		2.550.628.582	14 Bulan	100%	Dishub	
2	15 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Bulan	417.795.000	12 Bulan	256.880.000	12 Bulan	73.353.500		29%		491.148.500	12 Bulan	100%	Dishub	
2	15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tepat waktu	198.192.463		276.579.882		103.970.500		17.780.000		17%		294.359.882		149%	Dishub	
2	15 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan														Dishub	
2	15 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan														Dishub	
2	15 01 2.06 0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan		1 tahun	24.465.000	1 tahun	77.269.000	1 tahun		0%		24.465.000	1 tahun	100%	Dishub		
2	15 01 2.06 0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perturan Perundangan-undangan yang disediakan		1 tahun	14.150.000	1 tahun	1.900.000	1 tahun		0%		14.150.000	1 tahun	100%	Dishub		
2	15 01 2.06 0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		1 tahun	237.964.882	1 tahun	24.801.500	1 tahun	17.780.000		72%		255.744.882	1 tahun	100%	Dishub	
2	15 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah			18.000.000		148.948.000		000		0%		18.000.000		100%	Dishub	
2	15 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Tahun	18.000.000	1 Tahun	148.948.000	1 Tahun		0%		18.000.000	1 Tahun	100%	Dishub		
2	15 03 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		48.730.771		44.716.038		49.890.000		8.325.950		17%		53.041.988		109%	Dishub	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat		1 tahun	6.500.000	1 tahun	7.000.000	1 tahun	1.900.000		27%		8.400.000	1 tahun	100%	Dishub	
		penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		1 tahun	32.713.038	1 tahun	37.000.000	1 tahun	6.425.950		17%		39.138.988	1 tahun	100%	Dishub	
		Penyediaan jasa pelayan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayan umum kantor yang disediakan		1 tahun	5.503.000	1 tahun	5.890.000	1 tahun		0%		5.503.000	1 tahun	100%	Dishub		
2	15 03 2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		163.104.661		64.601.256		348.550.237		32.950.000		9%		97.551.256		60%	Dishub	
		0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpilih		1 tahun	64.601.256	1 tahun	146.947.000	1 tahun	32.950.000		22%		97.551.256	1 tahun	100%	Dishub	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						201.603.237	1 tahun		0%		000	1 tahun	100%	Dishub		
2	15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		3.779.597.421		5.010.826.380		4.826.832.250		973.876.267		20%		5.984.702.647		158%	Dishub	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		3.728.600.000		4.500.941.855		4.477.737.250		973.876.267		22%		5.474.818.122		147%	Dishub	
2	15 02 2.02 0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah penerangan jalan yang terpasang		1 tahun	4.310.602.505	1 tahun	4.477.737.250	1 tahun	973.876.267		22%		5.284.478.772	1 tahun	100%	Dishub	
		0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang	1 tahun	190.339.350					0%		190.339.350		100%	Dishub		

### Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :

#### Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

\*) Sesuaikan atau diisi dengan nama Provinsi/kabupaten/Kota

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025**  
**Kabupaten Rejang Lebong**

**OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**Triwulan : 1 (Satu)**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100 %	10 = 6+8	11 = 10/5 x 100 %	12	13	12	13	12	13			
1	2	3	Indikator	K	Rp	K	K(%)	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Tujuan :Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaran Pemerintahan	NILAI SAKIP DAERAH	B		B			B		B									
		Sasaran :Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPP	B		B			B		B									
2 ## 01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu	100	2.963.251.247	100	100	3.096.742.125	100	3.341.696.246,30	23	516.123.421	23	15,44	123	3.612.865.546	123	122	Dinas Kominfo	
2 ## 01 2.01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	100	11.017.386	100	100	12.499.900	100	9.967.750	25	3.820.000	25	38,32	125	16.319.900	125	148	Dinas Kominfo	
2 ## 01 2.01 01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	4.158.460	3	100	4.999.900	3	3.874.750	2	-	67	-	5	4.999.900	167	120	Dinas Kominfo	
2 ## 01 2.01 06	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan Iktisar kinerja SKPD	10	6.858.926	10	100	7.500.000	10	6.093.000	-	3.820.000	-	62,69	10	11.320.000	100	165	Dinas Kominfo	
2 ## 01 2.02	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu	100	2.376.395.894	100	100	2.536.691.444	100	2.748.828.477,30	100	477.481.885	100	17,37	100	3.014.173.329	100	127	Dinas Kominfo	
2 16 1 2.02 1	2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	14	2.095.955.894	14	100	2.183.651.444	14	2.473.588.477,30	3	436.711.885	21	18	17	2.620.363.329	121	125	Dinas Kominfo	
2 16 1 2.02 2	2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	280.440.000	12	100	353.040.000	12	275.240.000	3	40.770.000	25	15	15	393.810.000	125	140	Dinas Kominfo	
2 16 1 2.06	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	100	184.686.605	100	100	169.069.899	100	47.399.970	100	1.072.000	100	2,26	100	170.141.899	100	92	Dinas Kominfo	
2 16 1 2.06 1	2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	4.946.000	12	100	5.000.000	1	5.000.000	1	-	100	-	13	5.000.000	108	101	Dinas Kominfo	
2 16 1 2.06 2	2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	12	30.000.000	12	100	-	-	-	-	-	-	-	12	-	100	-	Dinas Kominfo	
2 16 1 2.06 4	2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	26.776.992	12	100	24.763.450	2	18.311.700	1	-	25	-	13	24.763.450	104	92	Dinas Kominfo	
2 16 1 2.06 5	2.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	8.092.778	12	100	10.729.900	3	5.558.770	1	-	33	-	13	10.729.900	108	133	Dinas Kominfo	
2 16 1 2.06 6	2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12.501.709	12	100	6.480.000	4	6.480.000	-	1.072.000	-	17	12	7.552.000	100	60	Dinas Kominfo	
2 16 1 2.06 9	2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	102.369.126	12	100	122.096.549	30	12.049.500	3	-	10	-	15	122.096.549	125	119	Dinas Kominfo	
2 16 1 2.07	2.07	Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik						100	114.157.120	100	-	100	-	100	-	-	-	Dinas Kominfo	
		Pengadaan Mebel								45.214.000		-	-	-			-			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya								68.943.120		-	-			-		-	Dinas Kominfo	
2 16 1 2.08	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100	316.687.362	100	100	310.728.582	100	348.272.729	100	31.249.536	100	8,97	100	341.978.118	100	108	Dinas Kominfo	
2 16 1 2.08 1	2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	4.193.010	12	100	6.000.000	3	5.000.000	1	760.000	33	15	13	6.760.000	108	161	Dinas Kominfo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
				4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100 %	10 = 6+8	11 = 10/5 x 100 %	12	13	12	13	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9 = 8/7 x 100 %	10 = 6+8	11 = 10/5 x 100 %	12	13	12	13	12	13	12	13			
			Indikator	K	Rp	K	K(%)	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	299.924.000	12	100	292.201.182	13	330.004.929	10	30.297.536	77	9	22	322.498.718	183	108	Dinas Kominfo
2	16	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	4.193.010	12	100	3.570.000	2	4.270.000	-	-	-	-	12	3.570.000	100	85	Dinas Kominfo
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	8.377.342	12	100	8.957.400	2	8.997.800	-	192.000	-	2	12	9.149.400	100	109	Dinas Kominfo
2	16	1	2.09	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100	74.464.000	100	100	67.752.300	100	73.070.200	100	2.500.000	100	3,42	100	70.252.300	100	94	Dinas Kominfo
2	16	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	34.464.000	7	100	67.752.300	11	73.070.200	3	2.500.000	27	3	10	70.252.300	143	204	Dinas Kominfo
2	16	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Jumlah bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Tujuan : Meningkatnya Pelaksanaan e-Government	Indeks SPBE															Dinas Kominfo	
					Sasaran: Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE						3									Dinas Kominfo	
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Percentase Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	48	395.000.000		100	521.490.800		323.331.600		4.230.000	-	1,31		525.720.800	100	133	Dinas Kominfo
					Percentase Aplikasi yang dikembangkan		14			100											Dinas Kominfo	
2	16	3	2.02		Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah	Indeks Layanan SPBE	3	395.000.000		100	521.490.800	3	323.331.600		4.230.000	-	1,31		525.720.800	101	133	Dinas Kominfo
2	16	3	2.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah / Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	76	95.000.000	76	100	301.315.600	1	311.886.100	1	4.230.000	100	1	77	305.545.600	200	322	Dinas Kominfo
2	16	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik / Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemda	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1	100.000.000	1	100	211.806.900	1	5.931.500	1	-	100	-	2	211.806.900	200	212	Dinas Kominfo
2	16	3	2.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1	200.000.000	1	100	8.368.300	1	5.514.000	1	-	100	-	2	8.368.300	200	4	Dinas Kominfo
					Tujuan : Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Indeks SPBE															Dinas Kominfo	
					Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Informasi Komunikasi Publik	Nilai Survey Kepuasan Informasi Komunikasi Publik															Dinas Kominfo	
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Percentase Keterbukaan Informasi Publik	100	824.159.518	100	100	890.152.200	100	1.915.611.100	100	31.000.000	100	1,62		921.152.200	-	112	Dinas Kominfo
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan akses informasi masyarakat melalui berbagai media cetak dan elektronik yang cepat dan akurat	100	824.159.518	5	100	890.152.200	100	1.915.611.100	100	31.000.000	100	1,62		921.152.200	-	112	Dinas Kominfo
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik /Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12	300.000.000	12	100	36.846.200	12	31.824.350	3	-	25	-	15	36.846.200	1	12	Dinas Kominfo
2	16	2	2.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12	151.159.518	2	100	90.915.900	12	755.047.250	-	-	-	-	2	90.915.900	17	60	Dinas Kominfo
2	16	2	2.01	7	Layanan Hubungan Media / Relasi Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	85	325.000.000	85	100	738.646.500	60	1.112.983.000	3	31.000.000	5	3	65	769.646.500	76	237	Dinas Kominfo
2	16	2	2.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan / Kemitraan Komunitas dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2	48.000.000	1	100	23.743.600	12	15.756.500	-	-	-	-	23.743.600	-	-	Dinas Kominfo	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
					4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100 %	10 = 6+8	11 = 10/5 x 100 %	12	13								
1	2	3	Indikator	K	Rp	K	K(%)	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Tujuan : Ketersediaan Data Perencanaan Sesuai Standar Kebutuhan Layanan Data	Persentase Data Akurat yang Dapat Digunakan Oleh Pihak Lain															Dinas Kominfo				
		Sasaran : Termanfaatkannya Data dan Informasi Statistik Sektoral	Persentase OPD Yang Menggunakan dan Mengelola Data Statistik Sektoral Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah															Dinas Kominfo				
2	2 <sup>0</sup>	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Data yang Akurat, Mutakhir, Terpadu, dan Akuntabel serta mudah dibagipakaiakan Menuju Satu Data Indonesia (SDI)	100	58.950.104	100	100	14.047.300	100	86.504.600	100	8.830.000	100	10,21	100	22.877.300	100	0	Dinas Kominfo		
2	2 <sup>0</sup>	2	2 <sup>0</sup> 1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral dan Komplisi Produk Statistik Sektoral dan mewujudkan aplikasi data	1	58.950.104	1	100	14.047.300	100	86.504.600	-	8.830.000	-	10,21	100	22.877.300	100	0	Dinas Kominfo	
2	2 <sup>1</sup>	2	2 <sup>0</sup> 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral / Penyelenggaraan sattistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip satu Data Indonesia	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5	58.950.104	1	100	14.047.300	1	86.504.600	-	8.830.000	-	10	1	22.877.300	20	0	Dinas Kominfo	
		Tujuan : Meningkatnya Pengelolaan Keamanan Informasi																				
2	2 <sup>1</sup>	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase kegiatan persandian untuk pengamanan informasi yang mencakup tata kelola, analisis kebutuhan dan pengelolaan SDM, pelaksanaan keamanan informasi, penyediaan layanan keamanan serta terhentuknyaan jaringan komunikasi sandi	60	121.077.300	100	100	24.004.953	30	-	30	-					-	-	Dinas Kominfo		
				Persentase OPD yang Telah menggunakan sandi dalam komunikasi dan Perangkat Daerah	21					21		21						-				
2	2 <sup>1</sup>	2	2 <sup>0</sup> 1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pengamanan informasi meliputi tata kelola dan jaring komunikasi sandi, tersedianya SDM Sandi yang berkompetensi, pelaksanaan keamanan informasi serta tersedianya layanan pengamanan informasi	100	121.077.300	100	100	24.004.953	100	-	100	-			24.004.953	-	0	Dinas Kominfo		
2	2 <sup>1</sup>	2	2 <sup>0</sup> 1	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kab. Rejang Lebong	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1	16.077.300	1	100	8.333.513	1	-	1	-	100	-	2	8.333.513	200	1	Dinas Kominfo
2	2 <sup>1</sup>	2	2 <sup>0</sup> 1	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	30.000.000	1	100	15.671.440	2	-	-	-	-	-	1	15.671.440	100	1	Dinas Kominfo
2	2 <sup>1</sup>	2	2 <sup>0</sup> 1	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab. Rejang Lebong	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1	75.000.000	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kominfo	
				Rata-rata capaian kinerja (%)	34	100	4.546.437.378	33	5.667.143.546,30	33	560.183.421	39	7	35	4.984.524.250	94	89					
				Predikat Kinerja																		

**Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025**  
**Kabupaten Rejang Lebong**

**OPD : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN**  
**TRIWULAN : 1 (satu)**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/Kegiatan ( <i>Output</i> )	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2025) TW I	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket					
				5	6					9 = 8 / 7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10 / 5 x 100%							
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP				
<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN</b>																			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1750	5.924.002.969	97	1.402.160.636	6.707.226.653	91%	618.293.897	203%	0,09	99	2.044.896.183	105%	865%	-	-	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			1750	3.826.101.369	91	974.233.648	5.317.824.154	91%	610.547.897	198%	0,11	99	1.584.781.545	105%	844%	-	-	
1, 2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu		1600	3.315.797.369	91	915.246.498	100 Persen	5.082.878.854	91%	610.547.897	198%	0,12	99	1.525.794.395	105%	723%	-	-
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	16.344.000	0,25	11.777.700	B Predikat	25.000.000	25%	-	-	1	-	6	11.777.700	12%	125%	-	-
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50	4.999.000	3 Dokumen	1.896.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	-	0,30	-	3	1.896.000	6%	38%	-	-	
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	50	11.345.000	3 Laporan	9.881.700	10 Laporan	15.000.000,00	3 Laporan	-	0,30	-	3	9.881.700	6%	87%	-	-	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	200	2.708.755.220	24,35	751.056.026	100 Persen	4.197.886.504	0,22	578.046.551	69%	0,14	84	1.329.102.577	84%	114%	-	-	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	2.408.755.220	0,26	578.116.026	420 Orang/bulan	3.847.886.504	0,14	550.326.551	3%	0,14	60	1.128.442.577	60%	47%	-	-	
2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	300.000.000	24,09	172.940.000	12 Dokumen	350.000.000	0,08	27.720.000	66%	0,08	24	200.660.000	24%	67%	-	-	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	400	227.977.100	2,42	76.366.666	100 Persen	334.000.000	-	-	0,06	-	3	76.366.666	3%	118%	-	-	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	9.998.000	0%	4.656.000	12 Paket	12.000.000	0	-	-	-	3	4.656.000	3%	47%	-	-	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	27.999.100	0	3.898.000	12 Paket	35.000.000	0	-	-	-	0	3.898.000	0%	14%	-	-	
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	40.000.000	0	6.700.000	1 Paket	37.000.000	0	-	-	-	0	6.700.000	0%	17%	-	-	
2.17.01.2.06.0009	Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	149.980.000	2,42	61.112.666	12 Laporan	250.000.000	0	-	-	-	0	61.112.666	0%	41%	-	-	
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	20.000.000	0	17.349.000	100%	250.000.000	-	-	-	-	0	17.349.000	0%	87%	-	-	
2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100	20.000.000	0	17.349.000	2 Unit	50.000.000	-	-	-	-	0	17.349.000	0%	87%	-	-	
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	20.000.000	0	17.349.000	20 Unit	200.000.000	0	-	-	-	0	17.349.000	0%	87%	-	-	
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Keadaan Baik	400	168.730.249	48	41.863.106	100 Persen	168.992.350	0,44	32.501.346	0,48	0,19	6	74.364.452	6%	188%	-	-	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	5.740.000	35	1.740.000	12 Laporan	6.000.000	0,33	2.000.000	2,78	0,33	3	3.740.000	3%	65%	-	-	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	149.990.949	13	34.373.006	12 Laporan	149.992.350	0,20	30.501.346	1,69	0,20	3	64.874.352	3%	43%	-	-	
2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	4.999.300	0	1.003.700	12 Laporan	5.000.000	0	-	-	-	0	1.003.700	0%	20%	-	-	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	8.000.000	0	4.746.400	12 Laporan	8.000.000	0	-	-	-	0	4.746.400	0%	59%	-	-	
2.17.01.2.09.0001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Keadaan Baik	400	173.990.800	16	16.834.000	100 Persen	107.000.000	-	-	0,16	-	0	16.834.000	0%	92%	-	-	
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	37.996.800	16	6.550.000	7 Unit	38.000.000	0	-	-	-	0	6.550.000	0%	17%	-	-	
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	29.994.000	0	7.284.000	4 Unit	20.000.000	0	-	-	-	0	7.284.000	0%	24%	-	-	
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	6.000.000	0	3.000.000	4 Unit	4.000.000	0	-	-	-	0	3.000.000	0%	50%	-	-	
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	100.000.000	0	-	2 Unit	45.000.000	0	-	-	-	0	-	-	0%	0%	-	-
2. 2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Percentase koperasi yang dibina	100	20.000.000	0	22.783.100	<b>51,77 Persen</b>	55.185.100	-	-	-	-	0	22.783.100	0%	114%	-	-	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Pengukuran Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Koperasi Yang Mendapat Bimbingan				20.000.000	0	22.783.100	<b>51,77 Persen</b>	55.185.100	-	-	-	0	22.783.100	0%	114%	-	-
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100	20.000.000	0	22.783.100	25 Unit Usaha	55.185.100	0	-	-	-	0	22.783.100	0%	114%	-	-	
3. 2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	<b>Percentase UMKM Yang Dikembangkan</b>	50	490.304.000	0	36.204.050	<b>50 Persen</b>	179.760.200	-	-	-	-	0	36.204.050	0%	7%	-	-	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Percentase UMKM yang Dikembangkan	50	490.304.000	0	36.204.050	50 Persen	179.760.200	-	-	-	-	0	36.204.050	0%	7%	-	-	
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50	490.304.000	0	36.204.050	150 Unit Usaha	179.760.200	0	-	-	-	0	36.204.050	0%	7%	-	-	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					2.097.901.600	6	427.926.988	1.389.402.499		7.746.000	0,04	0,01	0	435.672.988	0%	21%	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/Kegiatan ( <i>Output</i> )	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2025) TW I	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW II Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 / 7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10 / 5 x 100%	K	RP	K			
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
<b>3.30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>			400	506.181.600	0	405.952.838	1.064.402.499	7.746.000	-	0,01	0	413.698.838	0%		
<b>1.</b>	<b>3.30.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>cakupan pasar yang baik</b>	200	450.000.000	0	387.977.456	<b>80 Persen</b>	830.321.399	0,009	7.746.000	-	0,01	0	395.723.456	0%
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Dibangun Atau Dikelola	200	450.000.000	0	387.977.456	6 Pasar	830.321.399	0,009	7.746.000	-	0,01	0	395.723.456	0%
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	100	180.000.000	0	225.667.895	2 Unit	340.842.879	0	-	-	0	225.667.895	0%	
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100	270.000.000	0	162.309.561	6 Unit	489.478.520	0,016	7.746.000	0,26	0,02	0	170.055.561	0%
<b>2.</b>	<b>3.30.04</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</b>	100	30.171.600	0	10.777.960	<b>25 Persen</b>	182.681.600	-	-	-	0	10.777.960	0%	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan dengan Ketersediaan Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Kabupaten/ Kota	100	30.171.600	0	10.777.960	12 Laporan	182.681.600	-	-	-	0	10.777.960	0%	
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	100	30.171.600	0	10.777.960	12 Laporan	182.681.600	0	-	-	0	10.777.960	0%	
<b>3.</b>	<b>3.30.06</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>cakupan pengawasan terhadap komunitas barang</b>	100	26.010.000	-	7.197.422	<b>50 Persen</b>	51.399.500	-	-	-	0	7.197.422	0%	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Kecamatan Hasil Pelaksanaan Metrologi Legal	100	26.010.000	-	7.197.422	150 Unit	51.399.500	-	-	-	0	7.197.422	0%	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	100	26.010.000	0	7.197.422	150 Unit	51.399.500	0	-	-	0	7.197.422	0%	
<b>3.31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>			104,1	1.591.720.000	6	21.974.150		325.000.000	-	-	0,04	-	0	24.441.650	0%
<b>1.</b>	<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Percentase Industri Kecil Menengah (IKM)</b>	104,1	1.591.720.000	6	21.974.150	<b>0,7 Persen</b>	325.000.000	-	-	0,04	-	0	24.441.650	0%
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	104,1	1.591.720.000	6	21.974.150	10,77 Persen	325.000.000	-	-	0,04	-	0	24.441.650	0%
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwujudan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwujudan Industri	100	68.000.000	3	3.239.700	10 Dokumen	175.000.000	0	-	-	0	3.239.700	0%	
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4,1	1.523.720.000	3	18.734.450	3 Dokumen	150.000.000	3	2.467.500	-	0,02	0	21.201.950	0%
			Rata-Rata Capaian Kinerja (%) :						0,12	84.064.487,13	0,29	0,02	12	687.851.937,38	13%	
			Predikat Kinerja:						0						4.70	

Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja : Pembayaran Gaji, honorarium dan Belanja Kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Proses belanja Barang dan Jasa melalui E Katalog dan Mencermati aturan belanja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : mempercepat proses belanja kebutuhan Kantor sesuai aturan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Jumlah Pagu yang danganarkan sudah sesuai dengan kebutuhan belanja dan Mencermati kembali jumlah pagu yang di refocusing

\*) Sesuaikan atau diisi dengan nama Provinsi/kabupaten/Kota

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan**  
**Kabupaten Rejang Lebong**

**OPD : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Triwulan : 1 (satu)**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW ITahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100 %	10 = 6+8	11 = 10/5 x 100 %	12	13	12	13	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9 = 8/7 x 100 %	10 = 6+8	11 = 10/5 x 100 %	12	13	12	13	12	13	12	13
		Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas penyeleenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah																
		Sasaran : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu																
			Nilai Evaluasi SAKIP OPD																
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	3.080.963.038	100	6.216.711.057	100	3.979.766.681	22	672.965.071	22%	16,91%	121,60	672.965.071	122%	22%	DPMPTSP	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	70.000.000	100	10.000.000	100	13.378.000	0	-	0%	0,00%	100	-	100%	0%	DPMPTSP	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	34.000.000	3	5.000.000	3	6.898.000			0%	0,00%	3	5.000.000	100%	15%	DPMPTSP	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	10	36.000.000	10	5.000.000	10	6.480.000			0%	0,00%	10	5.000.000	100%	14%	DPMPTSP	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100	2.678.774.915	100	3.012.310.337	100	3.236.093.170,9	100	617.856.490	100%	19,09%	200	617.856.490	200%	23%	DPMPTSP	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145	2.471.864.915	145	2.716.750.337	29	2.922.113.170,90	29	533.566.490	100%	18,26%	174	2.716.750.337	120%	110%	DPMPTSP	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	206.910.000	12	295.560.000	12	313.980.000,00	12	84.290.000	100%	26,85%	24	295.560.000	200%	143%	DPMPTSP	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100	122.851.307	100	138.631.731	100	65.753.775	0	-	0%	0%	100	-	100%	0%	DPMPTSP	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5	15.000.000	5	13.019.000	1	20.023.500	0		0%	0%	5	-	100%	0%	DPMPTSP	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	5	22.000.000	5	19.714.800	2	15.868.400	0		0%	0%	5	19.714.800	100%	90%	DPMPTSP	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	2	20.000.000	2	15.850.000	1	13.000.000	0		0%	0%	2	15.850.000	100%	79%	DPMPTSP	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				14.785.000	2	8.030.000	0		0%	0%	0	14.785.000	0%	0%	DPMPTSP	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	60	80.851.307	60	75.262.931	12	8.831.875	0		0%	0%	60	75.262.931	100%	93%	DPMPTSP	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	100	15.000.000	100	1.747.621.000	100	16.388.720	0	-	0%	0,00%	100	-	100%	0%	DPMPTSP	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	6	5.000.000	6	677.347.000	19		0		0%	0%	6	-	100%	0%	DPMPTSP	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10	10.000.000	10	1.070.274.000	15	16.388.720,00	0		0%	0,00%	10	-	100%	0%	DPMPTSP	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100	136.708.688	100	191.560.849	100	354.983.626	19	49.108.581	19%	13,83%	118,75	49.108.581	119%	36%	DPMPTSP	

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan**  
**Kabupaten Rejang Lebong**

**OPD : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Triwulan : 1 (satu)**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )		Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW ITahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
			3		4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100 %		
1	2	Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat		12	4.500.000	12	5.000.000	12	5.000.000	6	2.500.000	50%	50,00%	18	2.500.000	150%	56%	DPMPTSP		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12	84.520.000	12	162.652.281	12	290.364.480	3	46.608.581	25%	16,05%	15	46.608.581	125%	55%	DPMPTSP		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12	27.628.128	12	7.900.000	12	20.000.000	0		0%	0,00%	12	-	100%	0%	DPMPTSP		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor		12	20.060.560	12	16.008.568	12	39.619.146	0		0%	0,00%	12	-	100%	0%	DPMPTSP		
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik</b>		100	<b>57.628.128</b>	100	<b>1.116.587.140</b>	100	<b>293.169.389</b>	5	<b>6.000.000</b>	5%	2,05%	<b>104,76</b>	<b>6.000.000</b>	105%	10%	DPMPTSP		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Dinas jabatan yang terpelihara		18	35.000.000	18	30.387.140	18	30.672.600,00	1	6.000.000	6%	19,56%	19	6.000.000	106%	17%	DPMPTSP		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara		1	22.628.128	1	1.086.200.000	3	262.496.789,00	0		0%		1	-	100%	0%	DPMPTSP		
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase pengembangan iklim penanaman modal</b>		100	<b>47.628.128</b>	100	<b>99.705.300</b>	100	<b>401.810.750</b>	0	<b>4.230.000</b>	0%	1,05%	<b>100</b>	<b>4.230.000</b>	100%	9%	DPMPTSP		
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PERDA tentang kebijakan daerah tentang pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal		1	<b>15.000.000</b>	1	<b>99.705.300</b>	1	<b>401.810.750</b>	0	<b>4.230.000</b>	0%		<b>1</b>	<b>4.230.000</b>	100%	28%	DPMPTSP		
		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kebutuhan Penanaman Modal		1	15.000.000	1	99.705.300	1	401.810.750	0	4.230.000	0%		1	4.230.000	100%	28%	DPMPTSP		
		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah PERDA Penanaman Modal</b>		1	<b>32.628.128</b>	0	-	0	-	0	-	0%	-	0	-	0	-	DPMPTSP		
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PERDA Penanaman Modal		1	15.000.000	0	-	-	-	0	-	0%	-	0	-	0	-	DPMPTSP		
		<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase kegiatan promosi penanaman modal</b>		100	<b>10.000.000</b>	100	<b>143.958.600</b>	100	<b>201.370.225</b>	0	<b>3.630.000</b>	0%	1,80%	<b>100</b>	<b>3.630.000</b>	100%	36%	DPMPTSP		
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pameran / even promosi		100	<b>10.000.000</b>	100	<b>143.958.600</b>	100	<b>201.370.225</b>	0	<b>3.630.000</b>	0%	1,80%	<b>100</b>	<b>3.630.000</b>	100%	36%	DPMPTSP		
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti		1	10.000.000	1	143.958.600	1	201.370.225	0	3.630.000	0%	1,80%	1	3.630.000	100%	36%	DPMPTSP		
		<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase pelayanan penanaman modal</b>		100	<b>123.229.400</b>	100	<b>290.262.340</b>	100	<b>245.605.000</b>	40	<b>24.830.000</b>	40%	10,11%	<b>140</b>	<b>24.830.000</b>	140%	20%	DPMPTSP		
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penanaman modal yang tepat waktu		100	<b>123.229.400</b>	100	<b>290.262.340</b>	100	<b>245.605.000</b>	40	<b>24.830.000</b>	40%	10,11%	<b>140</b>	<b>24.830.000</b>	140%	20%	DPMPTSP		
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data perizinan aplikasi OSS		1	83.196.000	1	251.511.740	1	207.005.000	1	19.830.000	100%	9,58%	2	19.830.000	200%	24%	DPMPTSP		

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan**  
**Kabupaten Rejang Lebong**

**OPD : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Triwulan : 1 (satu)**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW ITahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100 %		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100 %		12	13						
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		100	40.033.400	100	38.750.600	100	38.600.000	30	5.000.000	30%	12,95%	130	5.000.000	130%	12%	DPMPTSP		
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Percentase penendalian pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur		100	<b>388.319.000</b>	100	<b>372.100.021</b>	100	<b>22.692.625</b>	0	<b>870.000</b>	0%	3,83%	100	<b>870.000</b>	100%	0%	DPMPTSP		
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Percentase penendalian pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur		100	<b>388.319.000</b>	100	<b>372.100.021</b>	100	<b>22.692.625</b>	0	<b>870.000</b>	0%	3,83%	100	<b>870.000</b>	100%	0%	DPMPTSP		
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		27	48.300.000	27	27.594.000	-		-		0%	0%	0		-	0%	0%	DPMPTSP	
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		182	243.419.000	182	200.035.400	-		-		0%	0%	0		-	0%	0%	DPMPTSP	
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan		33	96.600.000	33	144.470.621	33	22.692.625	0	870.000	0%	3,83%	33	870.000	100%	1%	DPMPTSP		
		<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>		100%	7.122.737.318	1,00	4.851.245.280,90	0,12	706.525.071	0,00			1,12	706.525.071	0,01	0,00					

**Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan  
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025**

**OPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**Triwulan : I (SATU)**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )/Kegiatan ( <i>Output</i> )	Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu 2024	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Di evaluasi 2025	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDs/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW I Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Keterangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7x100%	10=6+8	11=10/5 x 100%	12	13					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	DISPORA			
			Nilai SAKIP Daerah	B													
			Nilai SAKIP OPD	B		BB		B									
		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Percentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>3.101.221.758</b>	<b>104</b>	<b>3.231.151.840</b>	<b>100</b>	<b>3.174.362.167</b>	<b>16,57</b>	<b>525.928.007</b>	<b>16,57</b>	<b>525.928.007</b>	<b>121</b>	<b>3.757.079.847</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	100	10.000.000	80	7.999.600	100	7.848.000	0,00	-	0,00	-	80	7.999.600	80,0	80
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100	2.514.438.775	106	2.670.257.353	100	2.757.383.882	18,42	507.973.286	18,42	507.973.286	125	3.178.230.639	126	126
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100	327.427.514	93	304.378.630	100	81.471.985	0,00	-	0,00	-	93	304.378.630	93,0	93
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik	100	17.366.784	33	5.763.000	100	35.674.800	0,00	-	0,00	-	33	5.763.000	33,2	33
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100	192.578.573	107	205.403.257	100	235.311.300	7,63	17.954.721	7,63	17.954.721	114	223.357.978	116,0	116
		Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100	39.410.112	95	37.350.000	100	56.672.200	0,00	-	0,00	-	95	37.350.000	94,8	95
		<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>	<b>Percentase pemuda kader yang dibina</b>	<b>36,00</b>	<b>905.799.960</b>	<b>58</b>	<b>523.000.000</b>	<b>36,00</b>	<b>433.777.750</b>	<b>0,70</b>	<b>3.030.000</b>	<b>0,70</b>	<b>3.030.000</b>	<b>58</b>	<b>526.030.000</b>	<b>58,1</b>	<b>58</b>
		Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/kota	Cakupan Pemuda yang dibina	44,95	809.799.960	25	200.000.000	44,95	133.777.750	2,26	3.030.000	2,26	3.030.000	27	203.030.000	25,1	25
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Organisasi Kepemudaan yang dibina	100	96.000.000	336	323.000.000	100	300.000.000	0,00	-	0,00	-	336	323.000.000	336,5	336
		<b>Program Pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan</b>	<b>Percentase Pembibitan olahraga berbakat</b>	<b>100</b>	<b>1.925.060.400</b>	<b>120</b>	<b>2.305.841.500</b>	<b>100</b>	<b>2.628.330.050</b>	<b>0,31</b>	<b>8.270.000</b>	<b>0,31</b>	<b>8.270.000</b>	<b>120</b>	<b>2.314.111.500</b>	<b>120,2</b>	<b>120</b>
		Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Olahraga	100	576.000.000	45	260.448.800	100	254.354.000	0,79	2.020.000,00	0,79	2.020.000	46	262.468.800	45,6	46
		Penyelenggaran Kejuaran Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga	-	-	-	-	100	241.785.000	0,84	2.020.000,00	0,84	2.020.000	0,8	2.020.000	0,0	-
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Percentase Pengcab Olahraga yang dibina	100	960.000.000	92	884.440.000	100	1.250.000.000	0,00	-	0,00	-	92	884.440.000	92,1	92
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Percentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan olahraga rekreasi	100	389.060.400	247	960.952.700	100	882.191.050	0,48	4.230.000	0,48	4.230.000,0	247	965.182.700	248,1	248
		Rata-rata capaian kinerja (%)		100	5.932.082.118	102	6.059.993.340	100	6.236.469.967	8,61	537.228.007	8,61	537.228.007	111	6.597.221.347	111,2	299
		Predikat kinerja		100	5.932.082.118	102	6.059.993.340	100	6.236.469.967	8,61	537.228.007	8,61	537.228.007	111	6.597.221.347	111,2	299

**Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025**  
**Kabupaten Rejang Lebong**

**OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah**

**Triwulan : 1 (satu)**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s / d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s / d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s / d TW.I Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100 %	10 = 6+8	11 = 10/5 x 100 %	12	13	12	13	12	13			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		<b>Tujuan</b>																	
1		Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	B		B	-	B											
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat	100	20.941.430.014	100	2.680.922.824	100	2.849.871.290	65	489.526.234	65,00%	17,18%	165,00	3.170.449.058	165%	15,14%	Sekretariat	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	B	116.676.120	B	15.497.400	B	16.890.500	B	-	100,00%	0,00%	-	15.497.400	0%	0%	Sekretariat	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	16.158.100	3	2.275.000	3	572.800	3	-	100,00%	0,00%	6,00	2.275.000	33%	14,08%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72	100.518.020	9	13.222.400	9	11.508.295	9	-	100,00%	0,00%	18,00	13.222.400	25%	13,15%		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat	100	14.112.115.193	100	2.468.703.703	100	2.639.754.029	100	484.012.878	100,00%	18,34%	200,00	2.952.716.581	200%	20,92%	Sekretariat	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	84	13.216.780.193	14	2.291.583.703	14	2.507.249.041	14	463.272.878	100,00%	18,48%	28,00	2.754.856.581	33%	20,84%		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honorarium pelaksanaan tugas ASN , Tersedianya honorarium THL	72	895.335.000	12	177.120.000	12	132.504.988	12	20.740.000	100,00%	15,65%	24,00	197.860.000	33%	22,10%		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100	741.648.908	100	110.837.814	100	66.617.914	100	-	100,00%	0,00%	200,00	110.837.814	200%	14,94%	Sekretariat	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6	45.062.520	1	7.261.000	1	7.523.760	1	-	100,00%	0,00%	2,00	7.261.000	33%	16,11%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	123.508.688	2	15.719.400	2	20.621.344	2	-	100,00%	0,00%	4,00	15.719.400	33%	12,73%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetakan Dan Penggandaan	12	47.686.100	2	7.645.825	2	7.961.800	2	-	100,00%	0,00%	4,00	7.645.825	33%	16,03%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75	68.567.770	12	11.185.000	12	11.448.260	12	-	100,00%	0,00%	24,00	11.185.000	32%	16,31%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	456.823.830	12	69.026.589	12	19.062.750	12	-	100,00%	0,00%	24,00	69.026.589	32%	15,11%		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100	363.551.845	100	35.783.083	100	75.249.597	100	3.813.158	100,00%	5,07%	200,00	39.596.241	200%	10,89%	Sekretariat	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	75	28.713.000	12	4.690.000	12	4.794.000	12	-	100,00%	0,00%	24,00	4.690.000	32%	16,33%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75	236.440.633	12	25.166.283	12	54.026.766	12	3.813.158	100,00%	7,06%	24,00	28.979.441	32%	12,26%		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75	98.398.212	12	5.926.800	12	16.428.831	12	-	100,00%	0,00%	24,00	5.926.800	32%	6,02%	Sekretariat	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW.I Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100 %			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100	307.609.125	100	50.100.824	100	51.359.250	100	1.700.198	100,00%	3,31%	200,00	51.801.022	200%	16,84%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	42	307.609.125	6	50.100.824	6	51.359.250	6	1.700.198	100,00%	3,31%	12,00	51.801.022	29%	16,84%		
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Percentase Perpustakaan yang dibina	7,58	5.214.932.183	5,05	-	6,06	215.217.077	0	-	0,00%	0,00%	5,05	-	67%	0,00%	Bidang Perpustakaan	
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Sarana dan prasana perpustakaan daerah dalam keadaan baik	100	5.214.932.183	100	-	100	215.217.077	0	-	0,00%	0,00%	100,00	-	100%	0,00%		
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat - Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	4.802.817.450	1	-	1	165.981.288	0	-	0,00%	0,00%	1,00	-	0%	0,00%		
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	3	84.450.000	3	-	3	14.100.000	0	-	0,00%	0,00%	3,00	-	100%	0,00%		
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1	327.664.733	1	-	1	35.135.789	0	-	0,00%	0,00%	1,00	-	100%	0,00%		
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase pengunjung perpustakan yang dilayani pertahun	100	175.617.000	0	-	100	15.135.300	95	-	95,00%	0,00%	95,00	-	95%	0,00%		
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah	1	175.617.000	0	-	3	15.135.300	3	-	100,00%	0,00%	3,00	-	300%	0,00%		
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Percentase Arsip yang Terlindungi dan terselamatkan	100	84.896.640	0	-	100	34.181.150	95	-	95,00%	0,00%	95,00	-	95%	0,00%	Bidang Arsip	
		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Ahlimedia	Percentase Arsip yang di Autentikasi dan di Alih Mediakan	100	84.896.640	0	-	100	34.181.150	95	-	95,00%	0,00%	95,00	-	95%	0,00%		
		Pemeliharaan dan Penetapan Autentisitas Arsip statis sesuai Persyaratan penjaminan keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dililai dan Ditetapkan	100	84.896.640	0	-	130	34.181.150	130	-	100,00%							
		Rata -Rata Capaian Kinerja %		58	2.361.219.064	26	277.336.844	37	321.492.060	160	50.640.645	436,49%	15,75%	186	288.222.642	74,43%	10,64%		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja: *Adanya Kejasama mitra serta pemengang kegiatan*

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja: *masih kurangnya SDM yang ade*

Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: *capaian TW I kegiatan masih banyak belum berjalan akan ditingkatkan kembali pada Tahun berikutnya*

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: *menjalankan semua program kegiatan dan sesuai dengan RKPD Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah*

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan**  
**Kabupaten Rejang Lebong**

**OPD : Dinas PARIWISATA**

**Triwulan : 1 (satu)**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s / d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s / d TW 1 Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s / d TW 1 Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100 %	10 = 6+8	11 = 10/5 x 100 %	12	13	12	13				
1	2	3	Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	
		Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	B		B		B										
		Sasaran : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu	%															
			Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Nilai	B		B		B										
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	%	100%	3.357.265.337	100%	3.565.853.331	100%	3.542.733.180	30	689.566.094	30,00%	19,46%	130%	18.755.290.960	130%	55%	Dispar
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	24.111.264	100%	8.202.000	100%	12.784.750	0,00	-	0,00%	0,00%	100%	8.202.000	100%	34%	Dispar
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	%	100%	2.968.008.008	100%	3.227.959.219	100%	3.267.096.721	36%	651.112.762	36,00%	19,93%	136%	3.879.071.981	35,86%	131%	Dispar
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	%	100%	214.482.893	100%	239.350.600	100%	74.546.825	0,00	8.410.000	0,00%	0,00%	100%	247.760.600	100%	116%	Dispar
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik	%	100%	11.575.680	100%	-	100%	4.320.000	0,00	-	0,00%	0,00%	0%	-	0%	0%	Dispar
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	%	100%	74.360.836	100%	44.734.512	100%	88.889.384	4%	15.193.332	4,00%	17,09%	100%	59.927.844	100%	81%	Dispar
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	%	100%	64.726.656	100%	45.607.000	100%	95.095.500	1%	14.850.000	1,00%	15,62%	100%	60.457.000	100%	93%	Dispar
		Tujuan : Meningkatnya Ekonomi Daerah Sektor Pariwisata	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	%					0,34										
		Sasaran 2: Meningkatnya Sektor Kepariwisataan Daerah	Persentase Tingkat Hunian Hotel	%				2%											
			Rata-rata lama Tinggal ( Hari )	Hari				2											
			Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitasnya	%				52								-			
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Wisatawan Nusantara	%		183.791.712		500.703.800	15	254.560.000	6%	26.319.391	6,00%	10,34%	6,18%	527.023.191	6,18%	287%	Dispar
			Jumlah Event	Event				1								-			
		Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten	Lokasi		183.791.712	110	500.703.800	3	254.560.000	2%	26.319.391	2,00%	0,00%	112%	527.023.191	112%	0%	Dispar
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Promosi Media	%		354.240.000		290.299.800	57,14	528.622.500	2%	4.830.000	2,00%	0,91%	112%	295.129.800	112%	83%	Dispar
		Kegiatan Pemasaran pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	Orang		354.240.000	100	290.299.800	37500	528.622.500	2%	4.830.000	2,00%	0,91%	112%	295.129.800	112%	83%	Dispar
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dibina	%				214.466.662	50	162.964.000	2%	2.420.000	2,00%	1,48%	57%	216.886.662	57%	0%	Dispar
		Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembang kapasitasnya	%				214.466.662	50	162.964.000	2%	2.420.000	2,00%	1,48%	57%	216.886.662	57%	0%	Dispar
			Rata-rata capaian kinerja (%)	100	1.452.285.644	72,47	4.488.879.680,00	7,60	721.320.485,00	17,50%	17,60%	207,68%	19.794.330.613,00	207,68%	509,73%				
			Predikat Kinerja	100	1.452.285.644	72,47	4.488.879.680,00	7,60	721.320.485,00	17,50	17,51	17,52	4.322.085.547,50	207,6	528,98				

Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :

: Kegiatan sudah terlaksana

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

: Ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan terkait tayangan RUP

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

: Agar segera mungkin menyangkai di RUP

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

: Agar segera mungkin melaksanakan kegiatan

**Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan  
Kabupaten Rejang lebong Tahun 2025**

**OPD : DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN**

**TRIWU: 1 (Satu)**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )		Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s / d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s / d TW 1 Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s / d TW 1 Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	12	13	12	13		
1	2	3	Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai Evaluasi Sakip	Nilai	B		B		B		B		B		B		B			
			Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi perkantoran	Nilai	B		B		B		B		B		B		B			
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Percentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	Per센	100	12.528.258.129	100	11.352.549.459	100	12.439.818.123,80	25	2.470.027.098	25	19,9	125	13.822.576.557	125	110,3		
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Per센	100	45.000.000	100	55.216.179	100	34.353.016	25		25	0,0	125	55.216.179	125	122,7		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	Per센	100	129.000.000	100	281.351.086	100	151.601.802	25		25	0,0	125	281.351.086	125	218,1		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Per센	100	12.160.258.129	100	10.766.842.545	95	11.928.911.985,80	25	2.442.534.545	26,31579	20,5	125	13.209.377.090	125	108,6		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Keadaan Baik	Per센	100	144.000.000	100	98.854.665	95	164.990.000	25	18.920.353	26,31579	11,5	125	117.775.018	125	81,8		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	Per센	100	50.000.000	100	150.284.984	90	159.961.320	25	8.572.200	27,77778	5,4	125	158.857.184	125	317,7		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Percentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Per센	100	487.094.472	100	1.004.014.405	100	1.011.273.701	25	19.380.000	25	1,9	125	1.023.394.405	125	210,1		
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Produktivitas Tanaman Padi dan tanaman horti	Per센	100	162.364.824	100	407.264.581	100	331.093.499	25	9.690.000	25	2,9	125	416.954.581	125	256,8		
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Produktivitas Tanaman Perkebunan	ton/th	33726,58	324.729.648	29458,1	596.749.824	30000	680.180.202	0,0	9.690.000	0	1,4	29458,1	606.439.824	87,34387	186,8		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Percentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	persen	100	800.000.000	100	3.783.629.243	100	644.988.253	25	14.130.000	25	2,2	125	3.797.759.243	125	474,7		
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Percentase Pengembangan Prasarana Pertanian	Paket	1	300.000.000	1	376.336.334	1	66.318.773	0	3.030.000	0	4,6	1	379.366.334	100	126,5		
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Percentase Panjang Jalan Usaha Tani dalam kondisi baik	meter	28871,77	500.000.000	7.403.017	3.407.292.909	14.476	578.669.480	0	11.100.000	0	1,9	7403017	3.418.392.909	25641,03	683,7		
		Program Penyuluhan Pertanian	Percentase Penyuluhan Pertanian	persen	25	216.486.432	25	651.161.278	25	553.492.070		3.000.000	0	0,5	25	654.161.278	100	302,2		
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Percentase Kelompok Tani yang di Bina	KT	1,278	216.486.432	1,147	651.161.278	1211	553.492.070	0	3.000.000	0	0,5	1,147	654.161.278	89,74961	302,2		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s / d Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s / d TW 1 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s / d TW 1 Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket						
1	2	3	Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13		
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat	persen	18,16	146.234.462	18,16	824.344.890	18,16	433.279.279	0	12.720.000	0	2,9	18,16	837.064.890	100	572,4
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Jasa Laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/Kota	Per센	100		100	99.456.800	100	98.852.000	25	3.030.000	25	3,1	125	102.486.800	125	
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Produktivitas Daging ternak	ton/th	4818,3	146.234.462	3425,51	724.888.090	4062,65	334.427.279	0	9.690.000	0	2,9	3426	734.578.090	71,09375	502,3
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Per센	6,7	100.000.000												
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ton/th	140,000	100.000.000												
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya	persen	35	846.389.000	25	4.682.313.981	30	511.035.442,58	0	11.100.000	0	2,2	25	4.693.413.981	71,42857	554,5
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Produksi Hasil Perikanan Budidaya	Ton/Th	6000	100.000.000												
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Produksi Hasil Perikanan Budidaya	ton/th	5.475,61	746.389.000	5.445,20	4.682.313.981	5.600,00	511.035.442,58	0	11.100.000	0	2,2	5.445	4.693.413.981	99,44463	628,8
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan	Per센	100	100.000.000												
		Penyediaan dan Penyatauran Dalam Daku Industri Pengelolaan Ikan Dalam 1	Jumlah Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Paket	15	100.000.000												
Rata-rata capaian kinerja (%)					15.224.462,495		22.298.013,256		15.593.886.869,38		2.530.357,098				24.828.370,354			

Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :

Penyelesaian Admininstrasi sesuai dengan Rencana Anggaran Kas

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Terjadi pergeseran pada DPA dan penetapan pihak ketiga pada barjas

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Berkoordinasi dengan pihak terkait agar setiap tahap dapat diselesaikan dengan cepat

**Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN REJANG LEBONG**

**OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TRIWULAN : 1 (satu)**

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					5	6	7	8	9 = 8 / 7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10 / 5 x 100%	12							
1	2	3	4		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	8 01 0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Akintabel dan Tepat waktu	100	21.786.629.717	100	11.756.249.852	100	3.246.966.542	25,00	500.272.389		15,41		12.256.522.241		56,26	Sekretaris	
	8 01 0 1	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100	172.649.000	100	54.347.500	100	30.000.000	-	-	-	100,00	54.347.500	100,00	31,48		
	8 01 0 1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Adm Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100	18.743.213.951	100	10.361.009.114	100	2.665.773.042	25,00	485.683.008	25,00	18,22	125,00	10.846.692.122	125,00	57,87	
	8 01 0 1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang tepat waktu	100	1.831.098.460	100	767.330.973	100	255.800.000	25,00	5.687.801	25,00	2,22	125,00	773.018.774	125,00	42,22	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik	100	316.280.000	100	296.691.000	100	88.400.000	-	-	-	100,00	296.691.000	100,00	93,81		
	8 01 0 1	2.08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam keadaan Baik	100	368.023.000	100	162.354.176	100	58.993.500	25,00	5.309.580	25,00	9,00	125,00	167.663.756	125,00	45,56	
	8 01 0 1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	100	355.365.306	100	114.517.089	100	148.000.000	25,00	3.592.000	25,00	2,43	125,00	118.109.089	125,00	33,24	
	8 01 0 2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Kabupaten Rejang Lebong	100,00	470.000.000	100,00	2.824.496.100	100,00	1.098.381.860	25,00	5.730.000		0,52		2.830.226.100		602,18	Kabid Ideologi	
	8 01 0 2	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pebaksaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemahaman terhadap ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100	470.000.000	100	2.824.496.100	100	1.098.381.860	0,50	5.730.000	0,50	0,52	100,50	2.830.226.100	100,50	602,18	
	8 01 0 3	PROGRAM PENINGKATAN PER PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100,00	21.710.314.490	100,00	41.451.263.995	100,00	1.878.087.900	-	7.140.000		0,38		41.458.403.995		190,96	Kabid Politik	
	8 01 0 3	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Persentase Jumlah partai politik yang tertib administrasi dan data yang akuntabel	100	21.710.314.990	100	41.451.263.995	100	1.878.087.900	0,38	7.140.000	0,38	0,38	100,38	41.458.403.995	100,38	190,96	
	8 01 0 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT	Presentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong	100,00	359.181.807	100,00	161.080.700	100,00	76.718.100	-	-	-	-				Kabid Ketahanan		
	8 01 0 4	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase terlaksananya Monitoring Ormas dan Ormas Asing dalam Kabupaten Rejang Lebong	100	359.181.807	100	161.080.700	100	76.718.100	-	-	-	-	100,00	161.080.700	100,00	44,85	
	8 01 0 5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Presentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kabupaten Rejang Lebong	100,00	387.000.000	100,00	218.126.550	100,00	135.000.000	-	3.030.000		2,24		221.156.550		57,15	Kabid Ketahanan	
	8 01 0 5	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Presentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	387.000.000	100	218.126.550	100	135.000.000	2,24	3.030.000	2,24	2,24	102,24	221.156.550	102,24	57,15	
	8 01 0 6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	10,00	403.000.000	10,00	1.009.483.651	10,00	528.000.000	25,00	80.715.000		15,29		1.090.198.651		270,52	Kabid Wasbang	
	8 01 0 6	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	dokumen rencana aksi Kewaspadaan dini, Penanganan Konflik sosial dan Pembauran Kebangsaan dikabupaten	1 Dok	403.000.000	100	1.009.483.651	1 Dok	528.000.000	-	80.715.000	-	15,29	100,00	1.090.198.651	-	270,52	
3					45.116.126.014		57.420.700.848		6.963.154.402		596.887.389		8,57						
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%):														
					Predikat kinerja:														
					Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja : Konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan														
					Faktor Penghambat pencapaian kinerja : Sumber Daya yang terbatas														
					tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mengoptimalkan Sumber daya dan dana														
					tindak lanjut diperlukannya dalam rencana Perangkat Daerah : Konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan														

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025**  
**Kabupaten Rejang Lebong**

**OPD** : Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
**Triwulan** : 1 (satu)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s / d Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s / d TW 1 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s / d TW 1 Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100 %	10 = 6+8	11 = 10/5 x 100 %					
			Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	
		Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kinerja kinerja dan pelayanan daerah	Nilai SAKIP Daerah		100	4.307.701.939	580	18.979.623.747	100	29.439.886.899	3	812.398.493	2,76	3	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu		100	100	2.989.126.379	291	13.432.993.577	100	3.505.803.583	22	780.809.670	22,27	22
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan laporan evaluasi Perangkat Daerah yang di susun		100	100	23.808.745	287	50.025.880	100	13.240.000	-	-	-	287
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu		100	100	2.627.139.027	292	11.677.153.360	100	2.849.725.408	26	732.146.753	25,69	26
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu		100	100	209.845.667	282	720.214.297	100	131.694.175	-	-	-	282
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik		100	100	125.000.000	195	469.783.000	100	-	-	0	-	195
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik		100	100	46.514.058	224	120.617.570	100	65.000.000	15	10.066.422	15,49	15
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik		100	100	81.818.882	282	395.199.470	100	446.144.000	9	38.596.495	8,65	9
		<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Kebencanaan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.318.575.560</b>	<b>289</b>	<b>5.546.630.170</b>	<b>100</b>	<b>25.934.083.316</b>	<b>0</b>	<b>31.588.823</b>	<b>0,12</b>	<b>0</b>	<b>289</b>
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100	100	96.400.000	295	906.539.850	100	559.724.316	1	7.820.000	1,40	1
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Lokasi Pasca Bencana yang Diperbaiki		100	100	1.138.718.632	283	3.701.573.000	100	25.231.350.000	0	20.198.823	0,08	0
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase sarana dan prasarana kebencanaan dalam kondisi baik		100	100	179.856.928	294	938.517.320	100	143.009.000	2	3.570.000	2,50	2
Rata-rata capaian kinerja (%)							100,00	14.719.943.449,50	11,20	406.199.246,50	11,20			301	
Predikat kinerja							100,00		11,20		11,20			301	
Rata-rata capaian kinerja (%)							100,00		11,20		11,20			301	
Predikat kinerja														301,20	

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan**  
**Satuan Polisi Pamong Praja**

**OPD : SATPOL PP**

**Triwulan : I (satu)**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )		Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW I Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100 %		12	13		
			Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik																			SATPOL PP	
		Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel dan Transparan	Nilai Sakip OPD																			
		Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Tepat Waktu	Percentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu		100	5.361.089.872	178	4.496.307.504	100%	5.068.508.009	18,21%	923.098.476	18,21%	18,21%	178,18	5.419.405.980	178,18%	101%				
		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP		100	20.200.000	132	9.708.100	100%	10.111.200	0,00%	-	0,00%	0,00%	132,00	9.708.100	132%	48%				
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu		100	4.879.505.534	172	4.311.997.467	100%	4.874.364.948	18,87%	920.004.297	18,87%	18,87%	172,19	5.232.001.764	172%	107%				
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase administrasi kepegawaian perangkat daerah		100	100.000.000	175	-	100%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	175,00	-	175%	0%				
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Administrasi Umum pemerintah daerah		100	173.146.200	349	107.270.890	100%	44.356.861	0,00%	-	0,00%	0,00%	349,00	107.270.890	349%	62%				
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase pengadaan barang milik daerah yang baik		100	-	99	-	100%	20.846.000	0%	-	0,00%	0,00%	99,00	0,00	99%	0%				
		Kegiatan : Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam keadaan baik		100	35.950.000	195	21.776.805	100%	41.008.000	7,55%	3.094.179	7,55%	7,55%	195,08	24.870.984	195%	69%				
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase pemeliharaan barang milik Daerah dalam keadaan baik		100	152.288.138	161	45.554.242	100%	77.821.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	161,00	45.554.242	161%	30%				
2		Tujuan : Menciptakan ketertiban masyarakat dan ketertiban umum																				
		Sasaran : Meningkatnya Penegakan Peraturan dan Produk Hukum Daerah	Percentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketertiban dan Keindahan (K3)																			
		Program : Peningkatan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Percentase Pelaksanaan Pencegahan dan Penangan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum		100	2.166.614.600	53	4.758.430.737	100%	547.314.200	1,33%	7.276.000	1,33%	1,33%	53,01	4.765.706.737	53%	220%				
		Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Percentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketertiban dan Keindahan)		100	1.952.378.600	50	4.677.909.499	100%	486.465.250	1,07%	5.212.000	1,07%	1,07%	50,01	4.683.121.499	50%	240%				
		Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Percentase Masyarakat yang memperoleh pelayanan ketertiban dan ketertiban umum yang terkena dampak gangguan ketertiban dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup		100	214.236.000	83	80.521.238	100%	60.848.950	3,39%	2.064.000	3,39%	3,39%	83,03	82.585.238	83%	39%				
		Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Percentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil							-												
		Rata-rata capaian kinerja (%)			100	7.527.704.472	142	9.254.738.241	100%	5.615.822.209	16,57%	930.374.476	16,57%	16,57%	142,17	10.185.112.717,00	142,17%	135%				
		Predikat Kinerja			100	7.527.704.472	142	9.254.738.241	100%	5.615.822.209	16,57%	930.374.476	16,57%	16,57%	142,17	10.185.112.717,00	142,17%	135%				
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			: 1. SDM yang memadai, sarana prasarana serta anggaran yang mendukung 2. Koordinasi yang baik antar Bidang																	
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja			: 1. Keterbatasan SDM yang dapat mengoprasiakan Komputer 2. Adanya Efisiensi Anggaran 3. Kurangnya ada kerjasama antar Bidang																	
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: 1. Penambahan SDM yang dapat mengoprasiakan Komputer/Leptop 2. Sebelum melakukn kegiatan hendaknya berkoordinasi dengan bidang2																	

**Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025**  
**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**

**OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD)**

**Triwulan : I (Satu)**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )		Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai Dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW.I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW.I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					4		5		6		7		8		9 = 8/7X100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100 %	
1	2	3	Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
1		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Percentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	%	100%	144.790.838.287	255,50%	121.316.072.535	100%	39.943.724.487	33,32%	6.185.280.520	33,32%	15,48%	288,82%	127.501.353.055	288,82%	88,06%		
2 #	0 2.0 1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	%	100%	73.325.408	389,20%	98.132.426	100%	39.386.600	0,00%	-	0,00%	0,00%	389,20%	98.132.426	389,20%	133,83%		
2 #	0 2.0 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	18	32.000.000	9	28.217.400	3	12.538.000	1	-	0,00%	33,3%	10	28.217.400	55,56%	88,18%	BPKD	
2 #	0 2.0 1 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	60	41.325.408	40	69.915.026	10	26.848.600	3	-	0,00%	30,0%	43	69.915.026	71,67%	169,18%		
2 13 01 02	0 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Percentase Terlaksanaanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	%	100%	135.981.065.295	378,29%	113.496.224.806	100%	38.248.574.852	16,09%	6.155.222.780	16,09%	16,09%	394,38%	119.651.447.586	394,38%	87,99%		
2 #	0 2.0 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	128.482.657.470	3060	106.348.635.807	840	36.936.186.755	210	5.852.795.497	15,85%	25,0%	3270	112.201.431.304	23357,14%	87,33%		
2 #	0 2.0 2 2	Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	5.538.360.000	45	6.140.760.943	12	1.312.388.097	3	302.427.283	23,04%	25,0%	48	6.443.188.226	400,00%	116,34%		
2 #	0 2.0 2 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Atau Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	70	1.960.047.825	28	2.361.674.672	0	-	0	-	0,00%	0,0%	28	2.361.674.672	40,00%	120,49%		
5 0 0 2.0 1 6	0 2.0 1 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	%	100%	5.015.568.572	373,40%	4.097.986.671	100%	635.418.250	1,47%	9.308.880	1,47%	1,47%	374,86%	4.107.295.551	374,86%	81,89%		
5 0 0 2.0 1 6 1	0 2.0 1 6 1	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	60	49.503.272	48	246.351.000	12	8.153.000	0	-	0,00%	0,0%	48	246.351.000	80,00%	497,65%		
5 0 0 2.0 1 6 2	0 2.0 1 6 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	60	1.278.454.800	48	1.959.511.700	12	344.009.000	0	-	0,00%	0,0%	48	1.959.511.700	80,00%	153,27%		
5 0 0 2.0 1 6 4	0 2.0 1 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	60	1.053.188.980	48	369.459.200	12	194.931.000	3	1.000.000	0,51%	25,0%	51	370.459.200	85,00%	35,17%		
5 0 0 2.0 1 6 5	0 2.0 1 6 5	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan & Penggandaan yang disediakan	Paket	60	561.690.560	48	158.013.000	12	32.500.000	3	-	0,00%	25,0%	51	158.013.000	85,00%	28,13%		
5 0 0 2.0 1 6 6	0 2.0 1 6 6	Penyediaan Bahan Bacaan & Perat. Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan & Perat. Perundang-Undangan	Dokumen	120	555.970.560	48	1.259.184.516	12	22.757.000	3	2.000.000	8,79%	25,0%	51	1.261.184.516	42,50%	226,84%		
5 0 0 2.0 1 6 9	0 2.0 1 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	300	1.516.760.400	340	1.769.474.776	120	33.068.250	30	6.308.880	19,08%	25,0%	370	1.775.783.656	123,33%	117,08%		
5 0 0 2.0 1 8	0 2.0 1 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam keadaan baik	%	100%	1.763.995.752	357,15%	938.373.491	100%	566.086.105	3,67%	20.748.860	3,67%	3,67%	360,82%	959.122.351	360,82%	54,37%		
5 0 0 2.0 1 8 1	0 2.0 1 8 1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dokumen	60	94.781.760	48	330.849.005	12	15.300.000	3	-	0,00%	25,0%	51	330.849.005	85,00%	349,06%		
5 0 0 2.0 1 8 2	0 2.0 1 8 2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Dokumen	60	1.542.599.472	48	857.953.051	12	530.398.105	3	20.748.860	3,91%	25,0%	51	878.701.911	85,00%	56,96%		
5 0 0 2.0 1 8 4	0 2.0 1 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Dokumen	12	126.614.520	42	314.411.452	12	20.388.000	0	-	0,00%	0,0%	42	314.411.452	350,00%	248,32%		
5 0 0 2.0 1 9	0 2.0 1 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Keduaan Baik	%	100%	1.956.883.260	351,70%	825.252.719	100%	454.258.680	0,00%	-	0,00%	0,00%	351,70%	825.252.719	351,70%	42,17%		
5 0 0 2.0 1 9 2	0 2.0 1 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	Unit	25	586.781.480	100	287.526.488	25	145.052.280	4	0	0,00%	16,0%	104	287.526.488	416,00%	49,00%		
0 0 2 0 0 9 9	0 0 2 0 0 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi, Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	2	738.223.380	10	531.261.921	2	152.316.400	0	-	0,00%	0,0%	10	531.261.921	0,00%			
0 0 2 0 0 9 9 #	0 0 2 0 0 9 9 #	Pemeliharaan/rehabilitasi sara dan prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	10	631.878.400	35	65.331.851.257	10	156.890.000	0	-	0,00%	0,0%	35	65.331.851.257	350,00%	10339,31%		
2		Program Pengelolaan Keuangan daerah	Percentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100%	1.149.803.281.103	1109,23%	410.811.926.378	100%	165.177.177.061	3,76%	6.207.482.319	33,46%	3,76%	417.019.408.697	1142,69%	1142,69%	36,27%		
			Percentase Program Kegiatan Yang tidak terlaksana	%	0%	0,00%	281.017.200	0%	0	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	281.017.200	0,00%	0,00%			
5 0 0 2.0 1	0 2.0 1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Percentase Pencapaian Penyusunan Rencana Anggaran Daerah oleh Perangkat Daerah	%	100%	5.386.756.680	370,91%	3.052.937.186	100%	955.294.240	19,40%	185.351.920	19,40%	19,40%	390,31%	3.238.289.106	390,31%	60,12%		
5 0 0 2.0 1 1	0 2.0 1 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen	250	1.255.005.800	200	1.276.544.390	50	104.219.920	12	11.599.920	11,13%	24,0%	212	1.288.144.310	0,00%	102,64%		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Pada Tahun 2026 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sampai Dengan RKPDA Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDA Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDA Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDA (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDA s/d TW.I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW.I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7X100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100 %		12	13	
			Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5	0 2 0 2 1 0 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Dokumen	500	1.860.507.400	380	917.538.756	100	769.279.620	21	173.752.000	22,59%	21,0%	401	1.091.290.756	80,20%	58,66%		
5	0 2 0 2 1 0 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	500	2.271.243.480	380	1.255.073.640	100	81.794.700	0	-	0,00%	0,0%	380	1.255.073.640	76,00%	55,26%		
5	0 2 0 2 1 0	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	0	-	2	215.320.800	0	0	0	-	0,00%	0,0%	2	215.320.800	0,00%	0,00%		
5	0 0 2 0 2 2 2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<b>Percentase Pencapaian Penyusunan Rencana Anggaran Daerah oleh Perangkat Daerah</b>	%	100%	5.386.756.680	384,91%	2.214.445.356	100%	273.745.146	3,28%	8.990.399	3,28%	3,28%	388,20%	2.223.435.755	388,20%	41,28%		
5	0 2 0 2 2 1 0	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas daerah	Dokumen	0	-	100	306.289.005	8500	227.134.346	210	8.990.399	3,96%	2,5%	310	315.279.404	100,00%	100,00%		
5	0 0 2 0 2 2 3	Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	0	-	200	150.676.105	74	46.610.800	37	-	0,00%	50,0%	237	150.676.105	100,00%	100,00%		
5	0 2 0 2 3 0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<b>Percentase Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	%	100%	4.099.911.630	388,68%	1.105.792.312	100%	162.659.000	2,89%	4.700.000	2,89%	2,89%	391,57%	1.110.492.312	391,57%	27,09%		
5	0 0 2 0 2 3 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA yang terkonsolidasi	Dokumen	175	866.125.310	105	63.894.833.423	35	0	0	-	0,00%	0,0%	105	63.894.833.423	60,00%	7377,09%		
5	0 0 2 0 2 3 0	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	25	2.734.283.600	20	64.194.199.350	5	140.029.500	1	4.100.000	2,93%	20,0%	21	64.198.299.350	84,00%	2347,90%		
5	0 0 2 0 2 3 7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	50	499.502.720	40	184.349.939	10	22.629.500	1	600.000	2,65%	10,0%	41	184.949.939	82,00%	37,03%		
5	0 2 0 2 4 0	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<b>Percentase Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	%	100%	1.139.675.633.493	326,26%	405.299.724.582	100%	163.555.777.800	3,67%	5.998.750.000	3,67%	3,67%	329,93%	411.298.474.582	329,93%	36,09%		
0 0 2 0 2 0 8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Dokumen	60	1.115.583.750.493	42	400.633.738.532	12	162.555.777.800	3	5.998.750.000	3,69%	25,0%	45	406.632.488.532	75,00%	36,45%			
0 0 2 0 2 0 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dokumen	60	24.091.883.000	39	5.583.223.220	12	1.000.000.000	0	-	0,00%	0,0%	39	5.583.223.220	65,00%	23,17%			
5	0 0 2 0 2 5 0	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan Daerah	<b>Percentase Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan Daerah</b>	%	100%		300,00%	1.458.894.120	100%	229.700.875	4,22%	9.690.000	4,22%	4,22%	304,22%	1.468.584.120	304,22%			
5	0 0 2 0 2 5 3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Orang	225	339.999.700	180	737.595.750	45	229.700.875	0	9.690.000	4,22%	0,0%	180	747.285.750	80,00%	219,79%		
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	<b>Percentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan</b>	%	100%	5.961.080.900	370,07%	2.748.234.147	100%	764.129.125	10,85%	82.910.000	10,85%	10,85%	380,92%	2.831.144.147	380,92%	47,49%		
5	0 0 2 0 2 1 0	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	<b>Percentase Aset Daerah yang diamankan, diterbitkan dan dimanfaatkan</b>	%	100%	5.961.080.900	370,07%	2.816.852.317	100%	764.129.125	10,85%	82.910.000	10,85%	10,85%	380,92%	2.899.762.317	380,92%	48,64%		
5	0 2 0 2 1 1 2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	60	1.893.060.200	40	1.444.142.326	10	261.834.000	1	4.230.000	10,00%	10,0%	41	1.448.372.326	68,33%	76,51%		
5	0 2 0 2 1 1 3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	45	-	90	939.988.635	45	17.951.550	0	0	0,00%	0,0%	90	939.988.635	200,00%	100,00%		
5	0 0 2 0 2 1 7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	Dokumen	60	957.097.100	48	1.373.309.006	12	218.323.375	3	12.635.000	25,00%	25,0%	51	1.385.944.006	85,00%	144,81%		
5	0 0 2 0 2 0 1	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtempatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtempatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	225	3.110.923.600	180	1.455.093.400	45	266.020.200	0	66.045.000	0,00%	0,0%	180	1.521.138.400	80,00%	48,90%		
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	<b>Percentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan Prestasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah</b>	%	100%	6.962.994.863	355,84%	2.828.707.712	100%	1.149.400.550	0,64%	7.400.000	0,64%	0,64%	356,49%	2.836.107.712	356,49%	40,73%		
5	0 0 2 0 2 4 1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<b>Percentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan</b>	%	100%	6.962.994.863	355,84%	2.740.614.962	100%	1.149.400.550	0,64%	7.400.000	0,64%	0,64%	356,49%	2.748.014.962	356,49%	39,47%		
5	0 0 2 0 2 4 1 3	Penyaluran dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyaluran dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	60	929.305.300	40	597.452.399	10	106.767.625	0	-	0,00%	0,0%	40	597.452.399	66,67%	64,29%		
5	0 0 2 0 2 4 1 6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Dokumen	75	3.139.545.408	60	917.578.550	15	493.177.500	0	7.400.000	0,00%	0,0%	60	924.978.550	80,00%	29,46%		
5	0 0 2 0 2 4 1 7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NIOP nya	Dokumen	2500	1.167.856.960	2000	596.060.315	500	127.032.125	0	-	0,00%	0,0%	2000	596.060.315	80,00%	51,04%		
5	0 0 2 0 2 4 1 8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	60	803.136.720	48	441.428.875	12	87.194.250	3	-	25,00%	25,0%	51	441.428.875	85,00%	54,96%		
5	0 0 2 0 2 4 1 9	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	300	923.150.475	1200	449.004.183	300	335.229.050	50	-	16,67%	16,7%	1250	449.004.183	416,67%	48,64%		
<b>Rata-rata capaian Kinerja (%)</b>						390,26%	328.288.796.432	100%	207.034.431.223	6,03%	12.483.072.839	6,03%	6,03%	396,29%	340.771.869.271	542,23%	53,14%			
<b>Predikat Kerja</b>																				

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah Sampai dengan Tahun 2025**  
**BAPPEDA**

**OPD : Bappeda**  
**Triwulan : I (Satu)**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )		Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100 %		12	13			
1	5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah	Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	9	152.350.000	9	79.878.019						0	-	9,00	79.878.019	100%	52%					
	5.01	Perencanaan			9.951.797.925		5.093.929.115		6.540.328.565		722.679.219		11%		5.099.736.115		51%						
		Tujuan: Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	B		B		CC		-												
		Sasaran: Meningkatnya Kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	BB		BB		BB		-												
	5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Persen	100	25.773.943.569	100	18.756.064.164	100	4.923.641.965	25	716.872.219	25%	15%	62,50	19.472.936.383	63%	75,55%					
	5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	242.096.700	100	134.507.205	100	34.588.300	25		25%	0%	62,50	134.507.205	63%	55,56%					
	5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	21.476.257.911	100	15.656.005.566	100	4.239.123.085	25	689.844.325	25%	16%	62,50	16.345.849.891	63%	76,11%					
	5.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah	persen	100	75.000.000	0	11.459.900	0		0	0	0%	0%	-	11.459.900	0%	15,28%					
	5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100	60.000.000	0	-	100	2.500.000	0	0	0%	0%	-	-	0%	0,00%					
	5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi umum perangkat daerah	persen	100	1.944.255.976	100	1.599.090.516	100	166.258.340	25	4.260.000	25%	3%	62,50	1.603.350.516	63%	82,47%					
	5.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	133.000.000	100	295.610.000	100	141.296.280	0	0	0%	0%	50,00	295.610.000	50%	222,26%					
	5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	persen	100	999.120.982	100	431.425.472	100	151.819.960	25	20.474.894	25%	13%	62,50	451.900.366	63%	45,23%					
	5.01.01.2.09	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	persen	100	844.212.000	100	627.965.505	100	188.056.000	25	2.293.000	25%	1%	62,50	630.258.505	63%	74,66%					
		Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan pada SAKIP Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan kinerja	persen	23,77	-	22,10	-	23,27	-	0				11,05	-	46%						
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	persen	17,33	-	14,55	-	0	-	0					7,28	-	42%						
	5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	persen	100	5.037.297.925	100,15	3.829.213.270	100,00	1.405.815.600	100		-	100	0,00%	100,08	3.829.213.270	100,08%	76,02%				
	5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan perencanaan dan pendanaan	Persentase pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten	persen	100	4.144.466.725	100	3.475.500.642	100	1.115.189.500	75		-	75	0,00%	88	3.475.500.642	88%	83,86%				
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kabupaten yang terlaksana	kali	1	600.000.000	1	334.397.077	99,45%				0	#DIV/0!	1	334.397.077	100%	55,73%					
		Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen prosiding Musrenbang Kabupaten yang terlaksana	dok	5	791.353.800	5	749.813.075	99,45%				0	#DIV/0!	5	749.813.075	100%	94,75%					
		Jumlah dokumen RKPD dan RKPD Perubahan	dok					-	99,45%				0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!					
	5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan daerah	Persentase ketersediaan dokumen analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	persen	100	400.000.000	100	101.175.892	100	98.981.000	100		-	100	0,00%	100	101.175.892	100%	25,29%				
	5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	persen	100	492.831.200	100	252.536.736	100	191.645.100	100		-	100	0,00%	100	252.536.736	100%	51,24%				
		Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen evaluasi RPJMD dan RKPD	dok	2	82.831.200	2	60.668.100					0	0,00%	2	60.668.100	100%	73,24%					
	5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi program RKPD ke dalam APBD	persen	83,91	4.914.500.000	99,42	1.264.715.845	83,52	210.871.000	20	5.807.000	23,95%	2,75%	60	1.270.522.845	71%	25,85%					
		Persentase program Renstra yang selaras dengan program RPJMD	persen	100		100	-	100		100		100		100		100	-	100%	-				
		Persentase tujuan dan sasaran pada PK yang selaras dengan Renstra	persen	100		100		100		100		100		100		100	-	100%	-				

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah Sampai dengan Tahun 2025**  
**BAPPEDA**

**OPD : Bappeda**  
**Triwulan : I (Satu)**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )		Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100 %		12	13	
			Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Percentase program pada Renstra yang selaras dengan Renja	persen	100		100	-	100		100		100		100	-	100%	-			
			Percentase OPD yang menyusun PK dan Rencana	persen	100		100	-	100		100		100		100	-	100%	-			
5.01.03.2.01		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penjabaran Konsistensi program RKPD ke dalam APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persen	83,91	1.558.250.000	98,27	258.860.148	83,52	73.354.000	20	1.737.000	23,95%	2,37%	59,14	260.597.148	70%	16,72%			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Percentase program Renstra yang selaras dengan program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persen	100	450.000.000	3	53.521.250						0,00%	0,00%	3,00	53.521.250	3%	11,89%		
			Percentase program Renstra yang selaras dengan program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persen	100		100		100		100		100		100		100	-	100%	-	
			Percentase tujuan dan sasaran pada PK yang selaras dengan Renstra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persen	100		100		100		100		100		100		100	-	100%	-	
			Percentase program pada Renstra yang selaras dengan Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	persen	100		100		100		100		100		100		100	-	100%	-	
			Percentase OPD yang menyusun PK dan Rencana Aksi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persen	100		100		100		100		100		100		100	-	100%	-	
5.01.03.2.02		Kegiatan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Penjabaran Konsistensi program RKPD ke dalam APBD Bidang Perekonomian dan SDA	persen	83,91	1.537.000.000	100	506.356.692	83,52	64.718.300	20	1.520.000	23,95%	2%	60,00	507.876.692	72%	33,04%			
		Koordinasi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Percentase program Renstra yang selaras dengan program RPJMD	dok	3	479.000.000	3	47.177.300						0,00%	0%	3,00	47.177.300	100%	9,85%		
			Percentase program Renstra yang selaras dengan program RPJMD Bidang perekonomian dan SDA	persen	100		100		100		100		100		100		100		100%	-	
			Percentase tujuan dan sasaran pada PK yang selaras dengan Renstra Bidang Perekonomian dan SDA	persen	100		100		100		100		100		100		100		100%	-	
			Percentase program pada Renstra yang selaras dengan Renja Bidang Perekonomian dan SDA	persen	100		100		100		100		100		100		100		100%	-	
			Percentase OPD yang menyusun PK dan Rencana Aksi Bidang Perekonomian dan SDA	persen	100		100		100		100		100		100		100		100%	-	
5.01.03.2.03		Kegiatan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Penjabaran Konsistensi program RKPD ke dalam APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	persen	83,91	1.819.250.000	100	499.499.005	83,52	72.798.700	20	2.550.000	23,95%	4%	60,00	502.049.005	72%	27,60%			
			Percentase program Renstra yang sejalan dengan program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	persen	100		100		100		100		100		100		100		100%	-	
			Percentase tujuan dan sasaran pada PK yang selaras dengan Renstra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	persen	100		100		100		100		100		100		100		100%	-	
			Percentase program pada Renstra yang selaras dengan Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	persen	100		100		100		100		100		100		100		100%	-	
			Percentase OPD yang menyusun PK dan Rencana Aksi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	persen	100		100		100		100		100		100		100		100%	-	
5.05		Penelitian dan Pengembangan				3.090.084.100		1.958.294.686		162.416.800			-				1.958.294.686				
		Tujuan: Meningkatnya masyarakat yang berdaya saing dan inovatif		Nilai	46(inovatif)		47,69(inovatif)		- 45(inovatif)		0		0%		-		-				
			Nilai Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,272(ti nggi)				- 3.022(tinggi)		0		0%		-		-				
		Sasaran ; Meningkatnya penerapan inovasi dan daya saing	Percentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	persen	16		14,0		- 14,5				0%		14,00		-				
			Tingkat pemenuhan data daya saing daerah	persen	90,72		86,6		- 84,54	162.416.800	0		0%		43,30		-				
5.05.02		Program Penelitian dan pengembangan daerah	Percentase hasil kelitihan yang digunakan sebagai dasar rumusan kebijakan	persen	27,27	3.090.084.100	27,27	1.958.294.686	27,27	162.416.800	0		0%	0%	13,64	1.958.294.686	50%	63,37%			
5.05.02.2.04		Kegiatan Pengembangan inovasi dan teknologi	Percentase ketercapaian inovasi, daya saing daerah dan penelitian	persen	100	3.090.084.100	100	1.958.294.686	100	162.416.800	-		0%	0%	50,00	1.958.294.686	50%	63,37%			

## EVALUASI HASIL PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2025

**OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**TRIWULAN : I (SATU)**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )		Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s / d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s / d TW 1 Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s / d TW 1 Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100 %		12	13	
			Indikator	Satuan Indikator	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	B		B		BB												
		Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	B		BB	-	BB												
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Percentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	%	100	3.405.458.550	287,00	15.107.282.460	100	3.866.541.995	16,02%	619.523.718	0,16%	16%	287,00	15.107.282.460	287,00%	444%			
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	100	10.000.000	392,82	29.591.300	100	4.974.600	0,00	-	0,00%	0%	392,82	29.591.300	392,82%	296%	Sekretariat		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	%	100	3.053.313.360	307,01	12.959.809.907	100	3.465.633.395	16,85%	583.815.114	0,17%	17%	307,01	12.959.809.907	307,01%	424%	Sekretariat		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	%	100	243.667.430	294,49	1.684.073.963	100	249.379.000	5,30%	13.205.000	0,05%	5%	294,49	1.684.073.963	294,49%	691%	Sekretariat		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	%	100	44.477.760	302,06	151.199.640	100	47.788.000	20,27%	9.688.000	0,20%	20%	302,06	151.199.640	302,06%	340%	Sekretariat		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	%	100	54.000.000	29,57	282.607.650	100	98.767.000	12,98%	12.815.604	0,13%	13%	29,57	282.607.650	29,57%	523%	Sekretariat		
		Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas ASN	Percentase ASN yang memenuhi standar kompetensi	%	100	678.000.000				489.505.100	0,99%	4.840.000	0,99%	1%	0,01	0	0,01%				
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Percentase penempatan ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan dan uji kompetensi	%	100	678.000.000	248,22	3.058.587.373	100	489.505.100	0,99%	4.840.000	0,01%	1%	248,22	3.058.587.373	248,22%	451%			
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Percentase layanan ASN	%	90	175.000.000	227,99	1.124.957.226	90	246.092.250	0,98%	2.420.000	0,01%	1%	227,99	1.124.957.226	253,32%	643%	Seluruh Bidang		
		Mutasi dan Promosi ASN	Percentase ASN yang di mutasi dan di promosi	%	60,64	205.000.000	266,3	1.159.094.399	59,85	220.415.300	1,10%	2.420.000	0,02%	1%	266,30	1.159.094.399	439,15%	565%	Bidang PSDM dan Mutasi		
		Pengembangan Kompetensi ASN	Percentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	%	12,79	275.000.000	335,4	710.427.348	12,37	14.191.300	0,00%	-	0,00%	0%	335,40	710.427.348	2622,36%	258%	Bidang PSDM		
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Percentase kualitas kedisiplinan Aparatur	%	85	23.000.000	255,24	64.108.400	85	8.806.250	0,00%	-	0,00%	0%	255,24	64.108.400	300,28%	279%	Bidang Pembinaan		
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Percentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	4,38	91.000.000	192,83	953.338.044	0,83	540.165.500	0,60%	3.220.000	203,13%	1%	194,86	953.338.044	4448,89%	1048%			
		Pengembangan Kompetensi Teknis	Percentase ASN yang lulus uji kompetensi	%	100	45.000.000	0	-	100	-	0,00	0	0,00%	0%	-	-	0,00%	0%			
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Percentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural /fungsional	%	100	46.000.000	194,59	953.338.044	100	540.165.500	0,60%	3.220.000	0,01%	1%	194,59	953.338.044	194,59%	2072%	Bidang PSDM		
		Rata-rata capaian kinerja (%)				100,00	4.174.458.550	285,52	19.119.207.877	100	4.896.212.595	5,87%	627.583.718	67,77%	13%	285,58	19.119.207.877	285,58	458%		
		Predikat kinerja				100,00	4.174.458.550	285,52	19.119.207.877	100	4.896.212.595	5,87%	627.583.718	67,77%	13%	285,58	19.119.207.877	285,58	458%		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

1. Dukungan SDM yang memadai, sarana prasarana, dan anggaran 2. SOP dan sistem pelaksanaan kegiatan yang sudah terbangun dengan baik 3. Koordinasi yang baik dengan stakeholder

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

1. Keterbatasan SDM Teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan 2. Proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE tidak berjalan sesuai rencana sehingga kegiatan mundur dari tatakalak 3. Aplikasi SIPD sering error

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

1. Proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE berjalan sesuai rencana kegiatan 2. Penambahan SDM Teknis 3. Perbaikan pada aplikasi SIPD

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

1. Koordinasi yang baik dengan stakeholder baik itu sesama intern Dinas/OPD maupun ekstern

**Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025**  
**RSUD Kabupaten Rejang Lebong**

**OPD** : RSUD Kabupaten Rejang Lebong  
**Triwulan** : 1 (Satu)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (tahun 2025)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di evaluasi (tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW I Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket								
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 / 7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10 / 5 x 100%	12	13								
K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP									
1		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		515.528.560.886	303.389.851.809	100 Persen	88.512.205.987	13.517.999.498		316.907.851.307	-	-	-							
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		515.528.560.886	71.05	303.389.851.809	100 Persen	88.512.205.987,42	25,0%	13.517.999.498,44	5,65%	15,27%	61%	316.907.851.307,44	61,47%					
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	433.873.688.351	71.05	303.389.851.809	100 Persen	79.612.107.660,42	25,0%	13.447.169.498,44	14,13%	16,89%	61%	316.837.021.307,44	73,03%			
1	02	01	2.0.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	175.831.824.547	123.142.524.218	100 Persen	37.484.486.650,42	6.812.671.770,00	71%	36,35%		129.955.195.988,00	73,91%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			
1	02	01	2.0.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1800	159.031.824.547	1110	106.563.388.482	300 Orang/bulan	33.750.846.650,42	349	6.492.387.770,00	116%	38,47%	1459	113.055.776.252,00	81,06%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1	02	01	2.0.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	16.800.000.000	48	16.579.135.736	12 Dokumen	3.733.640.000,00	3	320.284.000,00	25%	17,16%	51	16.899.419.736,00	70,83%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1	02	01	2.0.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	1.266.113.810		728.288.303	100 Persen	34.498.136,00		-			728.288.303,00	0,00%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
1	02	01	2.0.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	1.266.113.810	39	728.288.303	12 Laporan	34.498.136,00	0	-			39	728.288.303,00	54,17%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1	02	01	2.0.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik	100%	1.000.000.000		-	574.022.000,00	0	-			0	-	0,00%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
1	02	01	2.0.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	1.000.000.000	0	-	1 Unit	574.022.000,00	0	-		0	-	0,00%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
1	02	01	2.0.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100%	6.665.999.994		6.761.172.448	100 Persen	1.124.180.874,00	0	120.013.932,00		21,35%		6.881.186.380,00	103,23%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1	02	01	2.0.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	6.192.999.994	39	6.490.620.958	12 Laporan	1.030.380.000,00	3	120.013.932,00	25%	23,30%	42	6.610.634.890,00	58,33%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1	02	01	2.0.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	473.000.000	36	270.551.490	12 Laporan	93.800.874,00					36	270.551.490,00	60,00%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1	02	01	2.0.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dalam keadaan baik	100%	1.389.750.000		685.997.815	100 Persen	354.920.000,00	0	-			685.997.815,00	49,36%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
1	02	01	2.0.9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	192	457.500.000	69	137.549.215	36 Unit	242.440.000,00	0	-			69	137.549.215,00	35,94%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1	02	01	2.0.0011	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	844.500.000	1	82.215.550	12 Unit	112.480.000,00					1	82.215.550,00	16,67%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1	02	01	2.1.0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Akreditasi rumah sakit	Tipe B	247.720.000,000	Tipe Kelas C	172.071.869.025	Tipe B Kelas	40.040.000.000,00	Tipe Kelas C	6.514.483.796,44	Tipe Kelas C	32,54%	Tipe C	178.586.352.821,44	Tipe C	72,09%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1	02	01	2.1.0	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	247.720.000,000	4	172.071.869.025	1 Unit Kerja	40.040.000.000,00	1	6.514.483.796,44	100%	32,54%	5	178.586.352.821,44	500,00%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2	1	02	02	02	PROGRAM PEMERUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	0,00355 85 %	80.758.539.749	0,01065 80,48%	28.097.608.714	84 Persen	7.854.078.327,00	0,00355 86,2	4.830.000,00	103%	0,12%	86,2	28.102.438.714,00	101,41%	34,80%
1	02	02	2.0.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Akreditasi RSUD	Tingkat 1 atau 100% (Paripurna)	75.347.846.549	Paripurna	24.545.980.914	Paripurna Tingkat	7.078.638.327,00	0	-			Paripurna	24.545.980.914,00	100,00%	32,58%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1	02	02	2.0.0001	Pembangunan Rumah Sakit berserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	13	36.207.381.800	6	9.990.692.192	3 Unit	1.479.631.657,00	0	-			6	9.990.692.192,00	46,15%	27,59%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1	02	02	2.0.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	7	557.955.534	7	489.336.789	1 Unit	3.733.660.000,00	0	-			7	489.336.789,00	100,00%	87,70%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1	02	02	2.0.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dipersiapkan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dipersiapkan	6	10.020.000.000	2	4.159.556.029	1 Unit	579.456.670,00	0	-			2	4.159.556.029,00	33,33%	41,51%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1	02	02	2.0.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	6	18.483.267.000	6	894.603.590	1 Unit	355.550.000,00	0	-			6	894.603.590,00	100,00%	4,84%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1	02	02	2.0.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	72	5.630.000.000	5	6.048.900.066	1 Unit	930.340.000,00	0	-			5	6.048.900.066,00	6,94%	107,44%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1	02	02	2.0.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi terpenuhi	100%	3.990.693.200	100%	3.544.499.400	100 Persen	775.440.000,00	25,0%	4.830.000,00		1,25%	1,25	3.549.329.400,00	125,00%	88,94%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1	02	02	2.0.3	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	72	3.990.693.200	12	697.980.000	12 Dokumen	775.440.000,00	3	4.830.000,00	25%	1,25%	15	702.810.000,00		17,61%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket						
							5	6	7	8	9 = 8 / 7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10 / 5 x 100%	12	13									
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	Ket							
3	1	02	03	2.0		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Percentase tenaga kesehatan rumah sakit memiliki sertifikat kompetensi	31,6	896.332.786	315	431.376.700	28,9 Persen	1.046.020.000,00	3	66.000.000,00	3%	12,62%	318	497.376.700,00	53,45%	55,49%			
	1	02	03	2.0	3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi	595	896.332.786	315	431.376.700	106 Orang	1.046.020.000,00	3	66.000.000,00	2,83%	12,62%	318	497.376.700,00	53,45%	55,49%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
	1	02	03	2.0	3	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	595	896.332.786	315	431.376.700	106 Orang	1.046.020.000,00	3	66.000.000,00	26,50%	12,62%	318	497.376.700,00	53,45%	55,49%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%) :																		
						Predikat Kinerja:																		

Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

\*) Sesuaikan atau dituliskan dengan nama Provinsi/kabupaten/Kota

**Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan**  
**Sekretariat DPRD**

**OPD : Sekretariat DPRD Kab Rejang Lebong**  
**Triwulan : 1 (satu)**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/Kegiatan ( <i>Output</i> )	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW ..... Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW ..... Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 / 7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10 / 5 x 100%							
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP				
		Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah												Sekretariat DPRD		
		Sasaran : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu												Sekretariat DPRD		
			Nilai Evaluasi SAKIP OPD												Sekretariat DPRD		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	607	30.375.379,692	330	25.305.931.100,00	385	32.024.780.110,42	341	6.218.662.695,00	2233%	262%	341	31.524.593.795,00	3171% 2467%	Sekretariat DPRD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	3	123.119.001	3	74.506.000,00	3	74.608.600,00	3	-	100%	0%	3	74.506.000,00	100% 61%	Sekretariat DPRD
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	3	123.119.001	3	74.506.000,00	3	74.608.600,00	3	0	100%	0%	3	74.506.000,00	100% 61%	Sekretariat DPRD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	259	20.459.053.411	26	20.146.261.219,00	74	20.622.497.305,42	74	5.141.796.295,00	2,00	0,50	74	25.288.057.514,00	52% 242%	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69	18.726.398.411	14	18.453.191.219,00	14	19.238.994.805,42	14	4.795.186.295,00	100%	25%	14	23.248.377.514,00	20% 124%	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	190	1.732.655.000	12	1.693.070.000,00	60	1.383.502.500,00	60	346.610.000,00	100%	25%	60	2.039.680.000,00	32% 118%	Sekretariat DPRD
		Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	12	126.999.400	12	102.297.250,00	12	119.739.400,00	12	1.210.000,00	1,00	0,01	12	103.507.250,00	100% 82%	Sekretariat DPRD
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12	126.999.400	12	102.297.250,00	12	119.739.400,00	12	1.210.000,00	100%	1%	12	103.507.250,00	100% 82%	Sekretariat DPRD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	136	1.723.886.600	72	1.533.297.693,00	134	3.567.023.160,00	134	87.820.900,00	700%	68%	134	1.621.118.593,00	790% 761%	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	57.757.000	12	101.898.000,00	12	57.757.000,00	12	27.377.000,00	100%	47%	12	129.275.000,00	40% 224%	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		277.750.000		-	10	493.573.000,00	10	3.220.000,00	100%	1%	10	3.220.000,00	1% 1%	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	43.324.700	12	19.414.720,00	25	43.325.360,00	25	-	100%	0%	25	19.414.720,00	100% 45%	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	309.747.800	12	281.678.100,00	12	283.104.000,00	12	57.223.900,00	100%	20%	12	338.902.000,00	400% 109%	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7	80.730.600	12	72.166.000,00	7	73.017.200,00	7	-	100%	0%	7	72.166.000,00	100% 89%	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6	646.141.400	12	296.529.000,00	3	277.331.000,00	3	-	100%	0%	3	296.529.000,00	50% 46%	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	65	308.435.100	12	761.611.873,00	65	2.338.915.600,00	65	-	100%	0%	65	761.611.873,00	100% 247%	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan Milik Daerah Penunjang Daerah	3	2.739.089.483	3	-	3	3.159.949.000,00	3	10.120.000,00	1,00	0,00	3	10.120.000,00	200% 0%	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Disediakan		-		-		2.648.053.000,00		10.120.000,00		0%		10.120.000,00	0% 0%	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	239.089.583	2	-	2	511.896.000,00	2	-	100%	0%	2	-	100% 0%	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	2.499.999.900	1	-	1	-	1	-	0%	0%	1	-	100% 0%	Sekretariat DPRD
		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah Keadilan baik	8	474.061.199	36	374.435.071,00	36,00	465.252.200,00	36	37.275.000,00	300%	20%	36	411.710.071,00	1500% 206%	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	28.051.628	12	5.000.000,00	12	10.000.000,00	12	-	100%	0%	12	5.000.000,00	600% 18%	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	256.418.976	12	190.928.671,00	12	267.539.200,00	12	-	100%	0%	12	190.928.671,00	300% 74%	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	189.590.595	12	178.506.400,00	12	187.713.000,00	12	37.275.000,00	100%	20%	12	215.781.400,00	600% 114%	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	46	2.139.572.826	31	823.735.709,00	40	1.021.847.145,00	31	26.000.000,00	406%	38%	31	849.735.709,00	246% 298%	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang tersedia	32	925.735.046	18	557.081.621,00	32	452.804.200,00	18	-	56%	0%	18	557.081.621,00	56% 60%	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	1.144.552.200	4	136.364.288,00	2	500.443.745,00	4	-	200%	0%	4	136.364.288,00	100% 12%	Sekretariat DPRD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/Kegiatan ( <i>Output</i> )	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW ..... Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPD s/d TW ..... Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 / 7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10 / 5 x 100%								
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	10	69.285.580	9	130.289.800,00	6	68.599.200,00	9	26.000.000,00	150%	38%	9	156.289.800,00	90%	226%	Sekretariat DPRD
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	<b>Percentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Keadaan Baik</b>	100	599.603.600	120	<b>1.036.420.700,00</b>	33	1.366.256.000,00	33	748.610.000,00	2,00	0,63	33	1.785.030.700,00	110%	543%	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		<b>56.105.276</b>		-				-	0%	0%		-	0%	Sekretariat DPRD	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30	<b>352.315.466</b>	90	887.332.700,00	3	1.203.856.000,00	3	746.190.000,00	100%	62%	3	1.633.522.700,00	10%	464%	Sekretariat DPRD
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30	<b>191.182.858</b>	30	149.088.000,00	30	162.400.000,00	30	2.420.000,00	100%	1%	30	151.508.000,00	100%	79%	Sekretariat DPRD
		Layanan Administrasi DPRD	<b>Percentase Layanan Administrasi DPRD Keadaan Baik</b>	40	1.989.994.172	27	<b>1.214.977.458,00</b>	50	1.627.607.300,00	15	165.830.500,00	127%	21%	15	1.380.807.958,00	73%	275%	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	3	33.662.918	12	33.057.600,00	2	21.601.200,00		-	0%	0%		33.057.600,00	0%	98%	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12	441.482.754	3	493.516.560,00	3	515.792.000,00	3	54.087.500,00	100%	10%	3	547.604.060,00	25%	124%	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	25	1.514.848.500	12	688.403.298,00	45	1.090.214.100,00	12	111.743.000,00	27%	10%	12	800.146.298,00	48%	53%	Sekretariat DPRD
		<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>		71	13.035.492.936	106	<b>20.297.185.808,00</b>	131	17.228.284.691,00	129	3.046.662.736,00		102%	69	22.062.042.295,00	1577%	2783%	Sekretariat DPRD
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	<b>Percentase Layanan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Keadaan Baik</b>	16	1.445.952.517	16	<b>1.519.766.896,00</b>	16	2.104.806.300,00	16	8.760.000,00	200%	1%	16	1.528.526.896,00	200%	211%	Sekretariat DPRD
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah		353.526.254		-				-	0%	0%		-	0%	Sekretariat DPRD	
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	7	725.593.131	7	1.519.766.896,00	7	1.691.535.900,00	7	8.760.000,00	100%	1%	7	1.528.526.896,00	100%	211%	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen kajian perundang-undang	9	310.727.632	9	-	9	413.270.400,00	9	-	100%	0%	9	-	100%	0%	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi		56.105.500		-				-	0%	0%		-	0%	Sekretariat DPRD	
		<b>Pembentahan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Percentase Pembentahan Kebijakan Anggaran Keadaan baik</b>	2	1.937.368.137	1	2.078.128.340,00	2	287.350.700,00	2	5.450.000,00	100%	2%	2	2.083.578.340,00	100%	314%	Sekretariat DPRD
		Pembentahan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembentahan KUA dan PPAS		293.409.996							0%	0%		-	0%	Sekretariat DPRD	
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA dan PPAS		313.027.845							0%	0%		-	0%	Sekretariat DPRD	
		Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2	664.245.695	1	2.078.128.340,00	2	287.350.700,00	2	5.450.000,00	100%	2%	2	2.083.578.340,00	100%	314%	Sekretariat DPRD
		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan Perubahan APBD		342.835.351		-					0%	0%		-	0%	Sekretariat DPRD	
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan Pertanggungjawaban APBD		323.849.250		-					0%	0%		-	0%	Sekretariat DPRD	
		<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Percentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Keadaan baik</b>	4	130.720.540	-	-	-	173.004.100,00	-	-	0%	-	-	0%	0%	Sekretariat DPRD	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan dan Hukum		15.143.211		-		173.004.100,00		-	0%		-	0%	0%	Sekretariat DPRD	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan Bidang Infrastruktur		21.852.082							0%	0%		-	0%	Sekretariat DPRD	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat		13.482.488							0%	0%		-	0%	Sekretariat DPRD	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan Bidang Perekonomian		15.143.211							0%	0%		-	0%	Sekretariat DPRD	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Sumber Daya Alam	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Sumber Daya Alam		13.482.488							0%	0%		-	0%	Sekretariat DPRD	
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	22.442.200							0%	0%		-	0%	Sekretariat DPRD	
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	2	29.174.860							0%	0%		-	0%	Sekretariat DPRD	
		<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Percentase Peningkatan Kapasitas DPRD Keadaan Baik</b>	15	2.130.249.957	60	<b>1.449.691.824,00</b>	28	2.697.435.991,00	60	93.610.000,00	6,67	0,98	-	1.543.301.824,00	0%	338%	Sekretariat DPRD
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	4	620.898.786	3	441.390.000,00	3	1.512.644.000,00	3	5.460.000,00	100%	0%		446.850.000,00	0%	72%	Sekretariat DPRD
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	3	504.949.500	48	518.168.300,00	12	432.848.400,00	48	43.120.000,00	400%	10%		561.288.300,00	0%	111%	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	7	202.742.835	8	194.732.000,00	12	51.083.600,00	8	45.030.000,00	67%	88%		239.762.000,00	0%	118%	Sekretariat DPRD
		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah program kerja DPRD yang tersusun	1	801.658.836	1	295.401.524,00	1	700.859.991,00	1	0	100%	0%		295.401.524,00	0%	37%	Sekretariat DPRD
		<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Percentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Keadaan Baik</b>	3	821.181.194	3	<b>84.299.400,00</b>	3	250.000.000,00	3	2.640.000,00	0%	1%	3	86.939.400,00	100%	12%	Sekretariat DPRD
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja dalam Daerah		56.105.500		-				-	0%	0%		-	0%	Sekretariat DPRD	
		Penyusunan Pokok-Pokok Pidikan DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pidikan DPRD		67.783.411		-				-	0%	0%		-	0%	Sekretariat DPRD	
		Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses	3	697.292.283	3	84.299.400,00	3	250.000.000,00	3	2.640.000,00		1%	3	86.939.400,00	100%	12%	Sekretariat DPRD
		<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Percentase Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD Keadaan Baik</b>	10	189.487.349	1	<b>428.133.153,00</b>	35	30.255.400,00	1	-	0%	0%	1	428.133.153,00	10%	1526%	Sekretariat DPRD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/Kegiatan ( <i>Output</i> )	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW ..... Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RKPD s/d TW ..... Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 / 7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10 / 5 x 100%	12	13		
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode etik dan tata beracara DPRD	10	28.052.750	1	428.133.153,00	1	-	0%	0%	1	428.133.153,00	10% 1526%
		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik		161.434.599		-		30.255.400,00		-			0%
		<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>Percentase Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	3	725.142.043	2	<b>1.281.806.249,00</b>	2	35.099.200,00	2	-	100%	0%	2 67% 0%
		Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen Rekomendasi hasil fasilitasi,verifikasi dan koordinasi persetujuan	3	725.142.043	2	1.281.806.249,00	2	35.099.200,00	2	-	100%	0%	2 67% 0%
		<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Percentase Fasilitasi Tugas DPRD</b>	18	5.655.391.199	23	<b>13.455.359.946,00</b>	45	11.650.333.000,00	45	2.936.202.736,00	100%	0%	45 16.391.562.682,00 1100% 382%
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas	3	5.071.937.200	8	13.106.239.086,00	30	11.334.717.200,00	30	2.936.202.736,00	0%	0%	30 16.042.441.822,00 1000% 316%
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan Fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang di susun		51.663.628		-					0%	0%	0%
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitas pelaksanaan tugas badan musyawarah	15	531.790.371	15	349.120.860,00	15	315.615.800,00	15	-	100%	0%	15 349.120.860,00 100% 66%
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		678	43.410.872.628	436	45.603.116.908	516	49.253.064.801	470	9.265.325.431	2233%	364%	410 53.586.636.090 4748% 5250%
		Predikat Kinerja:		678	43.410.872.628	436	45.603.116.908	516	49.253.064.801	470	9.265.325.431	22	4	410 53.586.636.090 47 53

Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

**Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025**  
**Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong**

**OPD : INSPEKTORAT**

**Triwulan : I (SATU) TAHUN 2025**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/Kegiatan ( <i>Output</i> )	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW I Tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket						
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	12	13			
		Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP daerah	B		B		B						-		Inspektorat		
		Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	BB		BB		BB						-		Inspektorat		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	33.108.085.143	62,3%	20.626.339.592	100%	5.561.065.663,60	17,11%	961.216.470,00	17,11%	17,28%	79,41%	21.587.556.062,00	79,41%	65,20%	Inspektorat
		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi perangkat daerah yang disusun	100	120.430.801	67,6%	81.454.880	100%	18.987.000,00	25,00%	-	25,00%	0,00%	92,64%	81.454.880,00	92,64%	67,64%	Inspektorat
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	41.849.141	9	34.456.400	3	6.987.000,00	1	-	33,33%	0,00%	10	34.456.400,00	55,56%	82,33%	Inspektorat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54	78.581.660	27	46.998.480	9	12.000.000,00	3	-	33,33%	0,00%	30	46.998.480,00	55,56%	59,81%	Inspektorat
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100	29.006.164.540	59,9%	17.387.032.400	#####	4.927.584.864,60	25,00%	897.980.912,00	25,00%	18,22%	84,94%	18.285.013.312,00	84,94%	63,04%	Inspektorat
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84	28.137.044.540	42	16.463.760.400	14	4.628.964.864,60	4	834.000.912,00	28,57%	18,02%	46	17.297.761.312,00	54,76%	61,48%	Inspektorat
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	a.Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN b. Tersedianya honorarium THL	72	869.120.000	36	923.272.000	12	298.620.000,00	3	63.980.000,00	25,00%	21,43%	39	987.252.000,00	54,17%	113,59%	Inspektorat
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Nikai Kapabilitas APIP - Persentase Administrasi kepegawaian perangkat daerah	3 100	942.039.210	Level 3 100	648.113.879	3 100%	196.925.000,00	6,00%	13.523.251,00	6,00%	6,87%	106,00%	661.637.130,00	106,00%	70,23%	Inspektorat
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	223	942.039.210	105	648.113.879	15	196.925.000,00	1	13.523.251,00	6,67%	6,87%	106	661.637.130,00	47,53%	70,23%	Inspektorat
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100	1.484.836.359	128,4%	1.906.143.626	100%	246.242.800,00	10,00%	32.722.514,00	10,00%	13,29%	138,37%	1.938.866.140,00	138,37%	130,58%	Inspektorat
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72	63.477.085	48	53.829.600	12	10.000.000,00	0	-	0,00%	0,00%	48	53.829.600,00	66,67%	84,80%	Inspektorat
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72	246.485.000	48	99.351.965	12	39.530.000,00	0	-	0,00%	0,00%	48	99.351.965,00	66,67%	40,31%	Inspektorat
		Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72	243.771.456	48	153.500.315	12	40.700.000,00	0	-	0,00%	0,00%	48	153.500.315,00	66,67%	62,97%	Inspektorat
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72	173.902.818	48	114.805.100	12	29.034.800,00	0	-	0,00%	0,00%	48	114.805.100,00	66,67%	66,02%	Inspektorat
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	42.920.000	48	30.504.000	12	7.000.000,00	0	-	0,00%	0,00%	48	30.504.000,00	66,67%	71,07%	Inspektorat
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	714.280.000	48	1.454.152.646	12	119.978.000,00	3	32.722.514,00	25,00%	27,27%	51	1.486.875.160,00	70,83%	208,16%	Inspektorat
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik	100	743.750.000	8,0%	59.655.943		-	0,00%	-	0,00%	-	8,02%	59.655.943,00	0,08%	8,02%	Inspektorat
		Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	30.000.000	5,00	29.343.023		-	0	-	0,00%	-	5	29.343.023,00	100,00%	97,81%	Inspektorat
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	690.000.000	0,00	-	-	0	-	0,00%	-	0	-	0,00%	0,00%	Inspektorat	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	23.750.000	3,00	30.312.920		-	0	-	0,00%	-	3	30.312.920,00	100,00%	127,63%	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100	274.808.223	0,75	205.264.686	100%	62.993.819,00	16,67%	10.518.293,00	16,67%	16,70%	91,36%	215.782.979,00	91,36%	78,52%	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	16.721.100	48	15.730.000	12	2.790.000,00	3	2.790.000,00	25,00%	100,00%	51	18.520.000,00	70,83%	110,76%	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	211.465.600	48	153.749.361	12	52.419.819,00	3	7.728.293,00	25,00%	14,74%	51	161.477.654,00	70,83%	76,36%	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	46.621.523	48	35.785.325	12	7.784.000,00	0	-	0,00%	0,00%	48	35.785.325,00	66,67%	76,76%	Inspektorat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100	536.056.010	63,2%	338.674.178	100%	108.332.180,00	20,00%	6.471.500,00	20,00%	5,97%	83,18%	345.145.678,00	83,18%	64,39%	Inspektorat

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/Kegiatan ( <i>Output</i> )	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d TW I Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%				
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	12	13	
		Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	275.865.560	28	215.468.628	10	64.890.080,00	2	6.471.500,00	20,00%	9,97%	30	221.940.128,00	50,00%	80,45%	Inspektorat		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	260.190.450	2	123.205.550	1	43.442.100,00	0	-	0,00%	0,00%	2	123.205.550,00	33,33%	47,35%	Inspektorat		
		<b>Sasaran 2 :</b> <b>A. Meningkatnya kasus dan temuan yang terselesaikan</b>	<b>Percentase Kasus dan Temuan yang terselesaikan</b>	<b>94</b>		<b>78,01</b>		<b>78</b>						<b>0,00%</b>	-	<b>78,01</b>		<b>82,99%</b>		Inspektorat
		<b>B. Meningkatnya kualitas evaluasi pada SAKIP daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Daerah Komponen Evaluasi</b>	<b>9,14</b>		<b>14,26</b>		<b>8,64</b>					<b>0,00%</b>	-	<b>14,26</b>		<b>156,02%</b>		Inspektorat	
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	1. Persentase OPD yang dilakukan pemeriksaan, review, monitoring dan evaluasi 2. Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB	94,3 95,5	7.741.247.648	45,5%	3.519.237.801	94,3% 95,5%	1.368.319.400,00	18,93%	47.095.000,00	0,20%	3,44%	64,39%	3.566.332.801,00	67,42%	46,07%	Inspektorat		
		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Percentase tindak lanjut temuan</b>	<b>70</b>	<b>6.909.056.814</b>	<b>46,6%</b>	<b>3.222.471.981</b>	<b>70%</b>	<b>1.199.989.500,00</b>	<b>22,86%</b>	<b>37.975.000,00</b>	<b>32,66%</b>	<b>3,16%</b>	<b>69,50%</b>	<b>3.260.446.981,00</b>	<b>99,29%</b>	<b>47,19%</b>	Inspektorat		
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12	3.040.100.478	6	1.635.562.080	2	527.870.000,00	0	31.675.000,00	0,00%	6,00%	6	1.667.237.080,00	50,00%	54,84%	Inspektorat		
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	18	447.507.081	9	249.094.297	3	74.716.600,00	0	-	0,00%	0,00%	9	249.094.297,00	50,00%	55,66%	Inspektorat		
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	18	915.679.845	9	500.778.034	2	150.902.900,00	0	6.300.000,00	0,00%	4,17%	9	507.078.034,00	50,00%	55,38%	Inspektorat		
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	43	79.019.410	43	118.000.000	0	-	0	-	0,00%	-	43	118.000.000,00	100,00%	149,33%	Inspektorat		
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	6	1.126.000.000	3	429.644.370	1	188.000.000,00	0	-	0,00%	0,00%	3	429.644.370,00	50,00%	38,16%	Inspektorat		
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	1.300.750.000	3	289.393.200	1	258.500.000,00	0	-	0,00%	0,00%	3	289.393.200,00	60,00%	22,25%	Inspektorat		
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Percentase pengaduan masyarakat dan Pemeriksaan khusus yang diselesaikan	70	832.190.834	35,66%	296.765.820	70%	168.329.900,00	15,00%	9.120.000,00	21,43%	5,42%	50,66%	305.885.820,00	72,37%	36,76%	Inspektorat		
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	200	832.190.834	53	296.765.820	40	168.329.900,00	6	9.120.000,00	15,00%	5,42%	59	305.885.820,00	29,50%	36,76%	Inspektorat		
		<b>Sasaran 3 :</b> <b>Meningkatnya kualitas Pendampingan dan asistensi konsultasi pada OPD</b>	<b>Nilai Maturitas SPIP Kabupaten</b>	<b>3,21</b> <b>Level 3</b>		<b>3,003</b> <b>Level 3</b>			<b>3,00</b> <b>Level 3</b>			-	-		-			Inspektorat		
		<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Percentase konsultasi OPD yang difasilitasi</b>	<b>95</b>	<b>3.031.503.688</b>	<b>85,41%</b>	<b>2.589.098.919</b>	<b>90%</b>	<b>494.884.000,00</b>	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>85,41%</b>	<b>2.589.098.919,00</b>	<b>89,90%</b>	<b>85,41%</b>	Inspektorat		
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Percentase Temuan hasil pemeriksaan khusus dan pengaduan masyarakat yang ditangani	96	2.484.975.368	91,85%	2.282.326.719	90%	414.900.000,00	0	-	0,00%	0,00%	91,85%	2.282.326.719,00	95,67%	91,85%	Inspektorat		
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	18	2.484.975.368	3	2.282.326.719	1	414.900.000,00	0	-	0,00%	0,00%	3	2.282.326.719,00	16,67%	91,85%	Inspektorat		
		<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Indeks Integritas Pemerintah</b>	<b>69</b>	<b>546.528.320</b>	<b>0,00</b>	<b>306.772.200</b>	<b>68</b>	<b>79.984.000,00</b>	<b>0</b>	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>306.772.200,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>56,13%</b>	Inspektorat		
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	22	110.330.450	0,00	179.073.600	0	-	0	-	0,00%	-	0	179.073.600,00	0,00%	162,31%	Inspektorat		
		Pendampingan, Asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	26	35.847.870	0,00	104.700.000	0	-	0	-	0,00%	-	0	104.700.000,00	0,00%	292,07%	Inspektorat		
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	135	400.350.000	81,00	22.998.600	26	79.984.000,00	0	-	0,00%	0,00%	81	22.998.600,00	60,00%	5,74%	Inspektorat		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%) :</b>				26.734.676.312		7.424.269.063,60		1.008.311.470,00		13,58%		27.742.987.782,00								
<b>Predikat Kinerja:</b>																				

### **2.2.3. Hasil Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)***

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 (tujuh belas) *goals* atau tujuan, 169 (seratus enam puluh sembilan) target berserta indikator pada masing-masing targetnya. Adapun pembagiannya ialah pilar pembangunan sosial (5 tujuan, 47 target), pilar pembangunan ekonomi (5 tujuan, 54 target), pilar pembangunan lingkungan (6 tujuan, 56 target), serta pilar pembangunan hukum dan tata kelola (1 tujuan, 12 target). Dalam pembahasan pada sub bab ini, tujuan, target dan indikator SDGs dipetakan dan disinkronkan dengan perencanaan di Kabupaten Rejang Lebong. Oleh karena itu, dalam rangka penyempurnaan RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026, maka dalam dokumen ini perlu melihat gambaran umum capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.33

Hasil Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024



**Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan**

<b>Tujuan SDGs 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun</b>							
<b>Target Global : Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar amerika per hari.</b>							
Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2021	Target SDGs Tahun 2024	Capaian SDGs Tahun 2024	Status
1.1.1	Tingkat Kemiskinan	BPS	Persen	15.83	15.54	14.65	
<b>Target Global : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.</b>							
1.2.1	Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan	BPS	Persen	15.83	15.54	14.65	
<b>Target Global : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.</b>							
1.3.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan Sosial	Dinas Sosial	Persen	3.69	12.44	12.44	
<b>Target Global : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.</b>							
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan	Dinas Kesehatan/ BPJS Kesehatan	Persen	74	83	98.21	



	melalui SJSN bidang kesehatan						
<b>Target Global : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.</b>							
1.3.1.(b)	Besaran pekerja buruh yang menjadi peserta program jamsostek	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi/ BPJS Ketenagakerjaan	Per센	24,14	25,1	81	
<b>Target Global : Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.</b>							
1.5.1	Indek resiko bencana	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	Indek	100.61	100,31	112,35	



## Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2021	Target SDGs Tahun 2024	Capaian SDGs Tahun 2024	Status
<b>Tujuan SDGs 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan</b>							
<b>Target Global : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.</b>							
2.1.1	Ketersediaan pangan utama	Dinas Ketahanan Pangan	Kg	141.385	148.356	391,101	

2.1.2	Persentase ketersediaan pangan pemerintah daerah	Dinas Ketahanan Pangan	Persen	-	14.52	17.14	
<b>Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</b>							
2.2.1	Prevalensi Stunting Balita	Dinas Kesehatan	Persen	0.2	0.14	28.6	
2.2.2	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Dinas Kesehatan	Persen	100	100	96.7	
2.2.2.(a)	Skor pola pangan harapan	Dinas Ketahanan Pangan	Indek	80.25	95.68	86.49	



### Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2021	Target SDGs Tahun 2024	Capaian SDGs Tahun 2024	Status
<b>Tujuan SDGs 3 : Menjamin Kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia</b>							
<b>Tujuan SDGs : 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia</b>							
<b>Target Global:</b> Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.							
3.11	Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 kelahiran hidup	DINKES	per 100.000 kelahiran hidup	40 per 100.000	34 per 100.000	113 per 100.000	

<p><b>Target Global:</b> Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kehidupan Kelahiran) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.</p>							
<b>3.2.1</b>	Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 kelahiran hidup	DINKES	per 1.000 kelahiran hidup	5 per 1.000	4,4 per 1.000	5,6 per 1.000	
<p><b>Target Global:</b> Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.</p>							
<b>3.3.4</b>	Percentase orang dengan risiko interfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	DINKES	%	100	100	84	
<p><b>Target Global:</b> Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan</p>							
<b>3.3.4 (a)</b>	Percentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	DINKES	%	100	100	93	
	Percentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					95	
<p><b>Target Global:</b> Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.</p>							
<b>3.7.2 (a)</b>	Menurunkan Total Fertility Rate (TFR).	DP3APPKB	%	2.22	2.15	2.15	
<p><b>Target Global :</b> Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang</p>							

3.8.2 (a)	Persentase masyarakat yang terlayani jaminan kesehatan	DINKES	%	18	22.53	98.21	
-----------	--	--------	---	----	-------	-------	---



#### Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2021	Target SDGs Tahun 2024	Capaian SDGs Tahun 2024	Status
<b>Tujuan SDGs 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua</b>							
<b>Target Global : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.</b>							
4.1.2	Angka kelulusan SD/MI/ Paket A	Dinas Pendidikan	Persen	93.72	97.4	100.00	
	Angka kelulusan SMP/MTS/ Paket B	Dinas Pendidikan	Persen	98,45	100	100.00	
<b>Target Global : Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.</b>							
4.5.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Dinas Pendidikan	Persen	100	84.15	93.14	
4.5.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B	Dinas Pendidikan	Persen	85.64	98	92.56	
4.5.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B	Dinas Pendidikan	Persen	83.42	81.92	78.20	



## Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2021	Target SDGs Tahun 2024	Capaian SDGs Tahun 2024	Status
<b>Tujuan SDGs 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan</b>							
Target Global : Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.							
5.5.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	DP3APPKB	Persen	20	30	<b>16.67</b>	
	Percentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	DP3APPKB	Persen	4.07	4.34	<b>24.83</b>	
Target Global : Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.							
5.6.1	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	DP3APPKB	Persen	77.07	79.360	<b>77.7</b>	



## Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2021	Target SDGs Tahun 2024	Capaian SDGs Tahun 2024	Status
<b>Tujuan SDGs 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua</b>							
<b>Target Global : Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.</b>							
6.1.1	Percentase RumahTangga yang memiliki akses air minum layak	Dinas PUPR	Per센	84.39	98.6	85,53	
<b>Target Global : Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.</b>							
6.2.1	Percentase RumahTangga Bersanitasi	Dinas PUPR	Per센	41,36	76,54	63,05	
<b>Target Global : Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.</b>							
6.3.1.(a)	Jumlah Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten yang tertangani	Dinas PUPR	Unit	280	280	-	



7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU



## Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2021	Target SDGs Tahun 2024	Capaian SDGs Tahun 2024	Status
<b>Tujuan SDGs 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua</b>							
<b>Target Global : Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.</b>							
7.1.1	Rasio Elektrifikasi	Dinas Perhubungan	Persen	89.94	96.94	-	



## Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2021	Target SDGs Tahun 2024	Capaian SDGs Tahun 2024	Status
<b>Tujuan SDGs 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua</b>							
<b>Target Global : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.</b>							
8.1.1	PDRB per Kapita	BPS	Ribu Rupiah	34,356	38	45.24	<span style="background-color: green; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: block; margin: 0 auto;"></span>
<b>Target Global : Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk fokus pada peningkatan nilai tambah tinggi dan sektor padat karya</b>							

8.2.1	Laju pertumbuhan PDRB per tenagakerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi/ BPJS Ketenagakerjaan	Persen	2.12	4.15	6,99	
<b>Target Global : Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengaruh</b>							
8.4.1. (a)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Dinas Ketahanan Pangan	Indeks	80.25	95.68	86.49	
<b>Target Global : Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya</b>							
8.5.2	Tingkat Pengagguran Terbuka	BPS	Persen	3.85	3.49	2.43	



### Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2021	Target SDGs Tahun 2024	Capaian SDGs Tahun 2024	Status
<b>Tujuan SDGs 9 : Membangun Infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi</b>							
<b>Target Global : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.</b>							



9.1.1.(a)	Percentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Dinas PUPR	Persen	72.11	78.95	63.11	
9.1.2	Jumlah Penumpang	Dinas Perhubungan	Jiwa	35.254	35.888	-	
<b>Target Global : Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.</b>							
9.2.1. (a)	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Dinas Koperasi	Persen	0.06	2.1	4.01	



### Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2021	Target SDGs Tahun 2024	Capaian SDGs Tahun 2024	Status
<b>Tujuan SDGs 10 : Mengurangi Kesenjangan intra-dan antar negara</b>							
<b>Target Global : Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.</b>							
10.1.1	Indek Gini	BPS	Indek	0.28	0.26	0.28	
10.1.1. (a)	Percentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan	BPS	Persen	15.85	-	14.65	
10.1.1. (b)	Jumlah Desa Tertinggal	Dinas PMD	Desa	51	51	7	
10.1.1. (c)	Jumlah Desa Mandiri	Dinas PMD	Desa	1	1	14	
<b>Target Global : Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.</b>							

10.4.1.(b)	Besaran pekerja buruh yang menjadi peserta program jamsostek	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi/ BPJS Ketenagakerjaan	Per센	24.14	25.1	81	
------------	--	---	------	-------	------	----	---



### Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang BerkelaJutan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2021	Target SDGs Tahun 2024	Capaian SDGs Tahun 2024	Status
<b>Tujuan SDGs 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan BerkelaJutan</b>							
<b>Target Global : Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh</b>							
11.1.1.(a)	Rasio rumah layak huni	Dinas PUPR&PKP	Rasio (unit/jiwa)	0.222	0.085	0.075	

11.5.1	Persentase warga yang mendapat pelayanan, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Per센	5	5	164	
<b>Target Global : Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota</b>							

11.6.1.(a)	Persentase pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	Persen	47	52.35	42.87	
11.6.2.(b)	Indek kualitas udara	Dinas Lingkungan Hidup	Persen	90	93	92.76	



### Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2021	Target SDGs Tahun 2024	Capaian SDGs Tahun 2024	Status
<b>Tujuan SDGs 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan</b>							
<b>Target Global : Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali</b>							
12.5.1.(a)	Timbunan sampah yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup	Ton	18.052.40	19,591	31,611.82	
<b>Target Global : Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.</b>							
12.8.1.(b)	Indek kepuasan masyarakat	Bag. Organisasi	Indeks	81.77	83.95	84.15	



## Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2021	Target SDGs Tahun 2024	Capaian SDGs Tahun 2024	Status
<b>Tujuan SDGs 16 : Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan berkelanjutan Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif di Semua Tingkatan</b>							
<b>Target Global : Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun</b>							
16.1.1.(a)	Angka Kriminalitas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persen	10.37	9.07	12.68	
<b>Target Global : Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.</b>							
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak	DP3APPKB	-	-	Menurun	Menurun	
<b>Target Global : Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.</b>							
16.3.1..(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Bag. Hukum	Orang	5	15	15	
<b>Target Global : Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.</b>							
16.6.1. (a)	Opini BPK terhadap pelaporan keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	

16.6.1. (b)	Percentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB	Inspektorat	Predikat	77.3	80 (BB)	BB	
16.6.1. (c)	Indeks Reformasi Birokrasi	Inspektorat	Indeks	CC	CC	B	
16.6.1. (a)	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	DP3APPKB	Per센	20	20	16.67	
16.6.1. (a)	Percentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	DP3APPKB	Per센	4.07	4.23	24.83	

<b>Target Global : Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.</b>							
<b>16.9.1</b>	Percentase anak yang memiliki akte kelahiran	Dinas Catatan Sipil	Per센	93.04	96.04	94.97	
<b>16.9.1.(b)</b>	Percentase penduduk yang telah memiliki akte kelahiran usia 0-18	Dinas Catatan Sipil	Per센	93.04	96.04	94.97	

Keterangan :



: Tercapai



: Akan tercapai/ membaik



: Perlu perhatian khusus

## 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Secara umum permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang dengan layanan dasar dan tugas fungsi perangkat daerah dapat diungkapkan dan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

### 2.3.1 Permasalahan Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Capaian Perangkat Daerah

Berdasarkan Tabel Evaluasi Capaian Perangkat Daerah pada Tabel 2.31 maka dapat diambil kesimpulan permasalahan yang ditemukan setiap urusan masing-masing perangkat daerah pada tabel 2.33 berikut ini:

**Tabel 2. 33**  
**Rekapitulasi Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran per Bidang Urusan**  
**RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024**

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>							
	<b>Pendidikan</b>						
1	Dinas Pendidikan	<b>89,21</b>	<b>252.774.041.334</b>	1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 89,21%  2. Predikat Kinerja “Berhasil”	1. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Melengkapi dan membangun sarana/prasarana pendidikan guna mendekatkan akses pendidikan bagi masyarakat.  2. Menyediakan akses jalan/jembatan dan sarana transportasi ke lokasi sekolah	1. Sebagian pegawai baik tenaga administratif dan edukatif belum memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang terukur sehingga kompetensinya masih sangat rendah.  2. pemerataan guru disetiap jenjang sekolah belum dilaksanakan secara profesional	Optimalisasi perencanaan yang baik terhadap peningkatan kualitas pendidikan dengan program dan kegiatan yang telah ditentukan

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
	<b>Kesehatan</b>						
2	Dinas Kesehatan	<b>99,20</b>	<b>76,687.690.433</b>	1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 99,20% 2. Predikat kinerja “Berhasil”	1. Pelayanan kesehatan yang meningkat dan meningkatnya manajemen dan informasi kesehatan	1. Belum optimalnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan kesehatan. 2. Kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit baik melalui imunisasi dan pola hidup bersih masih kurang. 3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang	1. Sosialisasi secara intensif baik langsung maupun kerjasama dengan pemerintah desa dan kelompok masyarakat. 2. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan terhadap masyarakat. 3. Penguatan tata kelola layanan,

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
						pentingnya deteksi dini penyakit tidak menular karena faktor pendidikan,sosial ekonomi dan pekerjaan .	peningkatan kemudahan akses layanan dan penigkatan kualitas layanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat
3	Rumah Sakit Umum Daerah Curup	91,83	68.764.680.408,00	1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 91,83% 2. Predikat kinerja “ Berhasil”	1. Dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan fasilitas layanan kesehatan. 2. Dukungan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan sarana,prasarana , alat kesehatan serta SDM Kesehatan berdasarkan perkembangan peraturan perundang- undangan	1. Kurangnya dukungan serta koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Rumah Sakit. 2. Keterbatasan anggaran	1. Dukungan berupa koordinasi bersama anatara pemerintah daerah dan penanggungjawab Bidang Kesehatan dengan pihak Rumah sakit dalam rangka kepengurusan pendanana hingga pusat. 2. Perlu dukunagn anggaran dari Dana Alokasi Umum untuk membantu memenuhi kebutuhan SAPRA dan SDM Kesehatan yang terus berkembang

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>						
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	95,68	100.816.847.019,00	1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 95,68%  2. Predikat kinerja “ Berhasil”	1. Akses ke Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sangat terbuka.  2. Koordinasi yang baik dengan badan/dinas terkait hal penuhan data maupun informasi lainnya.  3. Tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan	1. Kurang optimalnya penanganan jalan dan jembatan karena tidak sebandingnya cakupan obyek yang ditangani dengan ketersediaan dana  2. Masih seringnya terjadi pelanggaran terhadap beban muatan sehingga mempercepat kerusakan jalan dan jembatan.  3. Belum optimalnya koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta	Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong harus menyediaakan porsi anggaran yang cukup untuk meningkatkan infrastruktur di wilayah Kabupaten Rejang Lebong

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
						<p>penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan dan perijinan pemanfaatan ruang jalan.</p> <p>4. Masih lemahnya peran kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air.</p> <p>5. Belum terintegrasinya sistem drainase yang menyebabkan pengendalian banjir dan genangan belum optimal</p>	
	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>						

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
5	Satuan Polisi Pamong Praja	97,30	5.031. 957.923	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 97,30 %</li> <li>2. Predikat kinerja “ Berhasil”</li> </ol>	Tim Kerja yang solid dan koordinasi yang berkelanjutan dapat menjaga kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan yang selalu berubah sebelum peraturan sebelumnya sempat dijalankan menyebabkan capaian kinerja menjadi rendah</li> <li>- Dukungan dan perhatian dari pimpinan tertinggi yang kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan monitoring berkala dan koordinasi yang lebih intensif terhadap Perangkat Daerah.</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan Pimpinan tinggi agar didapat komitmen yang berkelanjutan</li> </ul>
6	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah	115	5.110.320.099,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 115%</li> <li>2. Predikat kinerja “ Sangat Berhasil”</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengefektifkan kemampuan memprediksi potensi kebencanaan dengan menggunakan fungsi koordinasi dan komando.</li> <li>2. Sarana pencegahan Penanggulangan Bencana yang yang dapat dimanfaatkan oleh partisipasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum Optimalnya dukungan sumber daya yang memadai</li> <li>2. Belum optimalnya jumlah anggota, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan dukungan sumber daya yang memadai, jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana</li> </ol>

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
					<p>masyarakat dalam pemahaman Budaya Sadar Bencana.</p> <p>3. Pemuktahiran data dalam menyusun Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dengan memanfaatkan sarana dan teknologi yang ada</p>		
7	Dinas Pemadam Kebakaran	98,73	4.694.079.866,00	<p>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 98,73</p> <p>2. Predikat kinerja " Berhasil"</p>	<p>1. Tim Kerja yang solid dan koordinasi yang berkelanjutan dapat menjaga kinerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan yang selalu berubah sebelum peraturan sebelumnya sempat dijalankan menyebabkan capaian kinerja menjadi rendah</li> <li>- Dukungan dan perhatian dari pimpinan tertinggi yang kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan monitoring berkala dan koordinasi yang lebih intensif terhadap Perangkat Daerah.</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan Pimpinan tinggi agar didapat komitmen yang berkelanjutan</li> </ul>

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	99,5	19.767.374.173,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rata-rata capaian kinerja sebesar 99,5</li> <li>Predikat kinerja “Berhasil”</li> </ol>	<p>Terjalannya Koordinasi dan Konsolidasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Rejang Lebong dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, alim ulama dan ormas/LSM dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan tim kerja dan stakeholder</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan dalam menyikapi munculnya permasalahan situasi kondisi daerah.</li> <li>Meningkatkan koordinasi aparat keamanan</li> </ol>
	<b>Sosial</b>						
9	Dinas Sosial	114,2	2.760.120.085	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rata-rata capaian kinerja sebesar 114,2%</li> <li>Predikat kinerja “ Sangat Berhasil”</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan-kegiatan yang memiliki output khusus untuk memberikan unsur SPM bdang sosial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih minimnya anggaran untuk memenuhi standar ideal dari pelaksanaan nilai SPM yang sesungguhnya.</li> </ol>	<p>Penyediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pencapaian kinerja yang baik</p>
	<b>Tenaga Kerja</b>						
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	96,97	2. 891.414.523	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rata-rata capaian kinerja sebesar 96,97 %</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>SDM yang memadai, sarana prasarana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan SDM yang dapat mengoperasikan Komputer</li> </ol>	<p>Koordinasi yang baik dengan Stakeholders baik itu sesama intern OPD maupun eksten</p>

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
				2. Predikat kinerja “ Berhasil”	2.Koordinasi yang baik anatar Bidang	Aplikasi yang digunakan sering error	
	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>						
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	101	8.264.140.206	1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 101%  2. Predikat kinerja “ Sangat Berhasil”	1. Kemampuan dan kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi  2. Adanya dukungan dan bimbingan dari atasan dan tim kerja  3. Ketersediaan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas  4. Adanya target dan sasaran yang jelas dan terukur yang memotivasi	1. Keterbatasan waktu dan sumber daya untuk menyelesaikan tugas dan fungsi  2. Adanya kendala teknis dan non- teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas  3. Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan tim kerja dan stakeholder  4. Adanya tekanan dan stres yang berlebihan yang dapat mengganggu konsentrasi dan motivasi	1. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi dengan mengikuti pelatihan dan pengembangan kemampuan yang lebih intensif  2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan tim kerja dan stakeholder untuk mengurangi kendala dan meningkatkan efisiensi  3. Mengidentifikasi dan mengatasi kendala teknis dan non-teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas  4. Meningkatkan motivasi dan konsentrasi dengan

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
					<p>untuk berprestasi</p> <p>5. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang dihadapi</p> <p>6. Kemampuan untuk memahami dan melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik</p> <p>7. Adanya komitmen dan motivasi yang tinggi untuk mencapai target dan sasaran</p> <p>8. Kemampuan untuk beradaptasi dengan</p>	<p>5. Kurangnya kemampuan untuk mengelola stres dan tekanan yang berlebihan</p> <p>6. Adanya keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas</p> <p>7. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kemampuan yang memadai untuk meningkatkan kinerja</p>	<p>mengatur waktu dan sumber daya yang lebih efektif</p> <p>5. Meningkatkan target dan sasaran yang lebih tinggi dan lebih spesifik untuk meningkatkan kinerja dan prestasi.</p> <p>6. Meningkatkan kemampuan untuk mengelola stres dan tekanan dengan mengikuti pelatihan dan pengembangan kemampuan yang lebih intensif</p> <p>7. Mengidentifikasi dan mengatasi kendala teknis dan non-teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas</p> <p>8. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan tim kerja dan stakeholder</p>

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
					<p>perubahan dan tantangan yang dihadapi</p> <p>9. Adanya dukungan dan bimbingan dari atasan dan tim kerja yang memadai</p> <p>10. Kemampuan untuk mengelola waktu dan sumber daya dengan efektif</p>		<p>untuk mengurangi kendala dan meningkatkan efisiensi</p> <p>9. Meningkatkan kemampuan untuk mengelola waktu dan sumber daya dengan lebih efektif</p> <p>10. Meningkatkan target dan sasaran yang lebih tinggi dan lebih spesifik untuk meningkatkan kinerja dan prestasi, serta mempertahankan predikat kinerja "Memuaskan"</p>
12	<b>Pangan</b> Dinas Ketahanan Pangan	<b>109</b>	<b>4.056.322.064</b>	1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 109% 2. Predikat kinerja " Sangat Berhasil "	Se semua kegiatan bidang telah dilaksanakan secara tepat waktu	Masih adanya kegiatan yang outputnya belum maksimal dikarenakan belum diakomodirnya anggaran	Mendorong agar semua sub bidang dapat onsisten dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
	<b>Lingkungan Hidup</b>						
13	Dinas Lingkungan Hidup	<b>111,05</b>	<b>7.797.489.114</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 106,2%</li> <li>2. Predikat kinerja “ Sangat Berhasil”</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan komunikasi yang baik antar Bidang</li> <li>2. Peningkatan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau</li> </ol>	<p>Belum optimalnya kinerja pengawasan dan pemuktahiran data sebagai informasi serta kinerja pelayanan kepada masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan kinerja pengawasan dan pemuktahiran data sebagai informasi serta meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat</li> <li>2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan menambah hamparan RTH di wilayah Kabupaten Rejang Lebong</li> </ol>
	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>						
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<b>92,5</b>	<b>3.723.752.437</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 92,5%</li> <li>2. Predikat kinerja “ Berhasil”</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kerjasama yang baik</li> <li>2. Adanya komitmen bersama dalam pencapaian kinerja</li> </ol>	<p>1. Sistem monitoring dan evaluasi program dan kegiatan belum optimal</p>	<p>Optimalisasi monitoring dan evaluasi program dan kegiatan</p>
	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>						

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	<b>82,03</b>	<b>5.830.168.394</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 82,03%</li> <li>2. Predikat kinerja “Berhasil”</li> </ol>	Beberapa program kerja telah terlaksana sesuai target, namun ada beberapa program kerja belum terlaksana dan tidak sesuai target	Adanya program kerja belum terlaksana dan tidak sesuai target	Perubahan capaian target pada indikator kinerja utama(IKU)
	<b>Perhubungan</b>						
16	Dinas Perhubungan	<b>99,67</b>	<b>12.281.124.845</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 99,67%</li> <li>2. Predikat kinerja “Berhasil”</li> </ol>	Tim Kerja yang solid dan koordinasi yang berkelanjutan dapat menjaga kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan yang selalu berubah sebelum peraturan sebelumnya sempat dijalankan menyebabkan capaian kinerja menjadi rendah</li> <li>- Dukungan dan perhatian dari pimpinan tertinggi yang kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan monitoring berkala dan koordinasi yang lebih intensif terhadap Perangkat Daerah.</li> </ul>
	<b>Komunikasi dan Informatika dan Persandian</b>						

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	94,08	3.825.708.976	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rata-rata capaian kinerja sebesar 94,08%</li> <li>Predikat kinerja <b>“Berhasil”</b></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Rejang Lebong telah memiliki kebijakan internal Tata Kelola SPBE</li> <li>Layanan SPBE sudah dilaksanakan dan sebagian besar telah terintegrasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Manajemen SPBE masih terbatas pada Perencanaan belum berjalan sebagaimana mestinya.</li> <li>Jaringan intra pemerintah masih sangat terbatas</li> <li>Belum adanya audit TIK</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perlu perhatian khusus Kepala Daerah agar arsitektur dan peta rencana SPBE dapat dilaksanakan sesuai dokumen yang telah ditetapkan.</li> <li>Pengalokasian anggaran untuk pengembangan SPBE dan peningkatan kualitas SDM SPBE</li> </ol>
<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>							
18	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	119,03	5.621.686.800	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rata-rata capaian kinerja sebesar 119,03%</li> <li>Predikat kinerja <b>“Sangat Berhasil”</b></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan rata-rata omset perdagangan.</li> </ol>	Kurang, memahami dan mengupdate data-data yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagai jembatan dalam meningkatkan produk lokal</li> <li>Tidak membatasi anggaran dari rencana kerja program bidang perindustrian terhadap promosi produk lokal ke luar daerah</li> <li>Untuk lebih aktif mengupdate data-data yang mendukung kinerja</li> </ol>
	<b>Penanaman Modal</b>						

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	95,86	3.727.971.447	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 95,86%</li> <li>2. Predikat kinerja “ Berhasil”</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa anggaran yang digunakan sudah efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.</li> <li>2. Pelaksanaan kegiatan telah memahami tujuan capaian kegiatannya masing-masing.</li> <li>3. Adanya evaluasi /rakor capaian serapan anggaran oleh Pemda setiap triwulan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak Semua Bidang . memiliki anggaran kegiatan Disisi perencanaan 2 sering terkendala . mengenai Standar Harga Satuan yang tidak lengkap di SIPD, sehingga harus mengajukan perubahan anggaran</li> <li>2. 1. Usulan standar kebutuhan barang sebelum penetapan sebelum penetapan Perbub di tetapkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong pemerintah daerah melakukan percepatan pengukuhan nomenklatur baru sesuai PERBUB terbaru.</li> <li>2. Usulan standar kebutuhan barang sebelum penetapan sebelum penetapan Perbub di tetapkan</li> </ol>
	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>						

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	93,6	702.707.984,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 93,6%</li> <li>2. Predikat kinerja "Berhasil"</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dokumentasi perencanaan dengan indikator kinerja sebesar 93,6%.</li> <li>2. Adanya monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan kegiatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya usulan pergeseran anggaran dan refocusing sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja</li> <li>2. Tingginya komitmen bidang-bidang untuk meningkatkan kinerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap Bidang perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (program, indikator kinerja utama)</li> <li>2. Meningkatkan koordinasi dengan bidang-bidang terkait dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan sehingga target yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal</li> </ol>
<b>Perpustakaan dan Kearsipan</b>							
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	88,4	3.640.032.647	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 88,4%</li> <li>2. Predikat kinerja "Berhasil"</li> </ol>	<b>Bidang Perpustakaan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilaksanakannya promosi perpustakaan melalui media sosial serta menjalin kerjasama</li> </ol>	<b>Bidang Perpustakaan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruangan Pada Gedung perpustakaan yang belum memadai sehingga menurunkan minat baca masyarakat</li> </ol>	<b>Bidang Perpustakaan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan Pencapaian Kinerja di tahun berikutnya melaksanakan kerja sama yang lebih baik lagi dengan pihak</li> </ol>

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
					<p>dengan pihak masyarakat dan sekola, perguruan tinggi yang ada di kabupaten rejang lebong</p> <p>2. Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah juga menjalin kerjasama dengan PERPUSNAS dan Dinas Perustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu dalam hal untuk Bantuan koleksi serta peralatan perlengkapan perpustakaan</p> <p>3. Nilai Akreditasi perpustakaan sangat penting untuk Kemajuan Perpustakaan</p> <p><b>Bidang Kearsipan</b></p>	<p>2. Masih kurangnya koleksi yang dibutuhkan pelajar, mahasiswa sehingga mereka masih sulit untuk mencari buku-buku yang diinginkan</p> <p><b>Bidang Kearsipan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya SDM yang ada di OPD yang mau menjadi arsiparis</li> <li>2. Kurangnya sarana prasarana baik di gedung arsip Daerah Maupun OPD</li> <li>3. Kurangnya kesadaran OPD untuk mengelola arsip secara baik dan benar</li> </ol>	<p>PERPUSNAS, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi untuk penambahan koleksi dan perlengkapan yang ada pada dinas Perpustakaan dan arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong serta melakukan promosi, pembinaan perpustakaan dari tingkat Desa sampai perguruan tinggi</p> <p><b>Bidang Kearsipan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pegelolaan arsip di tahun berikutnya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah masih terus melakukan pembinaan terhadap OPD yang belum dapat pembinaan serta tetap membuka klinik kearsipan setiap jam kerja dan melakukan pengusulan penambahan arsiparis untuk disetiap OPD</li> </ol>

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerja sama Dengan OPD terkait berjalan dengan baik sehingga dalam pelaksanaan Kearsipan berjalan dengan Baik</li> <li>2. Adanya SOP atau petunjuk dari ANRI dalam Pengelolaan arsip Yang benar</li> <li>3. Kearsipan berjalan dengan Baik</li> <li>4. Adanya Peran Aktif SDM yang ada pada OPD untuk mengelola arsip secara baik dan benar</li> </ol> <p>Adanya Peran Aktif SDM yang ada pada OPD untuk mengelola arsip secara baik dan benar</p>		sehingga penglolaan arsip di kabupaten rejang lebong dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
					5. Adanya SOP atau petunjuk dari ANRI dalam Pengelolaan arsip Yang benar		
<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>							
<b>Kelautan dan Perikanan</b>							
22	Dinas Pertanian dan Perikanan	88,78	11.762.996.899	1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 88,78% 2. Predikat kinerja " Berhasil"	1. Berperan secara langsung menyediakan kebutuhan pangan di masyarakat. 2. Berperan dalam pembentukan pendapatan Produk Domestik Bruto( PDB) 3. Tidak hanya berperan terhadap ketahanan pangan tapi juga memberi andil yang cukup besar terhadap peningkatan taraf hidup	1. Masih banyak kelompok tani yang belum mendapatkan bantuan program pemerintah, akibat alokasi dana yang belum memadai	1. Penyediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pencapaian kinerja yang baik

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
					masyarakat dan pengentasan kemiskinan, sumber pendapatan serta perekonomian regional		
	<b>Pariwisata</b>						
23	Dinas Pariwisata	<b>172,95</b>	<b>5.559.790.250</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 172,95%</li> <li>2. Predikat kinerja " Sangat Berhasil"</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya promosi melalui media sosial</li> <li>2. Melakukan pemeliharaan wahana permainan serta sarana yang ada di objek wisata</li> <li>3. Melakukan pembinaan terhadap pengelola objek wisata</li> <li>4. Mengadakan event atau kegiatan wisata pada objek wisata tentunya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi PAD masih manual sehingga memungkinkan terjadinya kekeliruan pencatatan PAD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi event atau kegiatan wisata pada objek wisata.</li> <li>2. Peningkatan pemeliharaan wahana permainan serta sarana yang ada di objek wisata</li> </ol>

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
					menarik banyak pengunjung		
	<b>Pertanian</b>						

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
24	Dinas Pertanian dan Perikanan	88,78	11.762.996.899	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 88,78%</li> <li>2. Predikat kinerja “ Berhasil”</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berperan secara langsung menyediakan kebutuhan pangan di masyarakat.</li> <li>2. Berperan dalam pembentukan pendapatan Produk Domestik Bruto( PDB)</li> <li>3. Tidak hanya berperan terhadap ketahanan pangan tapi juga memberi andil yang cukup besar terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat dan pengentasan kemiskinan, sumber pendapatan serta perekonomian regional</li> </ol>	<p>Masih banyak kelompok tani yang belum mendapatkan bantuan program pemerintah, akibat alokasi dana yang belum memadai</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pencapaian kinerja yang baik</li> </ol>

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>							
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100	-	1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 100% 2. Predikat kinerja <b>“Berhasil”</b>	Khusus Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk sumber data sudah ada di provinsi, karena kewenangan energi dan sumber daya mineral sudah diambil alih propinsi	Kegiatan tidak didukung oleh anggaran kegiatan Kewenangan Energi dan Sumber Daya Mineral sudah diambil alih propinsi	Mendorong Pemerintah Daerah melakukan percepatan pengukuhan nomenklatur baru sesuai Perbub terbaru
<b>Perdagangan dan Perindustrian</b>							
26	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	119,03	5.621.686.800	1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 119,03% 2. Predikat kinerja <b>“ Sangat Berhasil”</b>	1. Peningkatan rata-rata omset perdagangan.	1. Kurang, memahami dan mengupdate data-data yang diperlukan	1. Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagai jembatan dalam meningkatkan produk lokal 2. Tidak membatasi anggaran dari rencana kerja program bidang perindustrian terhadap promosi produk lokal ke luar daerah 3. Untuk lebih aktif mengupdate data-data yang mendukung kinerja
	Transmigrasi						

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	98,85	486.999.465	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 98,85%</li> <li>2. Predikat kinerja “ Berhasil”</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM yang memadai. sarana prasarana.</li> <li>2. Koordinasi yang baik antara Bidang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan SDM yang ada yang dapat mengoperasikan Komputer</li> <li>2. Aplikasi yang digunakan sering error</li> </ol>	Koordinasi yang baik dengan stakeholders baik itu sesama intern OPD maupun ekstern
<b>Unsur Pendukung</b>							
<b>Sekretariat Daerah</b>							
28	Bagian Pemerintahan	83,33	389.159.538	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 83,33%</li> <li>2. Predikat kinerja “ Berhasil”</li> </ol>	Tim Kerja yang solid dan koordinasi yang berkelanjutan dapat menjaga kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan yang selalu berubah sebelum peraturan sebelumnya sempat dijalankan menyebabkan capaian kinerja menjadi rendah</li> <li>- Dukungan dan perhatian dari pimpinan tertinggi yang kurang</li> <li>- Komitmen dan perhatian dari Kepala OPD yang kurang menyebabkan sulitnya pencapaian target kinerja kabupaten yang menjadi kinerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan monitoring berkala dan koordinasi yang lebih intensif.</li> <li>- Penyediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pencapaian kinerja yang baik</li> </ul>

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
						Bagian Kesejahteraan Rakyat	
29	Bagian Kesejahteraan Rakyat	93	9.201.275.960	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 93%</li> <li>2. Predikat kinerja “ Berhasil”</li> </ol>	<p>Tim Kerja yang solid dan koordinasi yang berkelanjutan dapat menjaga kinerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan yang selalu berubah sebelum peraturan sebelumnya sempat dijalankan menyebabkan capaian kinerja menjadi rendah</li> <li>- Dukungan dan perhatian dari pimpinan tertinggi yang kurang</li> <li>- Komitmen dan perhatian dari Kepala OPD yang kurang menyebabkan sulitnya pencapaian target kinerja kabupaten yang menjadi kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan monitoring berkala dan koordinasi yang lebih intensif terhadap Perangkat Daerah.</li> <li>- Penyediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pencapaian kinerja yang baik</li> </ul>

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
30	Bagian Hukum	86	672.859.288	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 86%</li> <li>2. Predikat kinerja “ Berhasil”</li> </ol>	Tim Kerja yang solid dan koordinasi yang berkelanjutan dapat menjaga kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan yang selalu berubah sebelum peraturan sebelumnya sempat dijalankan menyebabkan capaian kinerja menjadi rendah</li> <li>- Dukungan dan perhatian dari pimpinan tertinggi yang kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan monitoring berkala dan koordinasi yang lebih intensif .</li> <li>- Penyediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pencapaian kinerja yang baik</li> </ul>
31	Bagian Administrasi Pembangunan	100,0	411.399.800,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 100%</li> <li>2. Predikat kinerja “ Berhasil”</li> </ol>	Tim Kerja yang solid dan koordinasi yang berkelanjutan dapat menjaga kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan yang selalu berubah sebelum peraturan sebelumnya sempat dijalankan menyebabkan capaian kinerja menjadi rendah</li> <li>- Dukungan dan perhatian dari pimpinan tertinggi yang kurang</li> <li>- Komitmen dan perhatian dari Kepala OPD yang kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan monitoring berkala dan koordinasi yang lebih intensif terhadap Perangkat Daerah.</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan Pimpinan tinggi agar didapat komitmen yang berkelanjutan</li> </ul>

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
						menyebabkan sulitnya pencapaian target kinerja kabupaten yang menjadi kinerja Bagian Administrasi Pembangunan	
32	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	96	397.391.955	1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 96%  2. Predikat kinerja “ Memuaskan”	Tim Kerja yang solid dan koordinasi yang berkelanjutan dapat menjaga kinerja	- Peraturan yang selalu berubah sebelum peraturan sebelumnya sempat dijalankan menyebabkan capaian kinerja menjadi rendah  - Dukungan dan perhatian dari pimpinan tertinggi yang kurang	- Melakukan monitoring berkala dan koordinasi yang lebih intensif terhadap Perangkat Daerah.
33	Bagian Organisasi	100	343.668.310	1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 100%  2. Predikat kinerja “ Berhasil”	Tim Kerja yang solid dan koordinasi yang berkelanjutan dapat menjaga kinerja	- Peraturan yang selalu berubah sebelum peraturan sebelumnya sempat dijalankan menyebabkan capaian kinerja menjadi rendah	- Melakukan monitoring berkala dan koordinasi yang lebih intensif terhadap Perangkat Daerah.  - Melakukan koordinasi dengan Pimpinan tinggi agar didapat komitmen yang berkelanjutan

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan dan perhatian dari pimpinan tertinggi yang kurang</li> <li>- Komitmen dan perhatian dari Kepala OPD yang kurang menyebabkan sulitnya pencapaian target kinerja kabupaten yang menjadi kinerja Bagian Organisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pencapaian kinerja yang baik</li> </ul>
34	Bagian Umum	93,64	12.098.661.500	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 93,64%</li> <li>2. Predikat kinerja " Berhasil"</li> </ol>	Tim Kerja yang solid dan koordinasi yang berkelanjutan dapat menjaga kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan yang selalu berubah sebelum peraturan sebelumnya sempat dijalankan menyebabkan capaian kinerja menjadi rendah</li> <li>- Dukungan dan perhatian dari pimpinan tertinggi yang kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan monitoring berkala dan koordinasi yang lebih intensif</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan Pimpinan tinggi agar didapat komitmen yang berkelanjutan</li> <li>- Penyediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pencapaian kinerja</li> </ul>

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
35	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	98	516.663.955	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 100%</li> <li>2. Predikat kinerja “ Berhasil”</li> </ol>	Tim Kerja yang solid dan koordinasi yang berkelanjutan dapat menjaga kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan yang selalu berubah sebelum peraturan sebelumnya sempat dijalankan menyebabkan capaian kinerja menjadi rendah</li> <li>- Dukungan dan perhatian dari pimpinan tertinggi yang kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan monitoring berkala dan koordinasi yang lebih intensif</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan Pimpinan tinggi agar didapat komitmen yang berkelanjutan</li> <li>- Penyediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pencapaian kinerja</li> </ul>
36	Bagian Perencanaan dan Keuangan	95,01	17.371.542.223	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 95,01%</li> <li>2. Predikat kinerja “ Berhasil”</li> </ol>	Tim Kerja yang solid dan koordinasi yang berkelanjutan dapat menjaga kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan yang selalu berubah sebelum peraturan sebelumnya sempat dijalankan menyebabkan capaian kinerja menjadi rendah</li> <li>- Dukungan dan perhatian dari pimpinan tertinggi yang kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan monitoring berkala dan koordinasi yang lebih intensif</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan Pimpinan tinggi agar didapat komitmen yang berkelanjutan</li> </ul>

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
37	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	98,0	180.195.740	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 98%</li> <li>2. Predikat kinerja “ Berhasil”</li> </ol>	Tim Kerja yang solid dan koordinasi yang berkelanjutan dapat menjaga kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan yang selalu berubah sebelum peraturan sebelumnya sempat dijalankan menyebabkan capaian kinerja menjadi rendah</li> <li>- Dukungan dan perhatian dari pimpinan tertinggi yang kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan monitoring berkala dan koordinasi yang lebih intensif</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan Pimpinan tinggi agar didapat komitmen yang berkelanjutan</li> </ul>
	<b>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>						
38	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	85,0	1.716.619.358,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 85%</li> <li>2. Predikat kinerja “ Berhasil”</li> </ol>	Tim Kerja yang solid dan koordinasi yang berkelanjutan dapat menjaga kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan dan perhatian dari pimpinan tertinggi yang kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan monitoring berkala dan koordinasi yang lebih intensif</li> </ul>
	<b>Unsur Penunjang</b>						
	<b>Perencanaan</b>						
	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>						
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	102,6	6.138.612.610	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 102,6%</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan, agar tujuan/sasaran strategis beserta</li> </ol>

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
				2. Predikat kinerja “ Sangat Berhasil”	anggaran berbasis kinerja. 2. Kerjasama antar perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan	kinerja dan indikator sasaran RPJMD. 2. Masih terdapat indikator kinerja pada Perangkat Daerah yang belum SMART	indikatornya baik di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah yang berorientasi hasil. 2. Menyempurnakan indikator kinerja pada Perangkat daerah yang belum SMART
	<b>Keuangan</b>						
40	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	<b>94,67</b>	<b>199.328.313.991</b>	1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 94,67% 2. Predikat kinerja “ Berhasil”	1. Penguatan akuntabilitas kinerja dengan strategi mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel 2. Ketepatan Penyusunan APBD dan Laporan Keuangan yang tepat waktu serta posisi keuangan pemerintah	1. Dalam pencetakan Surat Peberitahaun Pajak Terhutang (SPPT) PBB dicetak pada bulan april, namun kendala mesin pencetaknya hanya ada satu. Pada kegiatan pengelohan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah tidak dapat dilaksanakan pelaksanaan pembaruan ZNT dikarenakan pihak kantor Wilayah BPN Kabupaten Rejang Lebong tidak siap	1. Melaksanakan Pedoman Teknis Penyusunan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja Pada perangkat daerah kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor. 18 Tahun 2023 2. Membuat Aplikasi Terintegrasi dalam Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Capaian Kinerja 3. Penyusunan dan Penganggaran APBD dengan perencanaan

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
					<p>Kebupaten Rejang Lebong</p> <p>3. Pengelolaan aset daerah sudah baik dan Laporan keuangan pemerintah daerah sudah akuntabel dan tepat waktu karena pada rekonsiliasi asset pada 45 OPD dan Kecamatan sudah dilakukan secara kontinu setiap triwulan</p> <p>4. Dilakukan upaya Sosialisasi, Pendampingan dan penagihan Pajak langsung ke lokasi wajib pajak</p> <p>5. Adanya Evaluasi untuk masing-masing sector pajak yang tidak tercapai target</p>	<p>melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga kegiatan tersebut diganti menjadi pembaruan NJOP pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Curup tengah dan Curup Kota dengan juga melibatkan pihak RT dan RW</p> <p>2. Pada progress penyusunan NA Perkada mengenai Pajak dan Retribusi Daerah sudah selesai dan sedang menunggu proses evaluasi kementerian keuangan</p> <p>3. Perlunya dibentuk tim verifikasi penghapusan pajak yang menjadi polemic dikarenakan masih ada ketidakjelasan proses dan sop pelaksanaaanya. Tim</p>	<p>yang tepat dengan berpedoman pada skala prioritas yang akan dicapai sesuai dengan visi misi Kepala Daerah</p> <p>4. Pelaksanaan Penyusunan dan Penganggaran APBD yang tepat waktu sesuai dengan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p> <p>5. Pengamanan Aset Barang Milik Daerah berupa Pendampingan Sertifikasi Tanah, Pengamanan Kendaraan Bermotor, dan Pemindah tangangan Aset Barang milik daerah.</p> <p>6. Penatausahaan bidang asset berupa inventarisasi barang milik daerah, perencanaan barang kebutuhan milik daerah serta penyusunan standar harga satuan</p> <p>7. Percepatan Penetapan Pajak, Cetak Massal dan pembagian SPPT PBB</p>

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
					<p>6. PAD yang ditentukan telah diterapkan untuk belanja makanan minum telah dilakukan pemotongan melalui pihak bank untuk pembayaran Pajak PBN I dengan menggunakan biling E-Pendapatan sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan dalam pembayaran pajak tersebut</p> <p>7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah melakukan punishment pada pajak reklame disegel dan dikasih tempo selama 14 hari</p>	<p>verifikasi penghapusan pajak juga terdiri dari bidang pendaftaran dan pendataan dan bidang penagihan dan pendapatan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai leading sector dalam pengelolaan pendapatan daerah, namun memiliki kendala masih terkait retribusi dan pendapatan lainnya masih terdapat pada OPD lainnya yang terkadang OPD tersebut masih belum optimal dalam pengelolaan dan penatausahaan retribusi dan pendapatan lainnya</p>	<p>8. Aplikasi PBB dan BPHTB</p> <p>9. Pembuatan, Pembaruan, Pendefilan Peta Zona Nilai Tanah pada Kelurahan dan Desa</p> <p>10. Pembaruan data sector Pajak Baru</p> <p>11. Penggalian Potensi Baru untuk pajak air tanah</p>

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
					untuk melakukan pelunasan pajak reklame		
	<b>Kepegawaian</b>						
	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>						

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
41	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	106,76	4.858.520.934	1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 106,76%  2. Predikat kinerja “ Sangat Berhasil”	1. Penguatan akuntabilitas kinerja dengan strategi mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1. Belum adanya pemantauan secara terintegrasi terhadap kelengkapan dokumen penunjang pada OPD.	Peningkatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan perangkat Daerah
	<b>Unsur Pengawas</b>						
42	Inspektorat	120,52	3. 5.897.519.497	1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 120,52 %  2. Predikat kinerja “ Sangat Berhasil”	Melakukan pemuktahiran data temuan dengan mengundang OPD yang masih memiliki temuan untuk melakukan pembahasan dalam setiap temuan yang belum selesai	Belum adanya pemantauan secara terintegrasi terhadap kelengkapan dokumen penunjang pada OPD.	Perlu meningkatkan capaian kinerja dari indikator- indikator kinerja OPD
	<b>Unsur Kewilayah</b>						

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
	Kecamatan Curup	96,60%	7.757.827.396,-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 98,98%</li> <li>2. Predikat kinerja “Berhasil”</li> </ol>	<p>Semua kegiatan telah dilaksanakan dan sudah berjalan dengan baik</p>	<p>Banyak belanja tidak terealisasi khusus nya pada sub kegiatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan dikarenakan satuan harga di DPA terlalu rendah/ murah dibandingkan dengan harga dipasaran sehingga penyedia banyak yang tidak bersedia/ tidak sanggup menyediakan barang sesuai dengan harga di DPA</p>	<p>Kedepannya akan lebih teliti dan cermat lagi dalam perencanaan dan penganggaran</p>
44	Kecamatan Curup Utara	100	2.716.485.380	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 100 %</li> <li>2. Predikat kinerja “ Baik”</li> </ol>	<p>Adanya pembinaan berkala yang dilakukan oleh camat bermani ulu untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara sehingga tercipta Sumber Daya ASN yang mumpuni</p>	<p>Kelengkapan dokumen belum maksimal</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan1. Sumber Daya ASN, melalui pelatihan-pelatihan</li> <li>2. Menerapkan Etika dan Integritas dalam menjalankan tugas</li> </ol>

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
45	Kecamatan Curup Timur	99,05	4.309.277.231	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 99,05%</li> <li>2. Predikat kinerja “ Berhasil”</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya peran aktif dari masyarakat usia produktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih Kurangnya Sumber Daya ASN di Kecamatan dan di Kelurahan</li> <li>2. Kurangnya Sarana dan prasarana</li> <li>3. Kurangnya anggaran akibat dari seringnya dilakukan rasionalisasi anggaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan sarana dan prasarana kantor</li> <li>2. Adanya Penambahan sumberdaya ASN di Kecamatan maupun Kelurahan</li> <li>3. Penambahan anggaran</li> </ol>
46	Kecamatan Curup Selatan	71	3.155.343.773	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 71%</li> <li>2. Predikat kinerja “ Berhasil ”</li> </ol>	<p>Tersedianya alat dan bahan yang akan digunakan pada saat pelatihan sehingga setelah pelatihan dapat dilanjutkan dengan mengembangkan hasil dari pelatihan</p>	<p>Kurangnya SDM pada kecamatan</p>	Menambah SDM sehingga kegiatan-kegiatan dapat tercapai dengan maksimal
47	Kecamatan Curup Tengah	88,89	8.157.597.017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 88,89%</li> <li>2. Predikat kinerja “ Berhasil”</li> </ol>	<p>Adanya pembinaan berkala yang dilakukan oleh Camat Curup Tengah untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara sehingga tercipta Sumber</p>	<p>Kelengkapan dokumen belum maksimal</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Sumber Daya ASN, melalui pelatihan-pelatihan</li> <li>2. Menerapkan Etika dan Integritas dalam menjalankan tugas</li> </ol>

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
					Daya ASN yang mumpuni		
48	Kecamatan Bermani Ulu	<b>93,13</b>	<b>1.338.346.980</b>	1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 93,13% 2. Predikat kinerja “ Berhasil”	Adanya pembinaan berkala yang dilakukan oleh Camat Bermani Ulu untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara sehingga tercipta Sumber Daya ASN yang mumpuni	Kelengkapan dokumen maksimal belum	1. Peningkatan Sumber Daya ASN, melalui pelatihan-pelatihan 2. Menerapkan Etika dan Integritas dalam menjalankan tugas
49	Kecamatan Bermani Ulu Raya	<b>127,33</b>	<b>1.478.413.906</b>	1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 127,33% 2. Predikat kinerja “ Sangat Baik”	Adanya pembinaan berkala yang dilakukan oleh Camat Bermani Ulu Raya untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara sehingga tercipta Sumber Daya ASN yang mumpuni	Kelengkapan dokumen maksimal belum	1. Peningkatan Sumber Daya ASN, melalui pelatihan-pelatihan 2. Menerapkan Etika dan Integritas dalam menjalankan tugas

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
50	Kecamatan Selupu Rejang	96,91	4.309.227.231	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 96,91%</li> <li>2. Predikat kinerja “ Baik”</li> </ol>	Adanya pembinaan berkala yang dilakukan oleh Camat Selupu Rejang untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara sehingga tercipta Sumber Daya ASN yang mumpuni	Kelengkapan dokumen maksimal belum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Sumber Daya ASN, melalui pelatihan-pelatihan</li> <li>2. Menerapkan Etika dan Integritas dalam menjalankan tugas</li> </ol>
51	Kecamatan Sindang Kelingi	75	2.270.883.275	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 75%</li> <li>2. Predikat kinerja “ Berhasil”</li> </ol>	Adanya pembinaan berkala yang dilakukan oleh Camat Sindang Kelingi untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara sehingga tercipta Sumber Daya ASN yang mumpuni	Kelengkapan dokumen maksimal belum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Sumber Daya ASN, melalui pelatihan-pelatihan</li> <li>2. Menerapkan Etika dan Integritas dalam menjalankan tugas</li> </ol>
52	Kecamatan Sindang Dataran	100	1.130.208.906	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 100%</li> <li>2. Predikat kinerja “ Baik”</li> </ol>	Adanya pembinaan berkala yang dilakukan oleh Camat Sindang Dataran untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara sehingga tercipta Sumber	Kelengkapan dokumen maksimal belum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Sumber Daya ASN, melalui pelatihan-pelatihan</li> <li>2. Menerapkan Etika dan Integritas dalam menjalankan tugas</li> </ol>

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
					Daya ASN yang mumpuni		
53	Kecamatan Binduriang	100	1.244.466.669	1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 100% 2. Predikat kinerja “ Baik ”	Adanya pembinaan berkala yang dilakukan oleh Camat Binduriang untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara sehingga tercipta Sumber Daya ASN yang mumpuni	Kelengkapan dokumen belum maksimal	1. Peningkatan Sumber Daya ASN, melalui pelatihan-pelatihan 2. Menerapkan Etika dan Integritas dalam menjalankan tugas
54	Kecamatan Sindang Beliti Ulu	100	1.548.246.935	1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 64,6% 2. Predikat kinerja “ Berhasil ”	Adanya pembinaan berkala yang dilakukan oleh Camat Sindang Beliti Ulu untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara sehingga tercipta Sumber	Kelengkapan dokumen belum maksimal	1. Peningkatan Sumber Daya ASN, melalui pelatihan-pelatihan 2. Menerapkan Etika dan Integritas dalam menjalankan tugas

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
					Daya ASN yang mumpuni		
55	Kecamatan Sindang Beliti Ilir	100	1.228.152.680	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja berkala yang dilakukan oleh Camat Sindang Beliti Ilir sebesar 100%</li> <li>2. Predikat kinerja “ Berhasil”</li> </ol>	<p>Adanya pembinaan berkala yang dilakukan oleh Camat Sindang Beliti Ilir untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara sehingga tercipta Sumber Daya ASN yang mumpuni</p>	<p>Kelengkapan dokumen belum maksimal</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Sumber Daya ASN, melalui pelatihan-pelatihan</li> <li>2. Menerapkan Etika dan Integritas dalam menjalankan tugas</li> </ol>

No	Urusan Pemerintah Daerah	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Analisis	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
		K	Rp				
56	Kecamatan Padang Ulak Tanding	<b>100</b>	<b>2.786.408.530</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 100%</li> <li>2. Predikat kinerja <b>“ Berhasil”</b></li> </ol>	Adanya pembinaan berkala yang dilakukan oleh Camat Padang Ulak Tanding untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara sehingga tercipta Sumber Daya ASN yang mumpuni	Kelengkapan dokumen belum maksimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Sumber Daya ASN, melalui pelatihan-pelatihan</li> <li>2. Menerapkan Etika dan Integritas dalam menjalankan tugas</li> </ol>
57	Kecamatan Kota Padang	<b>95,5</b>	<b>3.235.786.127</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 95,5 %</li> <li>2. Predikat kinerja <b>“ Berhasil ”</b></li> </ol>	Adanya pembinaan berkala yang dilakukan oleh Camat Kota Padang untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara sehingga tercipta Sumber Daya ASN yang mumpuni	Kelengkapan dokumen belum maksimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Sumber Daya ASN, melalui pelatihan-pelatihan</li> <li>2. Menerapkan Etika dan Integritas dalam menjalankan tugas</li> </ol>

### **2.3.2 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah**

Permasalahan pembangunan daerah ini sifatnya makro, merupakan permasalahan lintas sektor serta berkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang juga perlu menjadi perhatian perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong mendasarkan pada hasil analisis aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing untuk tahun 2025 sebagai berikut:

1. Prioritas Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan sasaran daerah:
  - Meningkatnya motivasi, kemampuan dan keterampilan, lingkungan dan fasilitas yang mendukung daya saing dan inovasi organisasi kemasyarakatan, permasalahan yang meliputi :
    - a. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia
  - Meningkatnya daya saing kepemudaan, permasalahan yang dihadapi meliputi:
    - a. Masih minimnya kegiatan kepemudaan.
  - Tersebarluasnya pembinaan nilai- nilai keagamaan dan penerapannya dalam kehidupan sehari- hari, permasalahan yang dihadapi meliputi:
    - a. Belum optimalnya pembinaan nilai- nilai keagamaan dan penerapannya dalam kehidupan sehari- hari
  - Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang agama, permasalahan yang dihadapi meliputi:
    - a. Belum optimalnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang agama.
2. Prioritas Penguatan pelayanan dasar dan pengembangan Infrastruktur dengan sasaran daerah:
  - Meningkatnya layanan dan akses pendidikan, permasalahan yang dihadapi meliputi:
    - a. Kondisi sarana prasarana pendidikan masih terbatas
    - b. Belum optimalnya penagngagran baik APBD maupun APBN terhadap program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten rejang Lebong khusunya untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
    - c. Pelaksanana koordinasi baik tingkat pusat maupun setingkat daerah belum dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab XII pasal 49 bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan baiaya kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD

namun dari kondisi yang ada masih sangat jauh dana yang dianggarkan buat pendidikan.

- d. Pemerataan guru disetiap jenjang sekolah belum dilaksanakan secara profesional.
  - Meningkatnya pelayanan kesehatan yang dan berkualitas, permasalahan yang dihadapi meliputi:
    - a. Belum optimalnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan kesehatan.
    - b. Kesadaran masyarakat pencegahan penyakit baik melalui imunisasi dan pola hidup bersih masih kurang. Bahkan masih ada warga yang menolak imunisasi karena alas an keyakinan adanay kontra indikasi bahwa anak akan menderita auto imun dll.
    - c. Belum semua desa memiliki Posbindu PTM dan Posbindu KIT, dan belum adanya dukunagn anaggaran desa untyk pengadaan BHP penunjang skrining PTM.
    - d. Kendala pembiayaan dimana masih banyak ibu hamil yang belum mempunyai jaminan pembiayaan kesehatan sehingga ada kendala pada saat dilakukan rujukan untuk kasus-kasus resiko tinggi
  - Meningkatnya Infrastruktur wilayah yang memadai dan merata, permasalahan yang dihadapi meliputi:
    - a. Belum optimalnya Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air.
    - b. Belum optimalnya koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan propinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan dan perijinan pemanfaatan ruang jalan.
    - c. Belum optimalnya kelayakan infrastruktur prasarana dan sarana wilayah.
    - d. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur
3. Prioritas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima dengan sasaran daerah:
- Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik, permasalahan yang dihadapi meliputi:
    - a. Rencana aksi belum sepenuhnya didukung dengan angagran yang memadai.
    - b. Sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten di bidang perencanaan pada perangkat daerah masih kurang.
    - c. Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur.
    - d. Kemampuan pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah di masing-masing Perangkat Daerah belum merata.

- e. Belum optimalnya penerapan akuntabilitas kinerja
  - f. Belum maksimalnya penyelenggaraan pemerintah daerah.
  - g. Belum maksimalnya Indeks Kepuasan Masyarakat
4. Prioritas Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal dengan sasaran daerah:
- Meningkatnya pemahaman tentang adat istiadat di masyarakat, permasalahan yang dihadapi meliputi:
    - a. Belum adanya data baku tentang bagaimana tradisi adat istiadat budaya dilaksanakan.
    - b. Belum adanya regenerasi tentang budaya karena budayawan terdahulu tidak mewarisi kepada anak cucu atau generasi berikutnya.
  - Meningkatnya pengelolaan kebudayaan daerah, permasalahan yang dihadapi meliputi:
    - a. Masih banyak masyarakat pelaku budaya yang tidak begitu aktif meskipun telah terdata menjadi pelaku budaya di Kabupaten Rejang Lebong.
    - b. Kurangnya motivasi pelaku budaya
    - c. Kabupaten Rejang Lebong belum memiliki Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten.
    - d. Belum adanya kegiatan yang rutin dalam menjaga situs budaya dan melestarikan situs budaya ini secara khusus, sehingga situs yang telah terdata ini masih dalam kondisi yang tidak maksimal terawatt.
  - Terwujudnya ekonomi lokal berbasis potensi lokal, permasalahan yang dihadapi meliputi:
    - a. Masih rendahnya identifikasi potensi lokal yang berfungsi untuk meningkatkan perekonomian daerah.
    - b. Banyak masyarakat yang masih tergantung pada bantuan pemerintah, sehingga pertumbuhan ekonomi terlihat saat ada bantuan sosial yang diluncurkan oleh pemerintah
5. Prioritas pengurangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dengan sasaran daerah:
- Meningkatnya kesempatan kerja melalui pemberdayaan masyarakat, permasalahan yang dihadapi meliputi:
    - a. Kabupaten Rejang Lebong belum memiliki Balai Latihan Kerja, sehingga program pelatihan kerja masih mengandalkan BLK Provinsi
    - b. Sebanyak 76% mayoritas penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong bekerja sebagai petani masih menggantungkan hidup pada nilai jual beli hasil pertanian dan perkebunan yang cenderung fluktuatif.

### **2.3.3. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah didasarkan pada evaluasi kinerja program masing-masing urusan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah untuk tahun 2025 sebagai berikut:

#### **2.3.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar.**

##### **a. Bidang Pendidikan.**

Pendidikan menjadi salah satu dasar dalam upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas serta dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan. Saat ini, pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong memiliki beberapa permasalahan antara lain:

1. Kurangnya Kecukupan Formasi Guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan Indeks Distribusi Guru.
2. Kurangnya Proporsi PTK Penggerak.
3. Kurangnya bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan untuk peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan khususnya terkait literasi dan numerisasi.
4. Kurangnya pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tamping layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6(enam) tahun
5. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.
6. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal melalui pengadaan sarana mobilitas sekolah.
7. Daftar anak usia 7-18 tahun belum bersekolah formal dan belum berpartisipasi di satuan pendidikan.
8. Kurangnya penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD.

##### **b. Bidang Kesehatan**

Permasalahan kesehatan yang ditemukan di Kabupaten Rejang Lebong diantaranya adalah:

1. Masih banyak regulasi bidang kesehatan di Kabupaten Rejang Lebong perlu dibenahi serta ditingkatkan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan.
2. Kompetensi tenaga kesehatan yang masih perlu ditingkatkan.
3. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan belum merata di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas.
4. Sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang belum memadai.
5. Angka kesakitan beberapa penyakit khususnya penyakit tidak menular semakin meningkat.

- 
6. Kualitas kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar masih rendah dimasyarakat.
  7. Masih terdapatnya kejadian kasus gizi buruk.
  8. Masih adanya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA).
  9. Belum tercapainya Universal Health Coverage pada jaminan pelayanan kesehatan.
  10. Budaya PHBS dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.

**c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya optimalnya penanganan jalan dan jembatan karena tidak sebandingnya cakupan obyek yang ditangani dengan ketersediaan data.
2. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam merawat sarana infrastruktur bidang bina marga.
3. Masih seringnya terjadi pelanggaran terhadap beban muatan sehingga mempercepat kerusakan jalan dan jembatan.
4. Belum optimalnya koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan dan perijinan pemanfaatan ruang jalan.
5. Belum optimalnya pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air.
6. Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan atas Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) guna mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan ruang sesuai peruntukan.
7. Belum jelasnya kebijakan insentif –desinsentif dan penegakan aturan atas pelanggaran tata ruang.

**d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Permasalahan yang timbul pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, antara lain:

1. Kebiasaan warga membuang sampah di saluran/got/parit dan penempatan tempat pembuangan sampah dipinggir parit mempengaruhi terjadinya pendangkalan dan penyumbatan saluran air.
2. Belum terintegrasinya sistem drainase yang menyebabkan pengendalian banjir dan genangan belum optimal.

- 
3. Belum optimalnya pengembangan sistem sanitasi (penyediaan air bersih, penanganan air limbah dan pengelolaan sampah) pada kawasan perumahan dan permukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.
  4. Kurangnya regulasi meliputi norma, standar, prosedur dan kriteria pemanfaatan ruang, sehingga masih diperlukan adanya rencana detail tata ruang kawasan strategis.
  5. Belum terakomodirnya nilai-nilai filosofi sejarah, kebudayaan dan kearifan lokal dalam konsep penataan kawasan khususnya di perkotaan.

**e. Bidang Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Permasalahan yang timbul pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat antara lain:

1. Masih kurangnya edukasi pada masyarakat tentang penanggulangan bencana.
2. Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan kedaruratan bencana.
3. Masih terbatasnya jumlah pemasangan sistem peringatan dini ( Early Warning System/EWS) diwilayah rawan bencana..
4. Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam perhitungan kebutuhan pasca bencana dan rehabilitasi.

**f. Bidang Sosial**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan sosial adalah sebagai berikut:

1. Tingginya jumlah PMKS
2. Jumlah PMKS baru yang muncul lebih tinggi dari jumlah PMKS yang mampu ditangani dalam 1 tahun
3. Rendahnya keterampilan PKS
4. Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja.
5. Kurangnya sarana sosial/penampungan sementara/ rumah singgah/ tempat rehabilitasi PMKS.
6. Rendahnya kualitas dan kuantitas bantuan dan penanganan PMKS.

**2.3.3.2. Aspek Pelayanan Umum Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.**

**a. Urusan Tenaga Kerja**

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan urusan tenaga kerja, antara lain:

1. Terbatasnya tenaga kerja yang memperoleh peningkatan pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

- 
2. Tidak sesuainya antara kesempatan kerja yang ada dengan kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja.
  3. Kurangnya kesadaran pihak LPK dalam melakukan perpanjangan izin operasional.
  4. Belum akuratnya data mengenai bidang hubungan industrial (data perusahaan).
  5. Masih ada perusahaan yang belum menerapkan standar UMP.
  6. Masih ada perusahaan yang belum menerapkan Standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
  7. Masih kurangnya kesadaran perusahaan dalam mendaftarkan pekerja atau buruh pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan .
  8. Masih kurangnya kesadaran Perusahaan untuk menyampaikan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama ke Dinas Tenaga Kerja dan Kabupaten Rejang Lebong.

**b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

1. Persentase Perempuan di Parlemen masih dibawah capaian Nasional.
2. Belum adanya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) sehingga pelayanan Perlindungan pada Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lain terkait perempuan dan anak belum berjalan dengan maksimal.
3. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

**c. Urusan Pangan**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pangan adalah sebagai berikut:

1. Tidak/belum stabilnya ketersediaan pangan pokok di Kabupaten Rejang Lebong
2. Belum adanya sarana informasi/aplikasi khusus terkait Informasi harga pangan di tingkat pasar, mutu pangan, penentuan makanan yang amandan layak konsumsi, neraca pangan.
3. Belum adanya/ dibentuknya Tim Khusus /Satgas terkait pangan di tingkat daerah.
4. Belum/kurang terpenuhinya Cadangan Pangan Daerah (CPD) yang sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat (Badan Pangan Nasional).
5. Belum optimalnya pembinaan Kelompok Tani di desa.
6. Belum ada labolatorium khusus uji mutu residu pestisida di Kabupaten Rejang Lebong sehingga kurangnya pengawasan terhadap pangan daerah.

- 
- 7. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta anggaran.

**d. Urusan Bidang Pertanahan**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Pertanahan adalah sebagai berikut:

**e. Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- 1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup/ pengelolaan persampahan.
- 2. Rendahnya peran serta masyarakat hanya menganggap ini tugas dari Dinas Lingkungan Hidup.
- 3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan Lingkungan Hidup/pengelolaan persampahan.
- 4. Tingkat pengelolaan sampah/limbah masih rendah.

**f. Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil adalah sebagai berikut:

- 1. Kesadaran masyarakat atas pelaporan administrasi kependudukan perlu ditingkatkan, karena masih terdapat masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan hanya pada saat dibutuhkan seperti keperluan sekolah maupun mendapatkan bantuan.
- 2. Masih perlu ditingkatkan fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten.

**g. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut:

- 1. Perlunya peningkatan kelembagaan ekonomi desa.
- 2. Masih rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia
- 3. Pelayanan pemerintah desa pun belum optimal oleh karena masih terdapat sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang kurang baik, bahkan masih ada desa yang belum memiliki sarana prasarana perkantoran.

**h. Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya KIE Kesehatan Seksual dan Reproduksi Remaja.
2. Kurangnya akses terhadap layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Remaja.
3. Kurangnya KIE Seksual dan Reproduksi Remaja tentang alat kontrasepsi modern (MKJP).
4. Kurangnya akses terhadap pelayanan MKJP yang berkualitas terjangkau.
5. Kurangnya pelayanan pasca MKJP khususnya yang menangani masalah kesehatan atau efek samping.
6. Kurangnya akses terhadap layanan dan alat KB.
7. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

**i. Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan.**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor di UPD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan.
2. Masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas dan aman berkendaraan.
3. Masih perlunya peningkatan keselamatan perjalanan transportasi utamanya peningkatan pemenuhan fasilitas keselamatan diruas jalan Kabupaten dalam mendukung pengurangan tingkat kecelakaan

**j. Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana jaringan Intra Pemerintah, pusat data dan vidcon.
2. Belum optimalnya kompetensi SDM dalam bidang TIK.
3. Belum optimalnya implementasi TIK dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
4. Belum optimalnya layanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi

**k. Urusan Pemerintah Bidang Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

- 
1. Untuk pemasaran pun masih terbatas karena belum banyak event-event yang diselenggarakan di Kabupaten Rejang Lebong yang bisa menjadi sarana bagi UKM untuk melakukan pemasaran.
  2. Belum optimalnya pengelolaan manajemen dan SDM koperasi.
  3. Terbatasnya akses pembiayaan dan permodalan.

#### **I. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang handal.
2. Kurangnya informasi dan promosi mengenai potensi investasi yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.
3. Perlunya optimalisasi potensi Penanaman Modal Dalam Negeri ( PMDN) dan Penanaman Modal Asing ( PMA)
4. Daerah belum memiliki peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RDTR) berupa peta digital, saat ini daerah masih menggunakan Perda Tata Ruang.

Tujuan dibuatnya Peta Digital RDTR adalah untuk mempercepat proses transparansi perizinan serta integrasi melalui Online Single Submission (OSS), yang hingga saat ini penetapan izin lokasi tata ruang masih manual, yang cukup memakan waktu dalam proses perizinan usaha/Non Usaha

#### **m. Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olah raga**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga adalah sebagai berikut:

1. Kelompok usia pemuda(16-30), sebagian besar mereka ada di satuan pendidikan SLTA dan perguruan tinggi.
2. Belum ada koordinasi yang bagus dalam penyusunan program pengembangan pemuda, karena setiap satuan pendidikan punya visi dan misi yang tidak seluruhnya sejalan dengan visi dan misi Dispora.
3. Jumlah personal pelatih dan instruktur masih sangat terbatas.
4. Manajemen olahraga belum baik karena kekurangan SDM yang profesional di bidang pengembangan olahraga.



#### **n. Urusan Pemerintah Bidang Statistik**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan statistik adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat pemahaman dan pemanfaatan data statistic sektoral oleh OPD dan sektor terkait lainnya sebagai dasar pengambilan kebijakan.
2. Belum adanya standarisasi data statistic sektoral Kabupaten.
3. Belum adanya pedoman dalam pelaksanaan kegiatan statistic sektoral mulai dari pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, dan penyebarluasan data serta interoperabilitas data statistik sektoral.
4. Belum adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang statistik.

#### **o. Urusan Pemerintah Bidang Persandian**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan persandian adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya regulasi keamanan informasi, antara lain regulasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi SPBE, Manajemen Resiko SPBE dan Standarisasi Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sistem keamanan informasi.
3. Kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi.
4. Kurangnya kesadaran keamanan informasi pada OPD.
5. Belum adanya Pola Hubungan Komunikasi Sandi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

#### **p. Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan bidang kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya peranan Badan Musyawarah Adat ( BMA ) dan minimnya keikutsertaan seni etnis nusantara yang ditampilkan.
  - a. Masih Rendahnya kaderisasi perangkat adat.
  - b. Masih rendahnya event daerah dan nasional yang diikuti
2. Masih rendahnya karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi.
3. Masih rendahnya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan



#### **q. Urusan Bidang Perpustakaan**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan bidang perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya minat membaca buku, karena sebagian besar masyarakat lebih memilih *gadget* dan internet dibandingkan dengan buku, *Prestise Gadget* yang lebih dianggap kekinian membuat buku makin ditinggalkan oleh banyak orang.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan koleksi perpustakaan yang memiliki nilai sejarah sehingga penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan belum optimal.
3. Kurangnya tenaga pustakawan. Tanpa apresiasi yang benar dan memadai tentang pustakawan maka perpustakaan di Indonesia akan berjalan secara serampangan, sporadic dan tumpang tindih.
4. Letak perpustakaan umum daerah yang kurang representative dan belum memenuhi standar perpustakaan nasional, sehingga mengurangi jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan.
5. Belum adanya penambahan koleksi 4 tahun terakhir.
6. Saprasi perpustakaan yang belum memadai

#### **r. Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan.**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan bidang kearsipan adalah sebagai berikut:

1. Belum terlaksananya tata kelola arsip yang sesuai pedoman tata kearsipan pada OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini terjadi karena belum ada persamaan persepsi tentang pentingnya arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan.
2. Belum adanya tenaga khusus arsiparis di tiap OPD yang khusus menagani penataan arsip. Hal ini membuat penataan arsip dilakukan sambil lalu dan tidak sesuai dengan pedoman tata kearsipan.
3. Masih rendahnya persentase perangkat daerah yang tertib arsip.
4. Sarana dan prasarana yang ada belum sesuai dengan standar ANRI

#### **2.3.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan**

##### **a. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pariwisata adalah sebagai berikut:

- 
1. Pengembangan desa wisata perlu didukung juga melalui OPD lain seperti peningkatan kelembagaan BUMDes, perbaikan akses jalan dan pembinaan umkm.
  2. Pengelolaan aset/objek wisata milik daerah belum optimal disebabkan bukti pemilikan aset yang sedang diproses.

**b. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pertanian adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya implementasi sinergi antar sektor antar wilayah dalam pengembangan pertanian (agropolitan/Kawasan Pertanian Terpadu).
2. Belum optimalnya produksi dan produktivitas dan nilai tambah usaha peternakan.
3. Masih rendahnya nilai tambah produksi hasil pertanian (pangan,horti).
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya pangan lokal.
5. Infrastruktur pertanian(dalam jumlah, kualitas dan posisinya) masih sangat terbatas dan belum dapat memenuhi kebutuhan usaha tani masyarakat.
6. Teknologi Tepat Guna belum diterapkan secara optimal.
7. Sistem agribisnis tanaman pangan (padi, dan jagung) belum berkembang.
8. Tingkat permodalan petani masih sangat rendah.
9. Daya saing produksi tanaman pangan (padi dan jagung) relative rendah.
10. Mutu sumber daya manusia (tenaga kerja) pertanian relative rendah
11. Pembiayaan sektor pertanian yang masih terbatas.
12. Ketersediaan PPL yang terus berkurang.
13. Lembaga OPD yang terlalu besar yang seharusnya dipecah menjadi 3 OPD
14. Masih kurangnya sarana prasarana untuk operasional
15. Perlunya Bimtek untuk SDM teknis
16. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia

**c. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya nilai tambah hasil hutan, tata kelola, konservasi, dan perlindungan hutan.
2. Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)



#### **d. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya produktivitas pertambangan dan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan.

#### **e. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Perdagangan adalah sebagai berikut

1. Perlunya optimalisasi potensi perdagangan antar propinsi.
2. Masih belum optimalnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, sehingga mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi daerah

#### **f. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya daya saing produk IKM.
2. Masih rendahnya persentase IKM yang menerapkan manajemen mutu.
3. Terbatasnya media pemasaran produk IKM.

#### **g. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan transmigrasi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan Kawasan Transmigrasi.
2. Belum optimalnya pembinaan bagi masyarakat transmigrasi.
3. Kurangnya alokasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Sarana dan prasarana dilokasi transmigrasi yang masih kurang memadai.
5. Belum selesaiya penerbitan sertifikat hak milik warga transmigrasi

#### **h. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya produksi, produktivitas dan daya saing komoditas usaha perikanan.
2. Belum optimalnya nilai tambah produksi hasil perikanan.

### **2.3.3.4. Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.**

#### **a. Urusan Perencanaan Pembangunan**

Permasalahan utama dari unsur perencanaan adalah masih perlunya mendorong kinerja perencanaan pembangunan daerah agar lebih berkualitas. Hal tersebut dipengaruhi oleh kualitas dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan, serta keselarasan perencanaan daerah dengan perencanaan tingkat pusat maupun perencanaan sektoral lainnya. Disisi lain, dinamika kebijakan pemerintah pusat juga mempengaruhi kualitas perencanaan dari aspek keselarasan antar perencanaan di tingkat pusat maupun daerah

#### **b. Urusan Keuangan**

1. Penganggaran OPD yang belum tepat sasaran
2. Masih banyak aset daerah yang belum diamankan, ditertibkan dan dimanfaatkan.
3. Kepatuhan membayar pajak yang menyebabkan target PAD yang belum tercapai.

#### **c. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

1. Anggaran masih sangat kurang terutama di diklat teknis dan fungsional. Sedangkan dalam permendagri tentang pedoman penyusunan APBD daerah wajib menganggarkan 0,16% dari total APBD untuk pendidikan dan pelatihan.
2. Kebutuhan pegawai belum ideal. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2021, tidak ada pengadaan CPNS dan P3K, dan baru tahun 2022 mulai ada pengadaan P3K
3. Kalau untuk pengadaan CPNS dan P3K, jadwal yang keluar mendadak, aturan yang keluar juga mepet dengan pelaksanaan, sehingga tidak optimal.

#### **d. Urusan Penelitian dan Pengembangan**

1. Rencana kelitbangan belum tertera pada dokumen perencanaan baik RPJMD maupun RKPD sehingga belum ada implementasi mengenai rencana kelitbangan maupun pemanfaatan hasil kelitbangan di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Belum optimalnya penerapan inovasi daerah (SIDa) di Kabupaten Rejang Lebong.
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana riset dan inovasi

#### **e. Urusan Pengawasan**

1. Masih terdapat temuan-temuan yang terindikasi Tindak Pidana Korupsi (hasil pemeriksaan BPK RI).
2. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan internal maupun eksternal BPK belum mencapai target.
3. Masih belum terbangunnya infrastruktur yang mendukung penerapan SPIP.
4. Masih kurangnya kesadaran OPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

- 
5. Masih belum optimalnya pengawasan, pembinaan dan pendampingan bagi perangkat daerah dalam penyelengaraan pemerintah daerah
  6. Belum optimalnya OPD dalam menerapakan SAKIP.
  7. Kegiatan evaluasi SAKIP belum begitu berjalan.
- f. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik**
1. Koordinasi lintas instansi dalam kewaspadaan dini masih belum optimal dimana pengawasan terhadap orang asing (imigran) masih lemah.
  2. Kabupaten Rejang Lebong masih belum mampu mengoptimalkan peran masyarakatnya dalam bela negara di mana sama sekali tidak ada kegiatan pelatihan bela negara baik sifatnya pelatihan, jelajah dan kemah, gerakan nasional, sosialisasi, maupun cerdas cermat wawasan kebangsaan
- g. Urusan Sekretariat Dewan**
1. Penyelenggaraan sekretariat dewan Kabupaten Rejang Lebong masih belum optimal kinerjanya.
- h. Urusan Kesejahteraan Rakyat**
1. Pelaksanaan pembinaan keagamaan di Kabupaten Rejang Lebong masih belum optimal

## 2.4. Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan diatas, serta memperhatikan, dapat di inventarisasi beberapa isu strategis untuk dijadikan sebagai basis pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan, antara lain :

### 2.4.1 Isu Strategis Global

#### 2.4.1.1. Pembangunan berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals ( SDGs)*

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda internasional kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium, dengan melibatkan 194 negara, yang disepakati oleh Negara anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015. Namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, baik dari segi substansi maupun proses penyusunannya. MDGs yang disepakati lebih dari 15 tahun lalu hanya berisi 8 tujuan, 21 sasaran, dan 60 Indikator. Sasarannya hanya bertujuan mengurangi separuh dari tiap-tiap masalah pembangunan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran. MDGs memberikan tanggung jawab yang besar pada target capaian pembangunan bagi negara berkembang dan kurang berkembang, tanpa memberikan peran yang seimbang terhadap Negara maju.

Berbeda dengan MDGs, SDGs mengakomodasi masalah-masalah pembangunan secara lebih komprehensif baik kualitatif maupun kuantitatif menargetkan penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan dan sasarannya. SDGs juga bersifat universal memberikan peran yang seimbang kepada seluruh Negara baik negara maju, negara berkembang, dan negara kurang berkembang untuk kontribusi penuh terhadap pembangunan, sehingga masing-masing negara memiliki peran dan tanggungjawab yang sama antara satu dengan dengan yang lain dalam mencapai SDGs.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang meliputi masalah-masalah pembangunan yang berkelanjutan. Termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut dengan capaian terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.

Tujuan pembangunan berkelanjutan(SDGs) untuk 2016-2030 meliputi:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia

- 
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.
  5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
  6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan.
  7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua.
  8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
  9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi.
  10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara.
  11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
  12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.
  13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
  14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan.
  15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.
  16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.
  17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Agenda SDGs dinilai sangat relevan untuk konteks pembangunan Kabupaten Rejang Lebong. Tujuan SDGs memiliki tujuan yang baik, yaitu mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, medorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup.

#### **2.4.2. Isu Strategis Nasional dan Daerah**

##### **2.4.2.1. RPJPN 2025-2045**

RKPD tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2025-2025 dan RPJPN 2025-2045 sehingga RKPD Tahun 2025 merupakan tolak ukur atau dasar yang sangat penting dalam upaya mewujudkan Visi pada RPJPN 2025-2045.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

dengan Visi “**Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**”. Untuk mewujudkan Visi tersebut di bagi kedalam 8 agenda pembangunan yakni :

1. **Mewujudkan transformasi sosial** untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera dan berdaya saing
2. **Mewujudkan transformasi ekonomi** untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan
3. **Mewujudkan transformasi tata kelola** untuk membangun regulasi yang adaptif dan taat asas, serta birokrasi yang bersih, efektif, ramah, dan cepat
4. **Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi** dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global
5. **Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi** dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya dalam pengelolaan risiko bencana dan iklim, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan, dan guncangan.
6. **Pembangunan kewilayahan** diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
7. **Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan** menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. **Kesinambungan pembangunan** yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

RPJPN 2025-2045 dibagi menjadi 4 (empat) tahapan, dimana masing-masing tahapan merupakan pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah, tahapan-tahapan tersebut dirumuskan kedalam 4 tema besar lima tahunan yakni:

1. Tahun 2025-2029 Penguatan Transformasi
2. Tahun 2030-2034 Akselerasi Transformasi
3. Tahun 2035-2039 Ekspansi Global

#### 4. Tahun 2040-2045 Perwujudan Indonesia Emas

##### 2.4.2.2. RPJMN 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 atau yang sering disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dalam pengaktualisasi visi RPJPN Tahun 2025-2045 yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita yaitu :

1. **Prioritas Nasional 1:** Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM, dengan sasaran utama yaitu terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia
2. **Prioritas Nasional 2:** Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, dengan sasaran utama:
  - a. Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan
  - b. Terbangunnya *eco-region* sistem pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal
  - c. Meningkatnya ketahanan energi melalui peningkatan pasokan energi, perluasan akses dan jangkauan, serta pemanfaatan energi bersih
  - d. Menguatnya peran ekonomi syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi
  - e. Terwujudnya pengembangan ekonomi digital melalui peningkatan kontribusi sektor digital terhadap PDB
3. **Prioritas Nasional 3:** Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi, dengan sasaran utama:
  - a. Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan
  - b. Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB
  - c. Meningkatnya nilai tambah pariwisata
  - d. Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas
  - e. Terwujudnya pengembangan ekonomi digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB

4. **Prioritas Nasional 4:** Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, dengan sasaran utama:

- a. Pendidikan berkualitas yang merata
- b. Kesehatan untuk semua
- c. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
- d. Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi
- e. Peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga

5. **Prioritas Nasional 5:** Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, dengan sasaran utama:

- a. Meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan
- b. Menguatnya kinerja layanan konektivitas *backbone* dan sistem logistik nasional untuk mendukung integrasi ekonomi domestik dan global
- c. Integrasi ekonomi domestik dan global

6. **Prioritas Nasional 6:** Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Ekonomi, dengan sasaran utama:

- a. Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan
- b. Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
- c. Mewujudkan kemandirian perdesaan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
- d. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

7. **Prioritas Nasional 7:** Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyalundupan, dengan sasaran utama:

- a. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi
- b. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani
- c. Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba
- d. Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyalundupan
- e. Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan
- f. Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi

- g. Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
8. **Prioritas Nasional 8:** Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, dengan sasaran utama:
- Beragama maslahat dan berkebudayaan maju
  - Resilensi terhadap bencana dan perubahan iklim

#### 2.4.3. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026

Dalam pencapaian pembangunan suatu daerah, pembangunan tersebut haruslah cermat dalam menjaring isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Untuk menentukan isu strategis pembangunan tahun 2026 maka dilakukan analisis terhadap hasil evaluasi tahun sebelumnya serta isu strategis lainnya terkait SDG's, RKPD Tahun 2026 serta RPJMD Kabupaten Rejang Lebong. Berikut hasil analisis perumusan isu strategis Kabupaten Rejang Lebong.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dengan permasalahan dan isu strategis pada RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026**

NO	HASIL EVALUASI	SDGS	RKP TAHUN 2026	RPJMD	ISU STRATEGIS
1	<p>1. Harapan Lama Sekolah 14.20 Tahun 2024</p> <p>2. Persentase Pemuda Kader Aktif sebesar 0.305%</p> <p>3. Angka kriminalitas tahun 2024 sebesar 10%</p> <p>Dari data diatas, angka harapan lama menunjukkan bahwa rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,20 tahun atau setara dengan Diploma II dimana belum cukup berdaya saing. Selain</p>	<p>Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan berkelanjutan</p> <p>Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif di Semua Tingkatan</p>	<p>PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas</p> <p>PP8 : Penguatan Pendidikan, Sains, teknologi serta digitalisasi</p>	<p>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia</p>	<p>Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dalam Tantangan Pembangunan</p>

NO	HASIL EVALUASI	SDGS	RKP TAHUN 2026	RPJMD	ISU STRATEGIS
	itu, Indeks Daya saing daerah sudah lebih baik dari pencapaian tahun 2023, sedangkan angka kriminalitas masih cukup tinggi. Serta pemuda kader aktif masih sangat rendah jumlahnya.				
2.	<p>1. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2024 sebesar 8,81</p> <p>2. APM SD Tahun 2024 sebesar 96.06</p> <p>APM SMP Tahun 2024 sebesar 74.26</p> <p>3. AKI (Angka Kematian Ibu) Tahun 2024 sebesar 113.10</p> <p>4. Angka Harapan Hidup 69,42.</p> <p>Dari data diatas terlihat bahwa rata-rata lama sekolah belum mencapai wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun. Akses Pendidikan jenjang SLTP masih cukup rendah. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) masih tinggi, sedangkan Angka Harapan Hidup masih rendah meskipun meningkat sedikit dari tahun sebelumnya</p>	<p>1. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia</p> <p>2. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua</p>	<p>PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas</p> <p>PP8 : Penguatan Pendidikan, Sains, teknologi serta digitalisasi</p> <p>PP7: Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia : Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat</p>	<p>Pembangunan Sarana Prasarana Dasar</p>	<p>Belum Optimalnya Pelayanan Dasar pada Masyarakat</p>
3.	<p>1. Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 sebesar 64.18 (B)</p> <p>2. Nilai SAKIP Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024</p>	<p>Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan berkelanjutan</p> <p>Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun</p>	<p>PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan</p>	<p>Penguatan Reformasi Birokrasi</p>	<p>Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Daya Saing Daerah dan Inovasi serta Transformasi</p>

NO	HASIL EVALUASI	SDGS	RKP TAHUN 2026	RPJMD	ISU STRATEGIS
	<p>sebesar 62,47 (B).</p> <p>3. Indeks Daya Saing Daerah sebesar 3,63</p> <p>4. Indeks Inovasi Daerah sebesar 47,62 (inovatif)</p> <p>5. Indeks SPBE sebesar 3.24 (Baik)</p> <p>6. Nilai Maturitas SPIP Level 2</p> <p>Dari data diatas terlihat bahwa indeks reformasi birokrasi Kabupaten Rejang Lebong mengalami penurunan dan nilai sakip daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang sangat kecil. Indeks daya saing termasuk tinggi dan indeks inovasi masih kategori inovatif. Sedangkan indeks SPBE mengalami peningkatan yang tidak signifikan dari tahun 2023.</p> <p>Sedangkan nilai Maturitas SPIP masih di level 2.</p>	Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif di Semua Tingkatan	<p>Penyelundupan, dengan sasaran utama</p> <p>PP 3: Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi</p>		Digital dalam Pemerintahan
4.	<p>1. Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai tahun 2024 sebesar 76.61%</p> <p>2. Persentase rumah tangga yang telah memiliki akses air minum layak tahun 2024 sebesar 45,46%</p> <p>3. Rasio rumah layak huni tahun</p>	Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan	<p>PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi</p>	<p>1. Pembangunan Sarana Prasarana Dasar</p> <p>2. Peningkatan Konektivitas Wilayah</p> <p>3. Pengendalian Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan</p>	<p>Belum Optimalnya Layanan Infrastruktur, Ketahanan Bencana, dan Kualitas Lingkungan.</p>

NO	HASIL EVALUASI	SDGS	RKP TAHUN 2026	RPJMD	ISU STRATEGIS
	<p>2024 sebesar 0,539</p> <p>4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 sebesar 71,09</p> <p>5. Indeks Risiko Bencana tahun 2024 sebesar 112,35</p> <p>Dari data diatas terlihat bahwa rata-rata persentase penduduk dengan akses air minum yang layak masih cukup kurang. Rasio rumah layak huni juga masih cukup rendah. Selain itu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup masih dibawah IKLH Nasional 70,42 serta Indeks Risiko Bencana masih tinggi</p>		<p>PN8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama</p> <p>PP1 : Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air</p> <p>PP11 : Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup</p> <p>PP13 : Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan</p>		
5.	<p>1. Kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan terhadap PDRB (ADHK) Tahun 2024 sebesar 32,48%.</p> <p>2. Persentase panjang jalan usaha tani dalam kondisi baik tahun 2024 sebesar 63,49%</p> <p>3. PDRB Perkapita Tahun 2024 sebesar 45,23 Juta Rupiah.</p> <p>4. Persentase peningkatan wisatawan nusantara tahun 2024 sebesar 2,47%</p> <p>5. Nilai Investasi sebesar 92.884 miliar rupiah</p>	<p>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua</p>	<p>PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi</p> <p>PP14 : Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui program kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN serta kota-kota inovatif-karakteristik mandiri lainnya.</p> <p>PP15: Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasiskan SDA termasuk Sumber Daya Maritim untuk membuka lapangan</p>	<p>1. Optimalisasi Produktivitas Sektor Pertanian</p> <p>2. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>	<p>Belum Optimalnya Pengembangan Kegiatan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing</p>

NO	HASIL EVALUASI	SDGS	RKP TAHUN 2026	RPJMD	ISU STRATEGIS
	<p>Dari data diatas terlihat bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB cukup besar akan tetapi pertumbuhannya sangat rendah. Sedangkan jalan usaha tani dalam kondisi baik masih rendah persentasenya, sehingga dapat menghambat akses pemasaran hasil pertanian. Sedangkan PRDB Perkapita dan nilai investasi masih sangat rendah. Selain itu wisatawan di sektor pariwisata masih kurang.</p>		<p>kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.</p> <p>PP17 : Pelestarian Seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga</p>		
6.	<p>1. Tingkat Kemiskinan Tahun 2023 sebesar 14.79% dan tahun 2024 sebesar 15.65% Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2024 sebesar 41.16 (ribu) orang</p> <p>2. TPT 2024 sebesar 2.43% TPAK Tahun 2023 sebesar 77,86% dan Tahun 2024 sebesar 74.92% Dari data diatas terlihat bahwa tingkat kemiskinan menurun dan jumlah penduduk miskin menurun pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, akan tetapi sangat kecil dan angkanya masih cukup tinggi.</p>	<p>1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk</p> <p>2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua</p>	<p>PN6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Ekonomi</p> <p>PN3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi</p>	<p>1. Optimalisasi Produktivitas Sektor Pertanian</p> <p>2. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>	<p>Belum Optimalnya Pelaksanaan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja</p>

NO	HASIL EVALUASI	SDGS	RKP TAHUN 2026	RPJMD	ISU STRATEGIS
	Selain itu, tingkat pengangguran menurun sangat kecil dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja juga menurun.				

#### **2.4.3.1 Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Dalam Tantangan Pembangunan.**

Pembangunan manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan wilayah dimana sumber daya manusia yang berkualitas akan memiliki produktivitas tinggi sehingga mampu menggerakkan kegiatan ekonomi yang efisien yang nantinya akan berujung pada kesejahteraan masyarakat. Kualitas modal manusia dapat ditunjukkan dengan IPM yang dimana semakin tinggi IPM maka semakin tinggi pula kemajuan pembangunan manusia di suatu wilayah. Angka IPM Kabupaten Rejang Lebong terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan mencapai 70,77 di tahun 2021 sedangkan capaian tahun 2024 sebesar 75,04. Meskipun demikian, nilai IPM Kabupaten Rejang Lebong masih di bawah nilai IPM Provinsi Bengkulu dan Nasional. Selanjutnya jika dilihat persentase penduduk yang bekerja terhadap penduduk bekerja terhadap angkatan kerja terlihat angka yang cukup tinggi, lebih dari 90 persen angkatan kerja telah masuk ke dunia kerja sedangkan sisanya masih menganggur. Struktur penduduk ini akan membuka peluang untuk mendapatkan bonus demografi yang dalam jangka menengah dan jangka panjang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten. Prasyarat utama diperolehnya bonus demografi ini adalah dengan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sesuai dengan amanat RPJMN 2025-2029, pembangunan ditujukan untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Hal ini berarti menciptakan manusia yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas juga menjadi amanat yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025-2045 dimana sumber daya berkualitas berciri memiliki tingkat pendidikan yang cukup untuk mengadopsi dan menginovasi teknologi, memahami pengertian dasar tentang agama yang dianut, serta sehat jasmani dan rohani. Manusia yang berpendidikan dan berketerampilan baik juga harus diimbangi dengan moral dan keimanan yang baik. Nilai-nilai agama hendaknya juga dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan seperti yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025-2045. Upaya ini dimaksudkan untuk membangun dan memantapkan jati diri dan karakter daerah yang bertumpu pada religiusitas, kebersamaan, persatuan dan etos kerja yang tinggi.

Penanaman nilai-nilai agama kepada masyarakat dapat menjadi landasan yang kokoh bagi usaha-usaha pembangunan di masa yang akan datang. Beberapa ancaman terhadap sumber daya manusia yang saat ini sudah terlihat gejalanya, antara lain peredaran NAPZA, melemahnya budaya bangsa, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peredaran NAPZA di Rejang Lebong belum sepenuhnya dapat dikendalikan sehingga isu ini penting untuk diperhatikan karena menyasar pada anak dan remaja yang masih pada usia produktif.

#### **2.4.3.2. Belum Optimalnya Pelayanan Dasar pada Masyarakat**

Pendidikan memiliki peran penting dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong diarahkan untuk meningkatkan rata-rata jenjang pendidikan masyarakat agar masyarakat menjadi produktif dan berdaya saing, terutama untuk masyarakat usia produktif. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Rejang Lebong masih sebesar 8,81 tahun atau setara SMP. Partisipasi terhadap pendidikan belum baik yang ditunjukkan dengan masih adanya anak putus sekolah, belum optimalnya angka melanjutkan serta belum optimalnya angka partisipasi murni, terutama untuk jenjang SMP/ MTs. Sesuai dengan amanat RPJPD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025-2045, pelayanan pendidikan pada semua jalur dan jenjang perlu disiapkan secara bermutu dan terjangkau. Kebijakan pendidikan diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, dan perluasan kesempatan belajar. Dengan penduduk 15 tahun ke atas yang sebagian besar merupakan lulusan SMA ke bawah maka diperlukan peningkatan akses terhadap pendidikan. Oleh karena itu, merupakan kewajiban Pemerintah Rejang Lebong untuk memastikan bahwa sistem pendidikan yang ada dapat diakses oleh setiap penduduk usia sekolah, mulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, bahkan sampai pendidikan tinggi. Yang perlu dilakukan lainnya adalah pemerataan pendidikan untuk mendorong partisipasi sekolah serta memperkuat pendidikan karakter dan budaya sesuai dengan amanat RPJPD. Kesehatan juga berperan penting dalam mewujudkan SDM yang berkualitas melalui optimalisasi penciptaan lingkungan sehat dan perilaku sehat masyarakat. Perkembangan kondisi kesehatan di Kabupaten Rejang Lebong dapat dikatakan belum optimal. Angka harapan hidup di Kabupaten Rejang Lebong terus mengalami peningkatan pada tahun 2021 angka harapan hidup 68,75 sedangkan pada tahun 2024 sebesar 69,42. Namun masih lebih rendah dibandingkan dengan angka harapan hidup Provinsi Bengkulu. Permasalahan kesehatan yang ditemukan di Kabupaten Rejang Lebong diantaranya adalah belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat, terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan, terbatasnya tenaga medis dan kesehatan, serta belum meratanya akses terhadap layanan kesehatan. Upaya kesehatan yang dapat dilakukan adalah dengan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan, pengembangan sistem jaminan kesehatan,

peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat, serta peningkatan layanan kesehatan. Paradigma kesehatan yang selama ini mengarah pada tindakan kuratif juga harus mulai bergeser pada tindakan preventif dan promotif. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Isu lainnya yang mulai harus diperhatikan adalah kesehatan penduduk lansia, mengingat proporsi penduduk lansia ini akan semakin meningkat dalam beberapa waktu ke depan.

#### **2.4.3.3 Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Daya Saing Daerah dan Inovasi, serta Transformasi Digital dalam Pemerintahan.**

Reformasi birokrasi merupakan upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam aspek kelembagaan, proses bisnis, serta sumber daya aparatur. Pelaksanaan reformasi birokrasi adalah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Mewujudkan tata pemerintahan yang baik juga menjadi salah satu agenda dalam RPJPD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025-2045. Kinerja pemerintahan yang akuntabel menjadi salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas kinerja harus dibangun sejak proses perencanaan, penganggaran, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi. Pemerintah Rejang Lebong harus membentuk sistem akuntabilitas kinerja yang optimal dimana tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan daerah dapat dipertanggungjawabkan, terukur, dan sinkron. Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Rejang Lebong mulai mengalami peningkatan walaupun masih belum optimal . Berdasarkan data, nilai hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 untuk Kabupaten Rejang Lebong mengalami peningkatan dengan nilai B (62,47), akan tetapi indeks reformasi birokrasi Tahun 2024 menurun dengan nilai B(64.18), untuk Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 dengan indeks 58.87, untuk meningkatkan IP-ASN Rejang Lebong, maka pemerintah bisa mendorong peningkatan kualitas ASN melalui 4 dimensi yang dijadikan tolak ukur IP-ASN, diantaranya dengan meningkatkan dimensi kualifikasi melalui pemberian beasiswa dan tugas belajar kepada ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan, kemudian melakukan peningkatan pada dimensi kompetensi dengan menempatkan ASN sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan jabatan

Tata kelola pemerintahan yang baik akan tercapai apabila didukung oleh kelembagaan serta aparatur yang berkualitas dan profesional. Kelembagaan pemerintahan tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa yang efektif dan efisien diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Sementara itu, manajemen aparatur yang baik, mulai dari rekrutmen, promosi, dan pemanfaatan akan mendukung terciptanya aparatur yang berkualitas. Pemanfaatan teknologi sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, seperti sistem

pengaduan, sistem pelayanan perijinan, dan sistem pelayanan kependudukan, juga menjadi penting sehingga pelayanan publik semakin berkembang.

#### **2.4.3.4 Belum Optimalnya Layanan Infrastruktur, Ketahanan Bencana, dan Kualitas Lingkungan.**

Pembangunan infrastruktur wilayah selalu menjadi salah satu isu penting di setiap wilayah, dimana tersedianya layanan infrastruktur secara andal merata merupakan dasar dari berkembangnya suatu wilayah. Pembangunan infrastruktur secara merata diupayakan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah. Penyediaan infrastruktur didasarkan dengan kuantitas dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang segala aktivitas dan mobilitasnya. Peningkatan ketersediaan infrastruktur merupakan satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana hal tersebut berkaitan dengan salah satu agenda nasional yakni Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi. Dalam agenda nasional tersebut dijelaskan bahwa perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; pembangunan infrastruktur perkotaan; pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital. Agenda pembangunan tersebut sejalan dengan tujuan 6 (air bersih dan sanitasi layak – menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua), tujuan 7 (energi bersih dan terjangkau – menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua), tujuan 11 (kota dan permukiman berkelanjutan – menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan) dalam TPB/SDGs. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah di Kabupaten Rejang Lebong selain untuk mencapai keseimbangan pembangunan, juga untuk mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman guna mewujudkan penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau. Selanjutnya, kualitas dan cakupan layanan infrastruktur selain untuk mendukung pengembangan wilayah, juga untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi di Kabupaten Rejang Lebong dimana kondisinya saat ini relatif masih belum optimal. Jenis dan layanan infrastruktur yang dimaksud antara lain adalah infrastruktur transportasi, konektivitas darat atau jalan, pengairan, air minum dan sanitasi layak dan aman, teknologi informasi dan komunikasi, serta ketenagalistrikan, dimana kesemuanya seharusnya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta. Berdasarkan RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045 disebutkan

bahwa arah pembangunan infrastruktur bidang transportasi difokuskan pada jaringan transportasi darat yang meliputi jalan lingkungan dan jalan usaha tani, yang dilakukan dengan pembangunan jalan baru, peningkatan jalan dan jembatan yang telah ada, pemeliharaan jalan secara rutin, serta penambahan trotoar jalan di kawasan permukiman. Sementara pembangunan perhubungan dan transportasi diarahkan pada upaya terciptanya lalu lintas yang tertib dan transportasi yang aman, nyaman, lancar dan terkendali. Pada pembangunan infrastruktur bidang irigasi diarahkan pada pembangunan baru, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa di setiap desa/kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya. Pembangunan saluran drainase dilakukan dengan pembangunan saluran drainase primer, pembangunan saluran drainase terbuka dan tertutup, dan pemeliharaan jaringan drainase yang sudah ada. Terkait dengan percepatan penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, diarahkan pada tersedianya lingkungan siap bangun dan kawasan siap bangun, serta tertatanya lingkungan komunitas permukiman yang didukung oleh sarana dan prasarana permukiman yang lengkap dan memadai, seperti jalan, air bersih, dan jaringan listrik. Terkait dengan air minum, perlu ditingkatkan baik secara kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas. Terkait dengan penyediaan sistem jaringan energi, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang merupakan pelaksanaan dari Kebijakan Energi Nasional (KEN) mengamanatkan bahwa rasio elektrifikasi ditargetkan dapat mencapai mendekati 100 persen di tahun 2024. Sementara melihat capaian rasio elektrifikasi Kabupaten Rejang Lebong yang tercatat sebesar 87,81 persen pada tahun 2024. Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2040 disebutkan bahwa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan di Kabupaten ini direncanakan terdiri dari infrastruktur pembangkit tenaga listrik yang meliputi PLTA Musi, PLTA Tes, PLTMH Kepala Curup, dan rencana pembangunan PLTP. Selain itu, terdapat pula infrastruktur penyaluran tenaga listrik berupa jalur SUTT, serta perluasan jaringan distribusi tenaga listrik yang direncanakan menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Rejang Lebong. Mengingat kebijakan terkait ketenagalistrikan bukan berada di bawah kewenangan kabupaten, maka pemerintah kabupaten perlu melakukan koordinasi dengan pemangku kebijakan di atasnya yang membidangi urusan ketenagalistrikan. Selanjutnya, isu strategis ini juga merupakan salah satu prioritas nasional karena tercantum dalam tujuh agenda pembangunan nasional yang mengamanatkan “membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim”, dimana agenda tersebut sejalan dengan tujuan tujuan 13 (penanganan perubahan iklim – mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya) dan tujuan 15 (ekosistem daratan - melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati) dalam TPB/SDGs. Agenda pembangunan tersebut menyatakan bahwa dalam pembangunan perlu memperhatikan daya dukung sumber daya

alam dan daya tampung lingkungan hidup kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Kebijakan penataan lingkungan yang sesuai dengan daya dukungnya sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045 diarahkan pada upaya tertatanya wilayah dan ruang sesuai dengan daya dukung lingkungan yang tersedia. Sementara pengendalian dampak lingkungan hidup diarahkan pada perwujudan kualitas lingkungan hidup yang mencapai standar baku mutu lingkungan. Terkait dengan bencana alam, maka diperlukan sebuah upaya mitigasi bencana karena wilayah kabupaten ini terletak pada kondisi geografis yang rawan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, longsor, dan bahaya kebakaran. Mitigasi bencana merupakan salah satu upaya untuk mengurangi risiko bencana. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya untuk saling menjaga kelangsungan lingkungan hidup di Kabupaten Rejang Lebong agar lestari, adaptif dan tanggap terhadap bencana. Meningkatkan daya tanggap kebencanaan yang menjangkau seluruh wilayah merupakan salah satu upaya untuk mengurangi risiko bencana yang dapat datang sewaktu-waktu.

#### **2.4.3.5 Belum optimalnya Pengembangan Kegiatan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing**

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat menunjukkan kondisi perekonomian wilayah tersebut pada tahun tertentu. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun dan masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi provinsi serta nasional. Hal ini disebabkan karena menurunnya pertumbuhan sektor pertanian dan lambatnya pertumbuhan sektor perdagangan. Kegiatan pertanian saat ini merupakan kegiatan utama di Kabupaten Rejang Lebong, walaupun besaran kontribusi PDRB sektor tersebut menunjukkan tren menurun setiap tahunnya. Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya kondisi tersebut adalah terjadinya konversi lahan pertanian menjadi peruntukan lainnya. Turunnya luas lahan pertanian tersebut secara tidak langsung berakibat pada turunnya hasil produksi pertanian di kabupaten ini. Pembangunan revitalisasi pertanian diarahkan pada modernisasi dimana sektor pertanian dan sektor perindustrian menjadi basis kegiatan ekonomi. Kedua sektor tersebut dapat dikembangkan menjadi agroindustri dan agribisnis yang diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian Kabupaten Rejang Lebong seperti yang tertera dalam dokumen RPJPD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025-2045. Pembangunan industri berbasis sumber daya diarahkan pada industri pengolahan hasil pertanian terutama hortikultura sayuran. Industri kecil dan menengah akan menjadi basis industri daerah yang mampu tumbuh dan terintegrasi dengan industri hilirnya. Pengembangan sektor industri ini juga dapat didukung dengan adanya investasi dari dalam maupun luar daerah. Oleh karena itu, pelayanan perijinan yang mudah dan cepat serta jaminan keamanan dan kenyamanan

investasi perlu dikembangkan. Sementara itu, pengembangan usaha mikro dan kecil juga menjadi penting karena melibatkan banyak rumah tangga dan tenaga kerja. Pengembangan usaha dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku, sarana dan prasarana, permodalan, perijinan, serta kemampuan inovasi produk dan pemasaran. Untuk membantu pengembangan usaha mikro kecil ini maka perlu adanya peningkatan layanan pengembangan usaha serta peningkatan daya saing produk. Sektor pariwisata juga menjadi salah satu unggulan dari Kabupaten Rejang Lebong dengan cukup banyaknya obyek wisata alam maupun budaya. Belum kuatnya pariwisata Rejang Lebong saat ini ditengarai karena masih terbatasnya sarana prasarana pariwisata, masih lemahnya koneksi infrastruktur transportasi menuju obyek wisata, serta terbatasnya atraksi wisata. Dengan basis Kabupaten Rejang Lebong sebagai daerah pertanian maka integrasi antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian dapat menjadi peluang pariwisata baru. Oleh karena itu, pengembangan atraksi, aksesibilitas, dan amenitas wisata menjadi penting untuk meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Rejang Lebong. Pengembangan pariwisata ini nantinya tidak lepas dari pengembangan budaya dimana Rejang Lebong dikenal sebagai daerah dengan adat dan budaya yang mengakar kuat sejak lama. Oleh karena itu, melestarikan budaya, termasuk adat istiadat dan kesenian, tidak hanya menjadi tugas Badan Musyawarah Adat saja tetapi juga merupakan tugas bersama masyarakat.

#### **2.4.3.6 Belum optimalnya Pelaksanaan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja.**

Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi salah satu isu daerah dimana sesuai amanat SDG's tingkat kemiskinan diupayakan menjadi nol persen di tahun 2030. Penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 yaitu 41.160 jiwa. Tingkat kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Bengkulu dan juga tingkat kemiskinan nasional. Beberapa kelompok yang diperkirakan termasuk dalam masyarakat berpendapatan terbawah, antara lain petani berlahan sempit termasuk yang bekerja sebagai pekerja keluarga, serta penduduk yang tidak memiliki aset produktif dan pekerjaan. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan ditengarai disebabkan karena rendahnya kemampuan sebagian masyarakat untuk mengakses kebutuhan dasarnya, seperti pendidikan dan kesehatan, serta lemahnya pengembangan terhadap kehidupan ekonomi. Kelemahan secara ekonomi ini ditunjukkan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, rendahnya keterampilan dan produktivitas, serta keterbatasan akses terhadap permodalan, aset produksi, dan pasar. Selain itu, sikap mental masyarakat dalam merespon bantuan atau fasilitas dari pemerintah dimana masyarakat menjadi bergantung pada bantuan pemerintah juga menghambat kemajuan masyarakat. Belum optimalnya penanganan kemiskinan yang dilakukan juga dapat disebabkan oleh belum tervalidasinya data kemiskinan yang lengkap dan akurat, serta minimnya inovasi program-



program penanggulangan kemiskinan. Sesuai dengan amanat RPJMN 2025-2029, maka upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong diarahkan pada menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, penyempurnaan kebijakan bantuan sosial, dan pemberdayaan melalui program ekonomi produktif. Tingkat pengangguran di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024 mencapai 2,43 persen dengan kecenderungan menurun dari tahun 2021. Walaupun begitu, angka tingkat pengangguran ini masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran Provinsi Bengkulu pada Tahun 2024 sebesar 3,11 persen. Kondisi perekonomian daerah dan nasional yang cenderung membaik akan membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berwirausaha. Informasi lain yang cukup menarik adalah jika dilihat menurut status pekerjaan, ternyata di Kabupaten Rejang Lebong penduduk bekerja didominasi oleh penduduk yang berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar. Artinya sebagian besar penduduk yang bekerja ini merupakan pemilik modal. Untuk ke depannya diharapkan pemerintah akan lebih mendukung penduduk yang memiliki inovasi untuk membuka lapangan usaha sendiri dan menggalakkan sector ekonomi kreatif terutama untuk kalangan muda. Namun yang perlu diperhatikan adalah kualitas tenaga kerja dimana rendahnya tingkat pendidikan dapat berpengaruh pada keterampilan dan daya saing tenaga kerja. Upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan belum dirasakan optimal. Tantangan ke depan adalah bagaimana menyiapkan tenaga kerja berkualitas dengan kreativitas dan penguasaan teknologi yang baik sehingga mampu bersaing di pasar kerja nasional maupun global.



## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi Nasional dan Regional dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi ke depan. Secara lebih rinci, kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran mengenai kondisi dan proyeksi ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Gambaran dan perkiraan ekonomi beserta indikator-indikatornya menjadi dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi dan selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2026 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah.

Secara garis besar bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi nasional, kondisi ekonomi Rejang Lebong serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan RKPD tahun 2026. Selanjutnya dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah

#### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

##### **3.1.1 . Kondisi Ekonomi Daerah**

###### **3.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Selain itu PDRB merupakan salah satu indikator yang berperan penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah. Pesat atau tidaknya arus perekonomian di suatu wilayah dicerminkan dari peningkatan PDRB di suatu daerah. Perkembangan PDRB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1. yang menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2023 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp. 11.899,11 miliar dan meningkat menjadi Rp. 13.066,13 miliar pada tahun 2024 dengan laju pertumbuhan PDRB ADHB sebesar 9,8%. Seiring dengan peningkatan PDRB ADHB Kabupaten Rejang Lebong, maka PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 PDRB ADHK Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp. 6.808,99 miliar dan meningkat di tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 7.101,11 miliar dengan laju pertumbuhan PDRB ADHK sebesar 4,29% pada tahun 2024. Berdasarkan data tersebut, hasil perhitungan proyeksi tahun 2025 dan 2026 juga menunjukkan peningkatan baik itu PDRB ADHB maupun PDRB ADHK.

**Tabel 3.1**  
**Nilai PDRB Atas Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Rejang Lebong**  
**Tahun 2020-2024 (dalam Miliar) dan Proyeksi Tahun 2025-2026**

No	Uraian	2020 miliar (Rp)	2021 miliar (Rp)	2022 miliar (Rp)	2023* miliar (Rp)	2024** miliar (Rp)	Proyeksi 2025 miliar (Rp)	Proyeksi 2026 miliar (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	9,537.39	10,091.53	10,992.83	11,899.11	13,066.13	14,848.93	15,658.07
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)***	6,083.03	6,274.23	6,544.12	6,808.99	7,101.11	7,571.31	8,010.45

*Sumber : Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka (diolah), BPS 2025*

*Catatan : \* Angka Sementara*

*\*\* Angka Sangat Sementara*

*\*\*\* Tahun Dasar 2010*

Peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan dari masing-masing sektor pembentuk PDRB Kabupaten Rejang Lebong baik dari sisi produksi maupun dari sisi pengeluaran. Dikarenakan Produk Domestik Bruto Regional Harga Konstan (riil) dapat menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun maka data PDRB ADHK lebih menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi daerah.

Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen. Realisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan solid di atas 5,00 persen di tengah berbagai kondisi ketidakpastian, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2023. Faktor-faktor yang menjaga perekonomian domestik tahun 2024 diantaranya adalah konsumsi masyarakat yang meningkat didorong oleh penyelenggaraan pilpres dan pilkada, pertumbuhan PMTB atau investasi yang didorong oleh peningkatan PMA dan PMDN, dan peningkatan kontribusi ekspor barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang solid pada tahun 2024 menjadi modal besar dalam menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks di tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2025 diprakirakan tumbuh sebesar 5,20 persen. Hal ini diperkirakan didorong oleh kebijakan pemerintah dari sisi pengeluaran dan produksi, seperti penguatan konsumsi, investasi, dan infrastruktur. Meskipun menghadapi tantangan global seperti pelemahan permintaan dunia dan gangguan rantai pasok, neraca pembayaran Indonesia tetap tangguh. Dukungan kebijakan hilirisasi dan stabilitas domestik turut menjaga kepercayaan pasar dan menopang pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Beberapa kebijakan tersebut juga berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Rejang Lebong, pada tahun 2025 diperkirakan PDRB dapat terus mengalami pertumbuhan. Dengan menggunakan proyeksi data enam tahun terakhir dan asumsi pemulihan ekonomi maka diprediksi PDRB ADHB Kabupaten Rejang Lebong meningkat menjadi sekitar Rp. 14.848,93 miliar dan PDRB ADHK Kabupaten Rejang Lebong menjadi Rp. 7.571,31 miliar pada tahun 2025 ini.

### 3.1.1.1.a. PDRB menurut sisi produksi

PDRB menurut sisi produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (lapangan usaha) di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Jika membandingkan nilai setiap lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Rejang Lebong selama dua tahun terakhir (2023-2024), terlihat bahwa lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan masih berpengaruh besar dalam perekonomian di Kabupaten Rejang Lebong (Tabel 3.2).

**Tabel 3.2**  
**Nilai dan Distribusi PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten Rejang Lebong**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023-2024 (dalam miliar)**

No	Lapangan Usaha	PDRB Tahun 2023*		PDRB Tahun 2024**	
		Nilai	Distribusi	Nilai	Distribusi
		(Rp miliar)	(%)	(Rp miliar)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,001.38	29.39	2059.88	29.01
2	Pertambangan dan Penggalian	90.15	1.32	92.17	1.30
3	Industri Pengolahan	273.08	4.01	277.35	3.91
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7.50	0.11	7.77	0.11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.97	0.18	12.69	0.18
6	Konstruksi	258.16	3.79	269.43	3.79
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,235.28	18.14	1268.86	17.87
8	Transportasi dan Pergudangan	418.10	6.14	423.33	5.96
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	138.98	2.04	152.32	2.15
10	Informasi dan Komunikasi	247.61	3.64	271.63	3.83
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	197.94	2.91	208.11	2.93
12	Real Estate	271.26	3.98	281.27	3.96
13	Jasa Perusahaan	10.67	0.16	11.57	0.16
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	647.81	9.51	693.62	9.77
15	Jasa Pendidikan	684.55	10.05	728.14	10.25
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	217.08	3.19	235.851	3.32
17	Jasa Lainnya	97.46	1.43	107.13	1.51
<b>PDRB total</b>		<b>6,808.99</b>	<b>100</b>	<b>7,101.11</b>	<b>100</b>

*Sumber : Kabupaten Rejang Lebong dalam Angka (diolah), BPS 2025*

Sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian Kabupaten Rejang Lebong yaitu dengan nilai nominal lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang meningkat dari Rp.2.001,38 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp.2.059,88 miliar pada tahun 2024. Pada tahun 2023, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebesar 29,39% dan sedikit menurun pada tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 29,01%. Selanjutnya lapangan usaha yang berperan besar kedua dalam perekonomian